

**PERANAN DESA
DALAM PERJUANGAN KEMERDEKAAN :
Studi Kasus Keterlibatan Beberapa Desa
di Daerah Istimewa Yogyakarta
Periode 1945 --1949**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1992**

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

**PERANAN DESA
DALAM PERJUANGAN KEMERDEKAAN:
Studi Kasus Keterlibatan Beberapa Desa
di Daerah Istimewa Yogyakarta
Periode 1945 -- 1949**

Tim Penulis :

Tashadi

Darto Harnoko

Suratmin

Hisbaron Muryantoro

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1992**

Koreksi Naskah :
Soejanto

Penyunting :
Susanto Zuhdi

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku-buku hasil kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah budaya luhur bangsa.

Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, namun dapat dipakai sebagai bahan bacaan serta bahan penelitian lebih lanjut.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan demikian akan dapat memperluas cakrawala budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa.

Akhirnya saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan proyek ini.

Jakarta, September 1992
Direktur Jenderal Kebudayaan



Drs. GHPH. Poeger
NIP. 130 204 562

PENGANTAR

Buku Peranan Desa Dalam Perjuangan Kemerdekaan: Studi Kasus Keterlibatan Beberapa Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 1945 -- 1949 merupakan salah satu hasil pelaksanaan kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1991/1992.

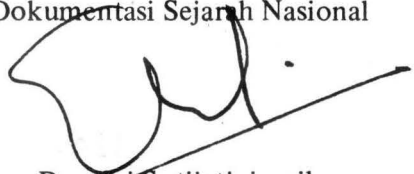
Buku ini memuat uraian tentang peranan masyarakat pedesaan dalam perjuangan kemerdekaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di wilayah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Gunung Kidul yang sangat intens keterlibatannya dalam revolusi.

Bersamaan dengan jatuhnya Kota Yogyakarta pada 19 Desember 1948, suasana revolusi mulai mewarnai kehidupan di pedesaan. Sejak itu masyarakat pedesaan di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta berperan aktif dalam mendukung perjuangan menentang pendudukan Belanda. Peranan mereka tidak terbatas pada bidang pertahanan saja, tetapi juga bidang-bidang pengawasan, penyediaan perbekalan, kesehatan, kurir atau penyidik, penyediaan tempat perlindungan, bantuan dalam bengkel-bengkel persenjataan, dan lain-lain. Semua itu mereka lakukan dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab sehingga terjalin hubungan yang akrab, baik dengan militer maupun pengungsi dari daerah lain.

Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kesejarahan dan memberikan informasi yang memadai bagi masyarakat peminatnya serta memberi petunjuk bagi kajian selanjutnya.

Jakarta, September 1992

Pemimpin Proyek Inventarisasi dan
Dokumentasi Sejarah Nasional

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, flowing letters that appear to be 'Sri Sutjiatiningsih'.

Dra. Sri Sutjiatiningsih
NIP. 130 422 397

DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan	vii
Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Pendahuluan	1
 Bab I Geografi dan Masyarakat Daerah Sleman	 8
1.1 Geografi	8
1.2 Masyarakat	12
 Bab II Jatuhnya Kota Yogyakarta dan Perang Gerilya di Pedesaan	 18
2.1 Jatuhnya Kota Yogyakarta	18
2.2 Organisasi Gerilya	23
2.2.1 Munculnya Suatu Bentuk Pasukan Gerilya	
2.2.2 Pola Kepemimpinan dalam Organisasi Gerilya	26
2.2.3 Senjata dan Daerah Gerilya	28
2.3 Gerak Gerilya dalam Membantu Pemerintah RI	23 29
2.3.1 Gerakan Pasukan Mobil	29
2.3.2 Gerakan Pasukan Teritorial	35
2.3.3 Korban Serangan Belanda	36
2.3.4 Akhir Perang Gerilya	37

2.4	Perang Gerilya di Pedesaan	39
2.4.1	Kabupaten Sleman	39
2.4.2	Kabupaten Bantul	48
2.4.3	Kabupaten Gunung Kidul	70
2.4.4	Kabupaten Kulon Progo	119
Bab III	Keterlibatan Masyarakat dalam Revolusi	136
3.1	Rakyat Desa dan Jaringannya	136
3.2	Keterlibatan Masyarakat dalam Memanggul Senjata	144
Penutup		151
Daftar Nara Sumber		174
Daftar Pustaka		178

PENDAHULUAN

Pedesaan, dalam banyak segi kehidupannya belum mendapat tempat dalam penulisan sejarah Indonesia. Kecenderungan historiografi Indonesia masih menampilkan peristiwa-peristiwa besar yang berhubungan dengan masalah-masalah politik, militer dan perilaku tokoh-tokoh besar. Sebagian besar buku sejarah yang telah ditulis pada umumnya penuh dengan cerita mengenai perang, perebutan kekuasaan serta pengkhianatan atau kepahlawanan¹. Sementara pedesaan dalam segala hal aspek kehidupannya tidak pernah disinggung, padahal daerah pedesaan dengan segala isinya banyak terkait dengan peristiwa sejarah.

Daerah pedesaan beserta masyarakatnya yang tidak terangkum dalam penulisan sejarah Indonesia oleh Sartono Kartodirdjo dikatakan sebagai sejarah yang hilang². Apabila hal ini dibiarkan, orang tidak akan memperoleh pemahaman atau gambaran yang seimbang mengenai masyarakat Indonesia secara keseluruhan; karena itu, Sartono Kartodirdjo mengajak para penulis sejarah dari kalangan Indonesia untuk memasukkan pedesaan dalam penulisan sejarah Indonesia, sehingga dengan demikian sejarah yang telah hilang dapat ditemukan kembali.

Dalam perkembangan sejarah Indonesia di abad ke-20, petani bukan merupakan non-faktor dalam sejarah, tetapi

malahan merupakan faktor yang mempunyai peranan menentukan dalam pergerakan atau pergeseran politik. Menurut pengamatan Sartono Kartodirdjo, dalam sistem politik modern partisipasi politik petani secara langsung atau melalui elit pedesaan tradisional adalah sebagai basis dukungan yang kokoh³. Sementara itu antropolog kenamaan Koentjaraningrat yang waktu mudanya terlibat dalam arus revolusi dan pernah lama tinggal di pedesaan sebagai gerilyawan mempunyai pandangan, bahwa pada hakekatnya sebagian terbesar dari revolusi Indonesia terjadi atau berlangsung di pedesaan⁴. Menurut Koentjaraningrat, di pedesaan banyak masalah yang sebenarnya merupakan bidang penelitian sangat menarik bagi penelitian sejarah.⁵

Berangkat dari beberapa pendapat tentang pedesaan seperti di atas, maka tulisan ini disusun. Dalam tulisan ini akan diungkapkan bagaimana daerah pedesaan serta masyarakatnya terlibat dalam arus revolusi.

Sebelum uraian memasuki pokok persoalan, terlebih dahulu akan dikemukakan pengertian-pengertian dan batasan-batasan permasalahan yang digarap.

Pengertian Pedesaan

Membuat definisi konsep desa yang ada di Indonesia ini tidaklah mudah. Hal ini disebabkan oleh banyaknya macam masyarakat desa yang berbeda menurut prinsip-prinsip susunan dan wujud lahirnya. Seorang sarjana Indologi berkebangsaan Belanda bernama J.H. Boeke dalam serangkaian penelitiannya di beberapa daerah mengenai pedesaan di Indonesia sampai pada kesimpulan, bahwa desa Indonesia, adalah : kehidupan masyarakat beragama yang terdiri atas petani.⁶ Kesimpulan Boeke itu masih umum sifatnya. Tentang perkataan "desa", sebagaimana kita ketahui adalah istilah yang hanya dipakai dalam masyarakat di Jawa, Madura, dan Bali (Drs. A Rosyid Rojani Bc. Hk, 1972 : 26), sedangkan di daerah-daerah lain kita kenal istilah lain seperti "nagari" di Minangkabau, "gam-

pong" di Aceh, "wanna" di Minahasa, "matawi" di Bugis, "huta" di Batak dan lain-lain. Berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Desa Nomor 5 Tahun 1979 pasal 1, pengertian desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian desa yang agak sama dapat diperoleh dari hasil penelitian Selo Sumardjan. Dari hasil penelitiannya di Jawa, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, ia menyimpulkan, bahwa desa adalah suatu gugusan teritorial yang terdiri atas beberapa dukuh yang diperintah oleh seorang kepala desa atau lurah yang dipilih langsung oleh rakyat.⁷

Selain istilah "desa" di Daerah Istimewa Yogyakarta, juga di Jawa Tengah dan Jawa Timur terdapat atau dikenal dengan istilah "kalurahan". Pemakaian istilah kalurahan ini oleh rakyat pada umumnya sering dicampuradukkan dengan desa, padahal istilah "kalurahan" itu sebenarnya lebih menunjukkan pemerintahannya yang berada di bawah lurah (kepala desa). Di Daerah Istimewa Yogyakarta, istilah kalurahan itu tidak hanya sebagai bahasa Jawa, tetapi sudah dipakai sebagai bahasa Indonesia, bahkan sebagai istilah teknis yuridis dalam peraturan dan perundangan, terutama untuk menunjukkan "pemerintahan desa" sebagaimana yang tercantum dalam maklumat dan peraturan-peraturan daerah. Kecuali itu dikenal pula istilah lain yakni "kelurahan", yang menurut undang-undang nomor 5 tahun 1979, mempunyai pengertian sebagai berikut :

"Kalurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat, yang tidak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Dari definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa kelurahan mempunyai tiga unsur yang harus dipenuhi, yaitu : wilayah.

penduduk, dan pemerintah. Dan di dalam "kalurahan" ini tidak terdapat adanya unsur seperti yang dimiliki oleh "desa". Lurah atau kepala desa dalam menjalankan tugas pemerintahan dibantu oleh seorang kepala bagian umum (carik), seorang kepala bagian bagian perekonomian (kemakmuran), seorang kepala bagian agama (modin), seorang kepala bagian sosial, dan seorang kepala bagian keamanan.¹⁰ Penghubung antara rakyat dengan pemerintah desa adalah kepala dukuh. Dengan perantaraan kepala dukuh, komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan rakyat dapat dilaksanakan. Kepala dukuh bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan di daerahnya. Dengan demikian ia mempunyai kedudukan mirip kepala desa hanya saja kepala dukuh tidak memiliki pembantu seperti halnya kepala desa.

Pengertian Revolusi

Istilah revolusi mengandung pengertian yang sangat luas, sehingga para ahli mempunyai kesimpulan atau pengertian yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda. Di antara para ahli itu ada yang mengartikan revolusi sebagai suatu perubahan sistem dan susunan masyarakat dari suatu zaman.¹¹ Pendapat lain mengatakan revolusi adalah restrukturisasi fundamental dari suatu sistem politik dengan kekerasan dalam jangka yang relatif singkat.¹² Pendapat lain lagi mengatakan, revolusi adalah perubahan yang mendadak dan berlangsung cepat serta bersifat fundamental.¹³

Pengertian revolusi seperti di atas apabila dihubungkan dengan apa yang berlangsung di Indonesia dari tahun 1945 sampai tahun 1949 ada benarnya. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Sejak saat itu Indonesia menjadi sebuah negara merdeka. Ini berarti terjadi suatu perubahan yang sangat fundamental dalam bidang politik atau pemerintahan. Struktur masyarakat berubah dari masyarakat jajahan menjadi masyarakat merdeka. Lebih dari itu dalam masyarakat terjadi pergeseran-pergeseran status.¹⁴

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 nampaknya baru merupakan langkah awal dari upaya untuk menegakkan kedaulatan negara. Sejak itu bangsa Indonesia sudah harus menghadapi Belanda yang bermaksud menguasai kembali wilayah Indonesia. Dengan demikian perselisihan Indonesia -- Belanda tidak dapat dihindari. Seiring dengan masalah itu di berbagai daerah, massa melakukan pemberontakan terhadap golongan berkedudukan, misalnya di Aceh, Sumatera Utara dan tiga daerah Jawa Tengah (Brebes, Tegal, dan Pemalang).¹⁵ Terhadap peristiwa ini, pemerintah pusat mau tidak mau harus turun tangan. Sementara itu organisasi politik yang tumbuh di Indonesia saling bertentangan. Dari pertentangan antarkekuatan politik itu kemudian terjadi peristiwa penculikan Sjahrir (3 Juli 1946) dan peristiwa Madiun (September 1948).¹⁶

Niat Belanda menguasai wilayah Indonesia nampaknya tidak main-main. Hal ini nampak dengan tindakannya dua kali melakukan serangan terhadap Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam usahanya mengusir Belanda dari persada Indonesia menempuh jalan perundingan dan perang gerilya, namun pihak Belanda tidak pernah merasa puas dengan hasil yang dicapai di meja perundingan sehingga secara sepihak Belanda melakukan agresi militer. Berhubung pihak Indonesia menyadari akan keterbatasan dalam bidang persenjataan yang dirasa tidak akan mampu mengimbangi senjata Belanda, maka usaha terbaik untuk menghadapi kekerasan Belanda ialah dengan sistem perang gerilya. Cara diplomasi dan perjuangan bersenjata itu dijalankan sampai akhirnya Belanda meninggalkan wilayah Indonesia. Dengan demikian pengertian revolusi dalam konteks Indonesia seperti yang dimaksud dalam tulisan ini adalah proses politik yang diwarnai dengan konflik antargolongan politik, pemberontakan massa terhadap golongan berkedudukan, dan perjuangan menegakkan kemerdekaan yang akhirnya berhasil menciptakan Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila.

Serangan Belanda secara tiba-tiba terhadap ibukota Republik Indonesia pada 19 Desember 1948, memaksa tentara

Republik Indonesia meninggalkan kota dan tinggal di pedesaan. Mereka menyusun strategi untuk menghadapi tentara Belanda dari sana. Tahi Bonar Simatupang, seorang ahli perang di zaman revolusi mengibaratkan kekuatan yang tersimpan di pedesaan yang telah dibangkitkan selama revolusi dikatakannya laksana kekuatan sebuah sungai yang sedang banjir.¹⁷ Sementara itu tokoh militer lain pada masa yang sama, yaitu Abdul Haris Nasution, menyatakan bahwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah bersendikan rakyat.¹⁸

Dalam penelitian ini daerah pedesaan yang dipilih sebagai *sample* jatuh pada wilayah Kabupaten Sleman, wilayah Kabupaten Bantul, dan Gunungkidul. Dari fakta yang dapat ditemukan, wilayah pedesaan di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunungkidul rupanya sangat intens terlibat dalam revolusi; karena itu wajar apabila di daerah-daerah tersebut didirikan monumen-monumen perjuangan sebagai "tetenger" dan tanda bukti bahwa di daerah tersebut pernah terjadi peristiwa bersejarah yang mendukung nilai-nilai luhur dan nilai-nilai kepahlawanan. Jumlah monumen yang didirikan di suatu daerah tidak sama tergantung dari peran daerah tersebut dalam arus revolusi. Dari sini nampak bahwa daerah Kabupaten Sleman memiliki monumen perjuangan paling banyak (17 buah) jika dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bertolak dari fakta historis inilah maka *sample* penelitian ini lebih difokuskan pada daerah pedesaan di Kabupaten Sleman, namun untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai sejauh mana keterlibatan desa dalam arus revolusi di Daerah Istimewa Yogyakarta, desa-desa di daerah Kabupaten Bantul dan Gunungkidul pun mendapat perhatian dalam penelitian ini.

Revolusi Indonesia mencapai puncaknya pada 17 Agustus 1945, tetapi tidak berarti bahwa seluruh wilayah Indonesia terbawa arus revolusi pada saat itu juga. Walau Yogyakarta sejak minggu pertama bulan Januari 1946 dijadikan ibukota Republik Indonesia, suasana revolusi belum mewarnai pedesaan.

an. Bersamaan dengan jatuhnya Kota Yogyakarta pada 19 Desember 1948, suasana revolusi mulai mewarnai kehidupan di pedesaan.¹⁹ Sejak itu daerah pedesaan merupakan tempat pertahanan dan tempat pengungsian. Mereka yang datang ke desa adalah para pejuang dari bermacam-macam kesatuan pejuang dan penduduk dari kota.²⁰

Suasana revolusi mewarnai kehidupan dan menimbulkan kegiatan tambahan bagi penduduk desa. Mereka melakukan penjagaan dan pengawasan di luar desa. Selain itu ada yang menggabungkan diri pada kesatuan pejuang yang bermarkas di desa setempat, terutama para pemudanya. Suasana revolusi secara berangsur-angsur berkurang sejak Belanda menarik pasukannya dari Yogyakarta pada 29 Juni 1949. Mengingat suasana revolusi di wilayah Sleman, Bantul, dan Gunungkidul, serta Kulonprogo baru dirasakan bersamaan dengan agresi kedua oleh Belanda atas ibukota Republik Indonesia, maka batasan waktu tulisan ini ditetapkan sejak Belanda melakukan agresi kedua hingga ditariknya pasukan Belanda dari Yogyakarta pada 19 Desember 1948 sampai 29 Juni 1949.

BAB I

GEOGRAFI DAN MASYARAKAT DAERAH SLEMAN

1.1 Geografi

Penggambaran geografi dan masyarakat dalam penelitian ini kami utamakan pada wilayah Sleman yang memang merupakan fokus penelitian ini. Dalam usaha memberi gambaran wilayah Sleman dalam masa revolusi, di sini perlu diketengahkan uraian tentang kegunaan tanah, luas tanah, dan jenis tanaman yang dihasilkan. Kabupaten Sleman terletak di bagian utara dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan luas kurang-lebih 49.585 ha.¹ Letaknya di lereng selatan Gunung Merapi. Gunung itu masih aktif dan setiap kali masih memuntahkan lahar, batu, pasir, dan abu. Karena letak wilayah Sleman Tengah berada di daerah yang sering dilewati benda-benda berasal dari kandungan gunung berapi, maka sebagian besar jenis tanahnya adalah tanah muda gunung berapi atau *Youngandesitic ash soil* (YA). Jenis tanah ini terbagi dalam tiga kategori. Masing-masing kategori menunjukkan tingkat kesuburan jenis tanah itu.² Tanah muda gunung berapi pada umumnya mempunyai sifat: (1) berstruktur pasir, (2) sangat kaya akan mineral bahan zat-zat makanan bagi tumbuh-tumbuhan, (3) miskin akan zat lemas (nitrogen), dan (4) sangat mudah meresapkan air.³

Ketiga kategori jenis tanah YA itu masing-masing adalah:⁴

- (1) YA. 1, terdiri atas pasir kasar, kering tidak mendapatkan pengairan bahan-bahan bakal zat makanan yang berasal dari batu-batu sebagian belum masak, belum dapat diisap oleh tumbuh-tumbuhan. Sangat miskin akan zat N. dan humus. Tanah demikian merupakan tanah tegalan yang kurus.
- (2) YA. 2, terdapat di daerah yang pengairannya cukup baik sehingga dapat dibuat sawah, struktur tanahnya berpasir halus. Bahan-bahan bakal zat makanan yang berasal dari batu-batuan telah banyak berubah menjadi garam-garaman yang telah dapat diisap oleh akar tumbuh-tumbuhan. Zat N. dan humus keadaannya kurang, karena zat-zat tersebut didapat dari pengairan saja. Kesuburan tanahnya cukup.
- (3) YA.3, strukturnya pasir, cukup banyak zat-zat makanan dan banyak mengandung zat N. Tanahnya cukup subur.

Semasa revolusi, Kabupaten Sleman terdiri atas tiga kewedanaan, 17 kecamatan dan 86 kelurahan. Ketiga kewedanaan itu ialah Sleman Barat, Sleman Tengah, dan Sleman Timur.⁵

Kawedanaan Sleman Tengah waktu itu meliputi kecamatan-kecamatan: Mlati, Sleman, Tempel, Turi, Pakem, Ngaglik, Depok. Kecamatan yang tersebut terakhir di masa-masa revolusi masuk dalam wilayah pertahanan Sleman Timur. Wilayah Sleman Tengah secara keseluruhan seluas 21.134 ha.⁶ Daerah seluas itu terdiri atas 11.660 ha tanah persawahan, 2881 ha tanah tegalan, 6303 ha tanah pekarangan, dan 290 ha tanah kosong.⁷ Ketujuh kecamatan itu masing-masing memiliki areal tanah persawahan sebagai berikut: Kecamatan Mlati (1430 ha), Kecamatan Sleman (1928 ha), Kecamatan Tempel (1927 ha), Kecamatan Turi (1604 ha), Kecamatan Pakem (1809 ha), Kecamatan Ngaglik (2103 ha), dan Kecamatan Depok (859 ha). Areal tanah tegalan masing-masing kecamatan adalah : Kecamatan Mlati (152 ha), Kecamatan Sleman (22 ha), Kecamatan Tempel (9 ha), Kecamatan Turi (912 ha), Kecamatan Pakem

(416 ha), Kecamatan Ngaglik (417 ha), dan Kecamatan Depok (908 ha). Luas tanah pekarangan masing-masing kecamatan sebagai berikut : Kecamatan Mlati (952 ha), Kecamatan Sleman (770 ha), Kecamatan Pakem (851 ha), Kecamatan Ngaglik (932 ha), dan Kecamatan Depok (712 ha). Dua kecamatan yang memiliki tanah kosong masing-masing, Kecamatan Turi (115 ha) dan Kecamatan Pakem (175 ha).⁸ Dengan memperhatikan jenis tanah dan luas tanah memberikan gambaran bahwa wilayah Sleman Tengah memang suatu hal yang sangat memungkinkan menjadi daerah basis logistik di saat Republik Indonesia mengalami krisis, yakni ketika terjadi pendudukan atas Kota Yogyakarta oleh Belanda.

Macam tanah persawahan terdiri atas tiga kategori. *Pertama*, sawah daerah oncoran/pengairan teknis. Di sini biasanya ditanam padi "rendengan" dan padi "gadu" dalam waktu satu tahun. Berhubung keadaan airnya melimpah, maka sepanjang tahun ditanami padi, karena itu rendengan dan musim tanam gadu sulit untuk ditetapkan. Sawah daerah pengairan teknis berada di sebagian tanah persawahan di Kecamatan Pakem, sebagian besar tanah persawahan di Tempel, sebagian besar tanah persawahan di Kecamatan Sleman, sebagian kecil tanah persawahan di Kecamatan Ngaglik, sebagian kecil tanah persawahan di Kecamatan Mlati, dan sebagian kecil tanah persawahan di Kecamatan Depok. *Kedua*, sawah daerah pengairan setengah teknis. Untuk sawah jenis ini, bagi lahan yang berdekatan dengan dam, sistem penanaman padi berlangsung sebagaimana pada daerah sawah dengan sistem pengairan teknis. Bagi lahan yang letaknya jauh dari bendungan, penanaman padi diatur dengan sistem "perbagian". Bila usai panen padi rendengan, sawah kemudian ditanami padi gadu dan tanaman palawija.⁹ Tanah persawahan yang mendapatkan "oncoran" setengah teknis berada di sebagian kecil tanah persawahan dalam wilayah Kecamatan Sleman, Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem dan sebagian besar tanah persawahan dalam wilayah Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Depok, dan Kecamatan Mlati. Ketiga, sawah tadah hujan ada di sebagian kecil tanah

sawah Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Mlati, dan Kecamatan Depok.¹⁰ Sistem penggarapan lahan dan pembagian hasil bumi di musim panen memberi indikator adanya organisasi yang menghubungkan petani penggarap dengan pemilik lahan yang luas. Pola hubungan demikian sering disebut patron-klien,¹¹ yang dapat dipergunakan untuk menjalankan aksi-aksi yang menopang adanya pemerintahan Republik Indonesia.

Sebagaimana telah disebutkan di atas nampak bahwa tanah tegalan banyak terdapat di wilayah Kecamatan Mlati, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Ngaglik, dan Kecamatan Depok. Mengingat jenis tanah tegalan tidak pernah mendapat pengairan dan kadang-kadang terdiri atas tanah pasir kasar, sehingga kurang produktif. Tanaman yang dapat tumbuh di tanah tegalan dan mendatangkan hasil adalah: jagung, ubi jalar, dan ketela pohon. Selain itu ada pula jenis tanaman keras seperti: jambu biji, jambu mede, nangka dan pohon-pohon seperti mindi dan sengon. Dua jenis tanaman terakhir ini menghasilkan kayu. Untuk menikmati hasilnya, memerlukan waktu cukup lama, yaitu setelah menjadi pohon besar yang bermanfaat untuk bahan bangunan. Bagi masyarakat pedesaan, kayu merupakan bahan bakar utama, sebab minyak tanah tidak lazim dipergunakan untuk memasak.

Pada umumnya masyarakat pedesaan memiliki tanah pekarangan cukup luas. Dari tanah pekarangan banyak tumbuh dan ditanam pohon sukun, kluwih, pepaya, "gori" (buah nangka muda), dan kelapa. Dari seluruh tujuh kecamatan dalam wilayah Sleman Tengah ada dua kecamatan yang sebagian tanah pekarangannya digunakan penduduk untuk tanaman salak, masing-masing adalah Kecamatan Tempel dan Kecamatan Turi. Di sana sebagian penduduk mengusahakan perkebunan salak secara sungguh-sungguh, sehingga hasilnya melebihi hasil pertanian di sawah.

Untuk melancarkan pemasaran sebagian hasil bumi, tersedia fasilitas tradisional berupa jalan. Jalan yang mempunyai fungsi ekonomis ini semasa revolusi memiliki arti strategis. Di

wilayah Sleman Tengah terbentang dua jalan raya yang sangat penting bagi Belanda. Kedua jalan itu merupakan jalur penghubung Belanda yang tinggal di Kota Yogyakarta dengan pasukan-pasukannya yang tinggal di daerah sekitarnya. Pertama adalah jalur Yogyakarta – Magelang. Di jalur Yogyakarta – Magelang yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Sleman, pos-pos Belanda berada di bekas pabrik gula di Beran; bekas pabrik gula di Medari dan pasar Tempel. Jalur kedua adalah jurusan Yogyakarta – Kaliurang. Di jalur ini pos-pos Belanda berada di Kleodokan (selatan Pakem), Rumah Sakit Jiwa Pakem dan di Kaliurang.¹² Sementara itu daerah Kaliurang selain sebagai pos keamanan Belanda juga merupakan tempat istirahat para serdadu dan politikus Belanda.¹³

Di tengah-tengah antara jalan raya Yogyakarta – Magelang dan Yogyakarta – Kaliurang membujur sebuah jalan dari Tugu Yogyakarta ke Pulowatu. Jalan itu melintasi wilayah Kecamatan Ngaglik dan Kecamatan Pakem. Dari pertigaan Pulowatu, apabila ditelusuri ke arah timur, akan sampai ke Kecamatan Pakem dan akhirnya apabila perjalanan diteruskan ke utara dari Pakem akan sampai di Kaliurang. Apabila dari Pulowatu ditelusuri ke arah barat, akan sampai ke Kecamatan Turi. Dari Turi menuju ke arah barat, apabila ditelusuri terus, akan sampai di Kecamatan Tempel, sedangkan apabila dari Turi perjalanan diteruskan menuju ke arah selatan, akan sampai di Kecamatan Sleman. Dari Sleman perjalanan diteruskan ke arah tenggara akan sampai di Kecamatan Mlati, sedangkan apabila dari Sleman perjalanan diteruskan ke barat laut akan sampai di Kecamatan Tempel. Dengan demikian Kecamatan Mlati, Kecamatan Sleman, dan Kecamatan Tempel berada dalam satu jalur jalan Yogyakarta – Magelang.

1.2 Masyarakat

Dari gambaran geografi seperti di atas, memungkinkan sebagian besar masyarakat Sleman hidup dari menggarap lahan. Dilihat dari sudut pemilikan lahan, masyarakat di daerah ini

dapat dikelompokkan menjadi petani pemilik, petani penggarap, dan buruh tani. Petani pemilik adalah orang-orang yang memiliki lahan pertanian cukup luas. Pada umumnya mereka menggarap seluruh milik lahan pertaniannya sendiri, tetapi ada pula yang sebagian dari lahan pertaniannya dikerjakan oleh orang lain dengan sistem bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Orang-orang yang termasuk petani penggarap adalah mereka yang memiliki lahan tidak begitu luas, tetapi memiliki perangkat untuk menggarap. Dengan memiliki sarana produksi seperti sapi ataupun kerbau biasanya mereka mendapat tawaran menggarap lahan milik para petani pemilik. Dengan demikian petani penggarap ini selain mengerjakan lahan miliknya sendiri yang tidak begitu luas juga menggarap tanah milik para petani pemilik. Dengan demikian petani penggarap ini selain mengerjakan lahan miliknya sendiri yang tidak begitu luas juga menggarap tanah milik para petani pemilik. Adapun tujuan orang-orang yang termasuk petani pemilik menawarkan sebagian lahannya agar digarap oleh petani penggarap adalah bila nanti tiba saatnya "musim labuh", diharapkan si petani penggarap akan membantu mengerjakan lahan pertaniannya sendiri.¹⁴

Mereka yang tergolong buruh tani adalah orang-orang yang walaupun memiliki lahan, namun sangat sempit sekali. Selain lahannya sangat sempit, mereka juga tidak mempunyai sarana produksi. Berhubung lahan yang dimiliki sangat terbatas serta tidak mempunyai alat produksi, maka untuk mencukupi segala kekurangan kebutuhan hidupnya mereka bekerja sebagai buruh tani. Sebagai buruh tani mereka bekerja pada para petani pemilik. Jenis pekerjaan yang harus diselesaikan oleh buruh tani antara lain, di musim tanam padi menggarap lahan yang siap untuk ditanami padi, selesai musim tanam padi mengurus tanaman termasuk di antaranya melakukan pemupukan dan menyiangi tanaman, di waktu musim panen membereskan panen hingga masuk lumbung. Setelah itu mereka mengolah tanah untuk ditanami palawija atau tanam gadu.

Pedagang atau "bakul" merupakan kelompok kecil dalam masyarakat Sleman. Walaupun tidak dapat diketemukan sumber tertulis yang menyangkut jumlah penduduk Sleman beserta komposisi penduduk menurut jenis pekerjaannya, namun dapat dipastikan bahwa pada waktu itu pedagang atau "bakul" merupakan kelompok kecil dalam masyarakat. Dalam satu pedukuhan biasanya hanya ada beberapa orang yang melakukan usaha dagang, bahkan dalam suatu pedukuhan ada yang penduduknya tak seorang pun berusaha di bidang perdagangan.

Pada masa revolusi, di daerah Sleman Tengah tepatnya di pedukuhan Rejodani, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, ada seorang pedagang yang sangat kaya. Orang itu bernama Haji Harun. Dia selain sebagai pedagang hasil bumi dan barang-barang kelontong juga sebagai "tuan tanah". Sebagai tuan tanah, sebagian besar luas lahan yang dimilikinya berada di kelurahan lain, yaitu Kelurahan Pendowoharjo dan Sinduharjo. Masing-masing berada di Kecamatan Sleman dan Ngaglik.¹⁵ Usaha Haji Harun selain berdagang dan mengolah sawah juga membuka usaha penggilingan padi.

Di dekat rumah tinggal Haji Harun yang sekaligus merupakan pertokoan, tempat penggilingan padi dan sebagai gudang terdapat sebuah pasar desa. Haji Harun merupakan salah satu dari orang-orang yang memprakarsai pembukaan pasar.¹⁶ Sukses Haji Harun kemudian diikuti oleh anaknya bernama Haji Munir. Ia memang tidak mengikuti jejak ayahnya sebagai pedagang hasil bumi ataupun sebagai pedagang kelontong, tetapi berusaha di bidang perhotelan. Hotel yang dikelola haji Munir itu bernama Hotel Trim terletak di sebelah selatan Stasiun Kereta Api Tugu Yogyakarta.¹⁷

Haji Harun merupakan salah seorang pengusaha tersukses di daerah Sleman Tengah, bahkan untuk kawasan "lor negro". Keberhasilan Haji Harun dalam berusaha sudah nampak sejak zaman penjajahan Jepang hingga tahun 1960an¹⁸. Selain Haji Harun, orang-orang Sleman yang berusaha di bidang perdagangan umumnya hanya memperdagangkan satu jenis komoditi. Misalnya berdagang tembakau, beras, dan lain-lain. Mereka yang berusaha

demikian dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan tempat tinggalnya, yakni pada tingkat pedukuhan merupakan orang yang terpendang. Di antara mereka ada yang berhasil membeli tanah sawah atau tanah tegalan dengan uang dari keuntungan berdagang.¹⁹ Dengan demikian orang-orang yang termasuk ulet dalam berusaha, di samping tetap menekuni usaha perdagangan juga menggarap lahan.

Di Sleman juga ada orang-orang yang berusaha "bakulan". Usaha mereka hanya kecil-kecilan, dagangannya terbatas jumlahnya. Misalnya mereka yang menjual sayur-sayuran. Barang dagangan diperoleh langsung dari petani, baik ketika belum dibawa ke pasar ataupun sudah dibawa ke pasar desa. Para bakul kemudian membawanya ke pasar kota seperti Pasar Kranggan atau menjual secara eceran ke kampung-kampung. Sehabis menjajakan dagangannya, sebelum pulang mereka berbelanja kebutuhan sehari-hari seperti gula pasir, teh, garam dan segala macam keperluan dapur lainnya, untuk kemudian dijual di pasar desa.²⁰ Demikian pula halnya para bakul beras gendongan. Mereka mencari dagangan di pasar desa, untuk kemudian dijajakan di kampung-kampung dalam Kotamadya Yogyakarta.²¹ Ada lagi "bakul" musiman. Mereka pada umumnya terdiri atas orang-orang yang memiliki lahan tetapi tidak begitu luas, sehingga selesai menggarap lahan banyak waktu yang terluang. Pada saat tidak ada kesibukan di sawah, yakni sehabis menyiangi tanaman dan melakukan pemupukan, di Daerah Turi dan Pakem musim buah-buahan. Jenis buah-buahan yang diperjualbelikan waktu itu adalah jambu biji, kokosan, dan lain-lain. Tempat untuk memasarkan buah-buahan itu di pasar Kricak, Jalan Magelang dan Pasar Kranggan. Mereka mengambil barang dagangannya dari pasar Srowolan, Kelurahan Purwobinangun, Kecamatan Pakem. Cara memperolehnya tidak selalu dengan pembayaran bentuk uang, tetapi lebih sering menggunakan sistem *barter*. Biasanya, untuk mendapatkan dagangan, para "bakul" lebih sering membawa keperluan dapur seperti garam, gula, dan teh.²²

Di tingkat desa dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, lurah atau kepala desa merupakan satu-satunya penguasa peme-

rintahannya. Dia dibantu oleh seorang carik desa dan melaksanakan kekuasaannya di pedukuhan dengan bantuan pembantu-pembantunya yang terdiri atas seorang kepala bagian sosial, seorang kepala bagian kemakmuran, seorang kepala bagian agama dan seorang kepala bagian keamanan.²³ Di Samping itu di setiap pedukuhan, lurah mempunyai seorang pembantu yang disebut kepala dukuh. Walaupun tingkat pedukuhan tidak diakui sebagai suatu satuan pemerintahan yang otonom, namun di sini ada kepala dukuh yang melakukan tugas-tugas pemerintahan dalam pedukuhan sebagai pemerintahan satu orang. Di tingkat pedukuhan, kepala dukuh berperan sebagai bapak suatu keluarga besar, yakni masyarakat pedukuhan.²⁴

Secara sosial ekonomis lurah beserta para pembantunya merupakan orang-orang yang terpendang dalam masyarakat. Dengan memangku jabatan lurah atau kepala bagian ataupun kepala dukuh, seseorang akan dihormati oleh masyarakat. Secara ekonomis mereka tergolong kuat, sebab pada umumnya memiliki tanah garapan cukup luas. Tanah itu selain milik sendiri ada lagi tanah "bengkok" atau tanah "plungguh" sebagai gaji selama menjabat pamong desa.

Komposisi masyarakat Sleman apabila diklasifikasikan menurut tingkat ketaatan menjalankan ibadah agama Islam, terbagi dalam dua kelompok, yakni golongan santri dan golongan abangan.²⁵ Orang-orang yang mengaku beragama Islam namun tidak melaksanakan seluruh rukun Islam yang oleh Clifford Geertz disebut orang "abangan", di Sleman Tengah merupakan kelompok mayoritas. Sementara itu orang-orang yang oleh penduduk dianggap sebagai orang-orang santri merupakan kelompok minoritas di Sleman Tengah. Mereka tinggal di pedukuhan-pedukuhan Plosokuning, Rejodani, dan Jongke, sedangkan golongan abangan bertempat tinggal tersebar di seluruh Sleman Tengah.²⁶

Ada sementara anggota masyarakat menggolongkan masyarakat Sleman pada masa revolusi terdiri atas golongan priyayi dan golongan masyarakat kebanyakan. Dalam pandangan mereka yang termasuk golongan priyayi adalah orang-orang yang bekerja

di pemerintahan ataupun sebagai guru.²⁷ Hal ini berbeda dengan pengertian priyayi seperti yang dimaksud oleh Selo Soemardjan. Priyayi menurut Selo Soemardjan adalah orang yang mengabdikan pada pemerintah sultan tidak termasuk di dalamnya seluruh pegawai negeri.²⁸

Dengan memaparkan keadaan geografi dan keadaan masyarakat seperti di atas, diharapkan dapat memperjelas diskripsi berikutnya.

BAB II

JATUHNYA KOTA YOGYAKARTA DAN PERANG GERILYA DI PEDESAAN

2.1 Jatuhnya Kota Yogyakarta

Kemerdekaan seperti sebuah jembatan. Dengan kemerdekaan, suatu bangsa akan bebas bergerak dalam segala aspek kehidupan. Di seberang jembatan itu dijanjikan suatu kehidupan yang menyangkut masalah sosial, ekonomi, politik, kebudayaan dan keagamaan yang leluasa, hidup kemanusiaan secara manusia dan selayak manusia.¹ Untuk tujuan yang mulia itu maka kemerdekaan perlu diupayakan.

Kemerdekaan bangsa Indonesia telah dirintis sejak awal abad ke-20. Cita-cita itu terwujud pada 17 Agustus 1945. Pada saat itu Soekarno – Hatta mewakili seluruh bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Dalam waktu relatif singkat telah pula terbentuk suatu negara lengkap dengan persyaratannya.² Lebih dari itu mempunyai pula Undang-undang Dasar dan telah mengangkat Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Walau keadaan belum sempurna telah pula dibentuk Kabinet I.³ Dalam salah satu bagian Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan :

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan prikeadilan".⁴

Penyataan itu mencerminkan kesungguhan Indonesia dalam bernegara serta usahanya mengenyahkan penjajahan, sehingga ketika Belanda berusaha menguasai kembali wilayah Indonesia, mendapat tantangan dari bangsa Indonesia.

Belanda ingin berkuasa kembali di Indonesia serta tidak mau mengakui keberadaan Negara Republik Indonesia, karena menurut anggapannya, Indonesia merdeka hanyalah rekaan Jepang.⁵ Sebenarnya segala persiapan untuk mendirikan suatu Republik buatan Jepang telah kandas ketika Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, sehingga kapitulasi Jepang lebih cepat datangnya dari pada hari kemerdekaan yang dijanjikan Jepang kepada bangsa Indonesia.⁶ Dengan demikian tuduhan Belanda bahwa Indonesia merdeka hanya rekaan Jepang sebenarnya merupakan dalih Belanda untuk membenarkan tindakannya yang melanggar hak-hak bangsa lain. Faktor lain yang mendorong Belanda menggebu ingin berkuasa kembali di Indonesia adalah persetujuan Potsdam (sekarang masuk daerah Jerman Timur). Dalam persetujuan Potsdam oleh Sekutu, Jepang disarankan agar menyatakan penyerahan dengan tidak bersyarat. Selain itu dalam persetujuan Belanda juga diputuskan bahwa seluruh wilayah kekuasaan Jepang dipulihkan statusnya seperti sebelum perang? Berhubung Indonesia sebelum menjadi wilayah jajahan Jepang merupakan daerah jajahan Belanda, maka ketika Jepang kalah perang, Belanda merasa berhak berkuasa kembali atas Indonesia.

Bangsa Indonesia yang telah merasa merdeka tidak mau menerima kedatangan pemerintahan Belanda. Pertempuran-pertempuran berkobar ketika tentara Serikat (Inggris—Gurkha) mendarat di Jawa, sebab di belakangnya "dembongceng" anggota tentara dan pemerintahan Hindia Belanda yang bernama NICA (*Netherlands Indie Civil Administration*).⁸ Pada bulan-bulan Oktober, November, dan Desember 1945, Kota Jakarta menjadi

ajang kekerasan. Sementara itu Belanda menuntut agar kekuasaannya diakui. Pemerintah Republik Indonesia yang telah lengkap dengan aparatnya supaya diganti dengan suatu pemerintahan yang dikepalai oleh seorang gubernur jenderal dibantu oleh orang-orang Indonesia sebagai menteri dan oleh suatu parlemen Indonesia.⁹ Sementara itu pihak Indonesia dalam manifest politik yang dikeluarkan pada bulan November 1945, sanggup mengadakan kerjasama dengan Belanda dalam segala bidang, dengan syarat bahwa Belanda harus mengakui kemerdekaan Indonesia. Republik sebagai badan politik yang merdeka akan memberikan prioritas pada bangsa Belanda mengenai ekonomi dan hak-hak modal asing akan diakui sepenuhnya.¹⁰ Oleh karena kedua belah pihak saling mempertahankan prinsip serta konsepsi masing-masing, maka perselisihan tidak dapat dihindari. Dalam keadaan demikian Jakarta dirasakan semakin gawat, sehingga dalam sidang kabinet 3 Januari 1946 diambil suatu keputusan untuk memindahkan kedudukan pemerintahan pusat Republik Indonesia ke Yogyakarta.¹¹

Guna mencegah konflik tidak menjadi berkepanjangan, untuk pertama kali kontak antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Belanda lewat perantara duta dari Inggris Sir Archibald Clark Kerr, dicapai suatu kesepakatan semacam rencana perundingan. Rencana itu pada bulan April 1946 dibawa ke Nederland oleh Dr. Hubertus Van Mook dan delegasi Indonesia.

Perutusan Indonesia terdiri atas Dr. Sudarmono, Mr. Suwandi, dan Mr. Abdul Karim Pringgodigdo.¹² Usaha langkah pertama ini memenuhi kegagalan. Kemudian perundingan antara Republik Indonesia dengan Belanda dirintis kembali dan dimulai kembali di Jakarta dengan memakai seorang duta dari Inggris, Lord Killern, sebagai perantara. Hasil perundingan yang dipimpin oleh Sutan Sjahrir melahirkan naskah Perjanjian Linggarjati (15 November 1946)¹³ yang dikuatkan dengan tanda tangan Sutan Sjahrir, A.K. Gani, Susanto Tirtoprodjo dan Muhammad Roem di pihak Republik Indonesia dan Schermerhorn, Max van Poll, de Boer dan anggota *Commissie Generaal* yang dikirim dari Negeri Belanda.¹⁴

Perjanjian Linggarjati tidak membawa perbaikan hubungan antara Indonesia dengan Belanda. Sesudah naskah ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada 25 Maret 1947, Belanda justru melakukan agresi militer I pada 21 Juli 1947. Akibat dari ofensif Belanda yang berlangsung hingga 17 Januari 1948, menyebabkan Republik Indonesia kehilangan sebagian daerah kekuasaan yang *de facto* diakui dalam Perjanjian Linggarjati.¹⁵

Bagi Belanda, daerah-daerah yang direbutnya itu sangat menguntungkan baik dari segi politik maupun ekonomi. Tempat-tempat itu meliputi daerah sekitar Palembang, sekitar Padang, Jawa Barat, Semarang, Surabaya, dan Jawa Timur bagian timur.¹⁶ Dengan aksi militer ini dasar semangat kerjasama yaitu kepercayaan terhadap kejujuran Belanda menjadi hilang. Gelombang kebencian dan kecurigaan meliputi seluruh negeri.¹⁷

Tindakan Belanda yang nekad itu mengundang campur tangan dunia internasional, dalam hal ini adalah Dewan Keamanan PBB. Dalam resolusinya tertanggal 1, 4 dan 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan memerintahkan kepada kedua belah pihak agar menghentikan tembak-menembak dengan segera dan bekerja bersama untuk memelihara perdamaian dan ketertiban di Indonesia.¹⁸ Atas tekanan-tekanan Amerika, Republik Indonesia terpaksa memutuskan untuk menerima prinsip-prinsip Renville dan persetujuan gencatan senjata pada 17 Januari 1948.¹⁹ Ini berarti bahwa daerah Republik Indonesia menjadi lebih sempit, karena Jawa tinggal separuh dan Sumatera tinggal seperlima.²⁰

Pemerintahan Belanda, baik yang di Den Haag maupun yang di Jakarta secara sepihak memutuskan perundingan dengan Republik dan selekasnya akan membentuk suatu pemerintahan intern tidak dengan Indonesia.²¹ Hal ini mengakibatkan suasana menjadi genting. Keadaan demikian diakui pula oleh para politisi Republik Indonesia, bahkan secara terus terang dijelaskan oleh panglima tertinggi dan panglima tentara dalam order hariannya pada 16 Desember 1948 malam hari.²² Walaupun suasana genting sudah disadari, politik dan ekonomi untuk menghadapi bila terjadi pe-

perangan.²³ Sementara itu Komisi Tiga Negara (KTN) lewat juru bicaranya Lindsay, mengatakan bahwa KTN masih berhasrat penuh untuk menyelesaikan kewajiban dalam pertikaian Indonesia — Belanda. Di samping itu dasar-dasar Persetujuan Renville bersama gencatan senjata masih berlaku, sebab dari pihak Belanda maupun Indonesia tidak ada pernyataan tentang pembatalan persetujuan.²⁴

Merasa dirinya telah berhasil menguasai sebagian besar wilayah Indonesia, yaitu seluruh Indonesia Timur dan Kalimantan serta bagian-bagian yang secara ekonomis paling maju di Sumatera dan Jawa dan di daerah-daerah yang telah dikuasanya itu Belanda telah mensponsori dirinya negara-negara bagian yang menurut harapannya akan mendukung dalam memberikan pukulan terakhir yang menentukan kepada Republik Indonesia, tetapi yang terjadi adalah kebalikan dari apa yang hendak dicapai Belanda dengan agresinya yang dimulai pada 19 Desember 1948. Walaupun ibukota berhasil diduduki dan presiden, wakil presiden serta sejumlah menteri ditawan, namun ini tidak berarti bahwa keberadaan Negara Republik Indonesia telah lenyap. Sebelum tertangkap para pimpinan negara yang tertawan itu sempat menyelenggarakan sidang. Dalam persidangan itu diambil suatu keputusan bahwa kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia akan dialihkan kepada Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang akan dipimpin oleh Mr. Sjariffudin Prawiranegara dan berkedudukan di Sumatera.²⁵ Keputusan lain adalah wakil presiden/perdana menteri mengeluarkan perintah harian supaya angkatan perang dan rakyat terus berjuang, apa pun yang terjadi dengan para pimpinan negara.²⁶

Sementara para pimpinan negara membiarkan diri ditangkap musuh dengan pertimbangan agar selalu dekat dengan Komisi Tiga Negara (KTN), sehingga diharapkan dapat segera mengakhiri perselisihan dengan cara diplomasi/perundingan,²⁷ Jenderal Sudirman bersama anak buahnya meninggalkan kota guna melakukan perang gerilya, walaupun oleh Presiden Soekarno pada waktu itu tidak diperkenankan, karena ia dalam keadaan sakit parah.²⁸

Bersamaan tertawannya para pimpinan negara dan perginya Jenderal Sudirman dari kota ke daerah pedesaan, keadaan tentara cerai-berai. Mereka bertebaran di berbagai daerah di luar kota sehingga dilakukan konsolidasi terhadap tentara yang ber-serakan itu. Maksud dari langkah itu adalah untuk mengumpulkan pasukan-pasukan yang tersebar dan menempatkan mereka di tempat yang baik untuk mengadakan perlawanan secara ber-gerilya.²⁰ Perjalanan untuk melakukan konsolidasi dimulai dari sebelah selatan kota menuju ke barat, terus ke utara dan ke timur hingga ke selatan.³⁰ Dengan bantuan kurir yang telah dikirim terlebih dahulu, maka tidak begitu sukar mencari pimpinan pasukan yang berada di tiap-tiap penjuru. Pada umumnya pasukan yang telah keluar dari kota semuanya berpangkalan di tepi kota.³¹ Dengan usaha itu maka daerah perlawanan terbagi dalam beberapa sektor: (1) sektor selatan, (2) sektor tenggara, (3) sektor barat, (4) sektor utara dan (5) sektor timur. Tiap-tiap sektor mempunyai batas yang telah ditentukan dan ditunjuk pula pimpinannya dengan diberi tugas : (1) mengumpulkan kesatuan-kesatuan yang terpancar di daerah sektornya dan memegang pimpinan terhadapnya, (2) mengadakan perlawanan atau serangan secara gerilya terhadap pos-pos Belanda dan (3) mempersiapkan diri untuk mengadakan serangan balasan.³²

2.2 Organisasi Gerilya

2.2.1. *Munculnya Suatu Bentuk Pasukan Gerilya*

Pada hari-hari pertama sejak agresi Belanda 19 Desember 1948, sebagian besar pimpinan pemerintah dan rakyat telah meninggalkan kota, mundur ke desa-desa dan hutan-hutan melanjutkan perjuangan dengan cara bergerilya.³³

Untuk dapat melaksanakan perang gerilya yang sungguh bersifat perang rakyat semesta, dalam tahun 1948 disusunlah pemerintahan gerilya yang totaliter, yaitu : pemerintahan militer kelurahan, pemerintahan militer kecamatan, pemerintahan militer kabupaten, dan pemerintahan militer gubernuran sehingga berturut-turut lurah, Komando Onder Distrik Militer (KODIM),

Koamando Distrik Militer (KDM), Sub Teritorial Komando (STC) kecuali selaku komandan pertempuran juga menjadi kepala pemerintahan gerilya secara totaliter dengan bantuan badan-badan sipil seperlunya, dan seluruh rakyat dapat ikut serta dalam pertempuran di segala lapangan.³⁴ Begitu pula berdasarkan intruksi panglima komando Jawa yang ditandatangani oleh Kolonel AH. Nasution pada 25 Januari 1948 No. 11/MB. KD/48, tentang keikutsertaan pemuda desa dalam menjalankan perang gerilya.³⁵

Berdasarkan keadaan di atas Komando Distrik Militer (KDM) Sleman melalui Letnan Satu Zar'an mengeluarkan surat perintah pembentukan pasukan gerilya di daerah Sleman Timur. Surat perintah tersebut diterima oleh Prodjokastowo, penewu Kalasan, dan R. Muhammad Basuki, bekas ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) tahun 1947 Sleman Timur. Tindakan selanjutnya atas dasar surat perintah tersebut, Prodjokastowo dan Muhammad berusaha menemui beberapa tokoh pejuang untuk membentuk sebuah organisasi pasukan gerilya. Tokoh-tokoh yang dapat dijumpai antara lain Suratman bekas komandan seksi Angkatan Perang Sabil (APS) Kalasan, Mulyoredjo ketua bagian Kemakmuran Kelurahan Taman Martani Kecamatan Kalasan, Sugeng dari Tentara Pelajar (TP), Sersan Mayor Kamidjo dari TNI Angkatan Udara, Kopral Tugijo dari TNI Angkatan Darat. Setelah terjadi permusyawaratan di Desa Pakem Kecamatan Kalasan, maka terbentuklah organisasi gerilya Sleman Timur. Sebagai penasihat adalah R. Muhammad Basuki, Muljoredjo sebagai komandan pasukan dan wakil komandan adalah Suratman, sedang anggota pasukan gerilya berjumlah 27 orang.³⁶

Sesudah pembentukan organisasi gerilya Sleman Timur, maka pasukan gerilya Sleman Timur terbagi dalam dua bagian yaitu Pasukan Mobil dan Pasukan Teritorial. Pasukan Mobil bertugas menghadapi medan untuk melaksanakan sabotase terhadap musuh, kemudian menjadi tenaga penggempur terhadap musuh seperti penghadangan konvoi, pengacauan pada pos-pos Belanda yang terpencil, pemutusan jalan, pemutusan jembatan, pemutusan kabel listrik dan telepon, pembakaran pabrik-pabrik

maupun rumah-rumah yang diperkirakan akan dipakai sebagai pos Belanda. Pasukan teritorial bertugas menjaga keamanan daerah setempat, mengawasi gerak-gerik musuh, mengungsikan penduduk dan pejabat serta mengarahkan kebutuhan bahan makanan.

Susunan formasi pasukan gerilya Sleman Timur terbagi menjadi dua, yaitu komandan Pasukan Mobil langsung dirangkap oleh Muljoredjo, wakil komandan dipegang oleh Sersan Mayor Kadijo. Pasukan Mobil terbagi dua regu yaitu regu I sebagai komandan Kopral Tugidjo dan wakil komandan Kopral Sugimin, dengan para anggotanya, Basrawi, Sugijo, Mukiran, Latunan Bancik, Satimin, Sinon, Ahmad, Muhadi, Lobado. Regu II sebagai komandan Brigpol. Abdul Samad, wakil komandan Letnan Dua Djumin, dengan anggotanya: Sakri, Dalimin, Kodrat, Tukiran, Djumin, Tugimin, Wagiman, Ngadimo, Ngadiman dan Tugiran.³⁷

Komandan pasukan teritorial adalah Suratman dan wakil komandan dipegang oleh Sugeng. Pasukan ini hanya terdiri satu regu. Komandan regu dirangkap oleh komandan pasukan yaitu Sugeng, dan wakil komandannya Silam. Anggautanya terdiri atas Djemijo, Djoyudo, Marjadi, Redjopanggih, Kromo Kempot, Wakidjo, Tresno Tiklok, Wagingun, Teguh, dan Sarosa.

Cara-cara pembagian tugas di dalam pasukan adalah sebagai berikut. Apabila regu I pasukan mobil membantu, pasukan teritorial disebar mencari daerah yang aman untuk mengungsikan penduduk, maka regu II berjaga. Sesudah menyerahkan tugas oleh regu II ke regu I, kembali regu I bertugas menempatkan pengungsi-pengungsi ke tempat yang aman, dan begitulah sebaliknya. Gerak rapi ini apabila yang diungsikan orang-orang penting, misalnya bupati atau perwira militer, biasanya yang dapat berbicara hanyalah komandan Pasukan Gerilya Muljoredjo. Dengan demikian anak buah dan umum tidak akan mengetahui siapa sebenarnya yang diungsikan itu. Tidak jarang sebagai pasukan gerilya harus berjaga sampai berhari-hari untuk mengungsikan seorang pejabat, misalnya delapan hari harus menjaga Bupati Sleman KRT. Prodjodiningrat di Desa Babadan Nosari Kecamatan

Ngemplak, empat hari menjaga Penewu Kalasan Prodjokastowo di Desa Tegalsari Kecamatan Kalasan, dan seminggu menjaga Kolonel AH. Nasution di Desa Tas Kombang.³⁸

Dalam organisasi Pasukan Gerilya Sleman Timur pernah mengalami beberapa kali melakukan perubahan formasi pasukan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain, (a) karena jumlah alat-alat persenjataan yang sangat terbatas, (b) jumlah anggota pasukan mobil hanya dua regu, yang setiap regu beranggotakan 11 orang, (c) adanya beberapa anggota pasukan yang gugur akibat serangan Belanda, (d) adanya kerjasama dengan pasukan TNI, misalnya kerjasama dengan kompi Qommarudin, dengan kompi Letda Protelo dan kompi Letda Abdulrahman anak buah dari batalyon Mayor Sujono yang bermarkas di Tanjung Tirto Kecamatan Berbah. Pernah pula kerjasama dengan siswa-siswa dari Militer Akademi (MA) yang bermarkas di Desa Kringinan Kecamatan Kalasan, (e) adanya penambahan dari anak Pager Desa yang terpilih.

2.2.2 Pola Kepemimpinan dalam Organisasi Gerilya

Suatu aspek perang yang amat penting ialah perang psikologis atau perang urat syarat. Pada umumnya orang mudah menjadi sasaran dari perang tersebut. Dengan cara provokasi, maka orang mudah keliru pengertian dan mudah diadudomba antara satu pimpinan dengan pimpinan yang lain, antara golongan yang satu dengan golongan yang lain, antara anggota pasukan sesama anggota pasukan yang lain.³⁰ Untuk mengatasi hal tersebut, R. Muhammad Basuki selain sebagai penasihat gerilya militer juga sebagai penasihat agama atau kerokhanian. Ia sangat berhati-hati dalam menerapkan konsep religiusnya. Ia menyadari bahwa di dalam tubuh organisasi pasukan gerilya Sleman Timur, terdiri atas beberapa golongan, misalnya Muljoredjo dari Laskar Banteng Partai Nasional Indonesia (PNI), Suratman dan Sugeng dari Hisbullah, serta 12 orang anggota lainnya Tentara Nasional Indonesia yang terpisah dari pasukannya⁴⁰); karena itu penerapan konsep religius selalu diselaraskan dengan latar belakang golongan itu.

Rasa persatuan di antara anggota-anggota pasukan gerilya terwujud dalam bentuk solidaritas yang efektif dan hal ini terbukti sampai perang selesai tak pernah terjadi pertentangan di antara mereka. Loyalitas para anggota terhadap pimpinan ditujukan dengan sikap mereka yang patuh di dalam menjalankan perintah. Rasa hormat dan patuh dari para anggota pasukan terutama kepada R. Muhammad Basuki disebabkan pula oleh sikap dan kepandaianya di dalam mengambil hati rakyat, perhitungan-perhitungannya yang tepat dalam penggunaan taktik gerilya, sampai timbul suatu anggapan bahwa ia mempunyai ilmu gaib atau ilmu kebatinan. Anggapan demikian itulah yang menjadi sumber dari otoritasnya yang kharismatis, otoritas mana dapat membangkitkan kebaktian serta antusiasme yang berkobar-kobar pada para pengikutnya.⁴¹

Sebenarnya pernah pula terjadi ketika Komandan Pasukan Gerilya Muljoredjo dan beberapa anggota pasukan ingin mengundurkan diri dari tugas mereka, misalnya Sugeng, Ngadiman, Tukiran yang disebabkan tugas mereka yang sangat berat dan rasa pesimis apabila melihat kekuatan patroli Belanda, tetapi karena kecakapan dan kebijaksanaan R. Muhammad Basuki, mereka bersemangat kembali.⁴²

Di samping pimpinan dan penasihat gerilya memberi penerangan-penerangan dan hubungan mental dengan dasar agama, usaha-usaha yang dilakukan adalah mengadakan kontak secara kontinyu dengan pimpinan-pimpinan Tentara Nasional Indonesia, misalnya dengan Komandan Batalyon Mayor Sujono di Tanjung Tirta, dengan Komandan Militer Akademi (MA) Kolonel Djatikusuma di Kringinan Kecamatan Kalasan, sehingga terjadi suatu kejasama yang baik dan teratur.⁴³ Hal ini diharapkan supaya tidak terjadi kecurigaan di antara mereka. Selain itu untuk memudahkan hubungan antara daerah kecamatan satu dengan daerah kecamatan yang lain di dalam pos gerilya. Sebagai alat penghubung ialah pemuda-pemuda dari "pagar desa" setempat. Dalam hal ini pimpinan gerilya menunjuk beberapa pagar desa, di antaranya Suwardi dari Desa Balong Bayen Kecamatan Kalasan, Sjamsuri dan Dirsana dari Pakem Kalasan, dan Bedjo dari Djongkangan.

Pos-pos gerilya tersebut berada di Desa Balong Bayen, Jambon Kecamatan Cangkringan, Manisrenggo Kecamatan Prambanan.⁴⁴

2.2.3 *Senjata dan Daerah Gerilya*

Pada tahap-tahap pertama organisasi pasukan gerilya Sleman Timur hanya mempunyai alat-alat persenjataan yang sedikit jumlahnya, di antaranya; tiga buah pistol jenis colt, empat buah karaben engkel (yang berbunyi teg dug), dua buah karaben panjang buatan Belanda serta beberapa buah granat tangan. Di samping itu ada beberapa keris, pedang dan tombak serta bambu runcing (bambu yang dipertajam kemudian diberi warna atau racun) yang sering digunakan oleh pasukan teritorial maupun pemuda-pemuda pager desa untuk berjaga pada malam hari.⁴⁵

Setelah gerakan dari pasukan gerilya teratur, Komando Distrik Militer (KDM) Sleman melalui Letnan Satu Zar'an memberi bantuan senjata berupa dua buah karaben panjang dengan dua buah peti pelurunya, beberapa buah granat tangan dan trek bom atau mijn yang digunakan untuk menghancurkan jembatan atau penghadangan konvoi Belanda.⁴⁶

Daerah pemusatan kekuatan Pasukan Gerilya Sleman Timur selalu berpindah-pindah, hal ini untuk menjaga kemungkinan adanya serangan-serangan Belanda secara mendadak. Daerah atau desa-desa yang sering digunakan sebagai tempat pemusatan kekuatan gerilya adalah Desa Balong Bayen Kecamatan Kalasan, Babadan Nosari Kecamatan Ngemplak, Jaranan Kecamatan Cangkringan, Manisrenggo Kecamatan Prambanan, dan Pakem Kecamatan Kalasan. Desa-desa tersebut sangat strategis karena letaknya di tepi jalan sungai yang bertebing curam dan ditumbuhi pohon-pohon yang rindang sehingga sangat menguntungkan untuk ber-lindung apabila ada serangan musuh, terutama intaian musuh dari udara. Di daerah Kabupaten Sleman bagian timur ada empat sungai yang digunakan sebagai pengairan sawah-sawah sehingga di daerah tersebut merupakan lahan pertanian yang subur. Sungai-sungai itu ialah Sungai Kuning, Sungai Terepus, Sungai Wareng, dan Sungai Opak.

Daerah medan atau daerah yang sering dijadikan sasaran serangan para gerilya ialah : (1) Patuk Kecamatan Kalasan. Daerah ini terdapat sebuah jembatan yang menghubungkan Kota Solo dan Kota Yogyakarta. Di samping itu daerah tersebut terdapat pos Belanda yang terletak di pasturan depan gereja Kalasan); (2) Daerah Bogem Kecamatan Prambanan, di tempat tersebut Belanda mendirikan tiga buah pos yaitu di rumah Nato Pandoyo, di rumah Prapto Suwarno dan di rumah Sutardi. Di samping pos-pos Belanda, di daerah tersebut terdapat tiga buah jembatan besar; (3) Di Pakem Kecamatan Ngemplak, Keadaan alamnya sangat menguntungkan untuk penghadapan musuh.

2.3 Gerak Gerilya dalam Membantu Pemerintah RI

2.3.1 Gerakan Pasukan Mobil

Pasukan mobil adalah bagian dari pasukan gerilya Sleman Timur yang terdiri atas dua regu. Komandan regu I adalah Kopral Tugijo dan wakil komandannya adalah Kopral Sugimin. Anggota-anggotanya terdiri atas Pasrowi, Sugijo, Mukiran, Lasiman Bancik, Satiman, Senen, Ahmad, Muhadi, Labodo. Regu II di bawah Komandan Brigpol Abdul Samad dan wakilnya Letda Djumingin, sedangkan anggotanya adalah Sakri, Dalimin, Kodrat, Tukiran, Jumingan, Tugiman, Wagiman, Ngadimo, Ngadiman dan Tugiran. Pasukan ini bertugas menghadapi medan untuk melaksanakan sabotase terhadap musuh, kemudian menjadi tenaga penggempur terhadap sasaran musuh seperti penghadangan terhadap patroli konvoi Belanda, pengacauan pada pos-pos Belanda yang terpencil, pemutusan jalan, pemutusan jembatan, pemutusan kabel listrik dan kabel telepon, pembakaran pabrik-pabrik maupun rumah-rumah yang diperkirakan akan dipakai sebagai pos-pos Belanda. Sesuai dengan tugas maupun fungsinya sebagai pasukan mobil maka pasukan ini selalu bergerak dari daerah yang satu ke daerah yang lain meliputi daerah Kabupaten Sleman bagian timur. Misalnya, pada suatu malam pasukan mobil mengadakan pengacauan pada pos Belanda yang berada di Kecamatan Kalasan, kemudian

malam berikutnya mengadakan pengacauan pada pos Belanda yang berada di Kecamatan Prambanan atau mengadakan pencegahan konvoi patroli Belanda yang berkekuatan kecil di jalan-jalan yang dilaluinya. Karena alat persenjataan yang sangat terbatas itu, misalnya pistol dan bedil yang hanya berjumlah 11 buah, maka di dalam menjalankan tugas dilaksanakan secara bergantian. Apabila pada suatu malam regu I mengadakan gerakan pengacauan di suatu pos Belanda, maka regu II memberikan latihan-latihan kemiliteran pada pemuda-pemuda desa. Demikian pula apabila pada malam berikutnya regu II bertugas, maka regu I istirahat di markas.

Pada tahap-tahap pertama usaha-usaha yang dilakukan pasukan mobil berupa : (a) sabotase pembakaran rumah kepanewonan Kalasan, pembakaran gedung Sekolah Rakyat No. 2 (Ongko Loro) yang berada di Desa Tamanan Kecamatan Kalasan, pembakaran gedung Sekolah Rakyat Putri (SPP) di Desa Bogem Kecamatan Prambanan dan pembakaran Rumah Sakit Tamanan Kecamatan Kalasan. Sabotase pembakaran rumah-rumah ini dilakukan oleh regu I di bawah Koprал Tugijo dan wakilnya Koprал Sugimin. Tindakan ini dilakukan dengan maksud agar rumah-rumah tersebut tidak dipakai sebagai pos-pos belanda; (b) sabotase penghancuran jembatan, seperti jembatan Kali Opak, jembatan kereta api di Randugunting, jembatan Tulung dan jembatan Patuk. Penghancuran ini dilakukan berulang-ulang karena jembatan terlalu kuat dan setiap mengalami kerusakan, Belanda selalu memperbaikinya, terutama jembatan Opak, jembatan kereta api Randugunting dan jembatan Patuk, karena ketiga jembatan tersebut merupakan penghubung utama jalan antara Kota Solo dan Yogyakarta. Alat yang dipakai untuk memutuskan jembatan-jembatan tersebut adalah trek bom (suatu alat senjata untuk menghancurkan sesuatu sasaran dengan cara meledakkannya dari kejauhan dengan tali penarik atau dengan sumbu kontak atau mjin; (c) sabotase pemutusan kawat listrik maupun kawat telepon yang berada di Kecamatan Prambanan dan Kalasan yang dilakukan oleh regu I, tetapi sering pula oleh regu II.⁴⁷ Di samping itu ada beberapa anggota pasukan mobil yang sering diperbantukan ke pasukan teritorial untuk melatih anggota-anggotanya pada waktu tertentu,

terutama pada Kamis malam, karena kemungkinan pada suatu saat pasukan mobil memerlukan bantuannya. Perlu diketahui bahwa semua anggota pasukan mobil adalah orang-orang yang pernah mengalami latihan-latihan kemiliteran ataupun pertempuran-pertempuran, misalnya Suratman dari Laskar Hisbullah, Muljoredjo dari Laskar Banteng, dan anggota-anggota lainnya sebanyak 12 orang adalah anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terpisah dari pasukannya. Pasukan mobil juga sering diperbantukan di pasukan teritorial untuk kepentingan membantu mencari tempat-tempat yang aman bagi pengungsian penduduk dan memberikan perlindungan kepada mereka.

Sementara itu, setelah berhasil menduduki pos-pos di Desa Patuk Kecamatan Kalasan, di Desa Bogem Kecamatan Prambanan dan di desa-desa Pakem Kecamatan Ngemplak, Belanda berusaha memperbaiki kembali jembatan-jembatan yang rusak akibat sabotase para gerilya, antara lain jembatan kereta api Randugunting yang rusak akibat trek bom yang dipasang gerilya, juga jembatan Opak pernah miring sehingga lalu lintas terhenti untuk beberapa hari. Di samping itu Belanda mengadakan patroli di sekitar daerah Kecamatan Prambanan, Kalasan dan Ngemplak dengan tujuan memamerkan kekuatan untuk menakut-nakuti penduduk. Mereka juga membagi-bagikan roti, beras serta obat-obatan untuk mengambil hati penduduk setempat. Belanda juga berusaha menemui pamong-pamong desa, tetapi usaha mereka sia-sia karena para pamong telah mengungsi dan sebagian besar membantu pasukan gerilya.

Di Desa Pakem Kecamatan Kalasan, Belanda pernah mengumpulkan penduduk dan anak-anak serta laki-laki yang sudah lanjut usia. Mereka dibujuk supaya tunduk kepada Belanda. Karena tidak berhasil menemui seorang pamong, maka Belanda menunjuk dua orang yaitu Martopranowo dan Wirjotijoso sebagai lurah dan carik dengan harapan mereka dapat memberikan bantuan Belanda dalam usaha mencari anggota gerilya. Karena saudara Martopranowo yaitu Sugeng dan adik Wirjotijoso yaitu Muh. Dirsam adalah anggota pasukan gerilya, maka justru mereka membantu para gerilya. Apabila akan ada patroli Belanda ke

daerah itu, mereka memberikan laporan kepada pasukan gerilya supaya menyingkir atau menyerap jika patroli Belanda jumlahnya kecil. Hal ini tidak berlangsung lama karena Martopranowo dan Wirjotijoso akhirnya juga khawatir kalau peranan mereka sebagai mata-mata gerilya diketahui oleh Belanda.⁴⁸

Setelah pimpinan pasukan Gerilya yaitu R. Muhammad Basuki Muljoredjo dan Suratman mengadakan kontak dengan para pimpinan militer seperti Kolonel Djatikusuma pimpinan Militer Akademi yang bermarkas di Desa Kringinan Kecamatan Kalasan, dengan Mayor Sujono yang bermarkas di Tanjung Tirto dan Letnan Qomaruddin yang berada di Macanan Kecamatan Ngemplak, maka gerakan-gerakan seperti penghadangan patroli Belanda, penyerangan pos-pos Belanda dilakukan kerjasama dengan anak buah mereka. Hal ini sangat berpengaruh baik dalam segi materiil maupun moral, sebab di samping kekuatan persenjataan bertambah jumlahnya, semangat tempurnya bertambah pula. Setelah Muljoredjo dan Suratman mendapat bantuan dua karaben panjang, pasukannya berani mencegat patroli Belanda yang berkekuatan dua regu, meskipun setelah terjadi tembak-menembak mereka harus lari dan bersembunyi. Peristiwa ini terjadi di jalan sebelah barat Desa Jongkangan Kecamatan Kalasan menjelang magrib, yaitu ketika Belanda pulang dari patroli keliling desa di seluruh Kecamatan Kalasan.⁴⁹ Pagi harinya pihak Belanda mengadakan serangan pembersihan di Desa Jongkangan dan Pakem. Dalam pembersihan ini Bedjo, seorang pagar desa, dan Bakri, tertembak mati karena tidak sempat bersembunyi.

Selama *clash* II tahun 1948 – 1949, gerakan pasukan mobil berhasil mengadakan patroli dan penyerangan terhadap pos-pos Belanda sebanyak dua kali, mengakibatkan jatuhnya korban beberapa orang pihak Belanda. Gerakan pasukan mobil ini dibantu oleh beberapa anggota pasukan TNI yaitu dari kompi Qomaruddin dan kompi Letda Pratelo, anak buah Mayor Sujono yang bermarkas di Tanjung Tirto Kecamatan Berbah. Gerakan penghadangan ini dipersiapkan sehabis sembahyang subuh. Tempat penghadangan di Desa Bendan. Penghadangan teradap patroli Belanda dilaku-

kan dengan cara sebagai berikut. Seorang dengan membawa pistol ditugaskan mengadakan pengintaian dan memberi komando menembak. Waktu itu tugas pengintaian dilakukan oleh Muh. Sudjak, lurah Desa Purwomartani Kalasan, dan tempat pengintaianya di Candi Sari. Dia ditugaskan menembak lebih dahulu bila ada patroli Belanda yang lewat di jalan raya Solo – Yogyakarta yang terletak di sebelah selatan Desa Bendan. Sebanyak lima sampai tujuh orang lainnya berada di sebelah ujung utara Desa Kalibening dan sebagian lagi di Desa Bugisan, serta sebagian lain berada di sebelah timur Desa Bendan. Perlindungan mereka selain pohon-pohon besar juga lubang-lubang atau parit-parit yang telah digali sebelumnya. Dari tempat-tempat itulah mereka akan menyerang musuh.

Setelah terdengar aba-aba atau tembakan dari orang yang ditugaskan mengintai di Candi Sari, pasukan yang berada di Desa Bugisan mulai menembak, kemudian disusul pula tembakan-tembakan dari pasukan yang berada di sebelah timur Desa Bendan dan juga pasukan yang berada di Desa Kalibening. Untuk membuat bingung pihak Belanda, penembakan dilakukan bersama-sama yaitu dengan aba-aba sehingga tampaknya jumlah gerilya sangat besar dan senjata-senjata yang dipergunakan pasukan gerilya seakan-akan adalah senjata otomatis. Hal ini terjadi ketika iring-iringan patroli Belanda yang pada waktu itu menggunakan sebuah panzer wagon dan tiga buah truk yang penuh berisi serdadu Belanda. Ketika iring-iringan patroli tersebut sampai di jembatan Bendan, seperti biasaya mereka berhenti karena khawatir kalau para gerilya telah memasang trek bom pada jembatan tersebut. Kesempatan ini dipergunakan baik oleh pasukan gerilya. Setelah panzer wagon lewat disusul pula oleh truk yang pertama, truk yang kedua dan ketiga menjadi sasaran tembakan pasukan gerilya. Serangan yang mendadak ini mengakibatkan banyak korban bagi pihak Belanda. Melihat serangan itu truk yang pertama hendak membantu, tetapi karena truk-truk yang di belakang mendapat serangan gencar dari beberapa jurusan, sopir truk menjadi bingung dan akhirnya menubruk truk di depannya. Baru setelah panzer

wagon kembali dan mengadakan tembakan gencar ke arah gerilya, pasukan gerilya mengundurkan diri.⁵⁰

Dua hari setelah kejadian tersebut pihak Belanda mengadakan patroli lebih kuat dengan dikawal pengawasan dari udara, bahkan sering kapal-kapal terbang tersebut menjatuhkan bom-bom, sedangkan patroli yang berjalan kaki dan menggunakan truk-truk mulai masuk desa-desa dan menangkap penduduk. Apabila kedatangan orang yang dicurigai langsung ditembak mati di tempat. Sementara itu Kopral Tugijo komandan regu I, anak seorang modin Taman Martani Kalasan, sedang mengumpulkan anggotanya di sebuah surau di Desa Pakem Kecamatan Kalasan akan menyerahkan senjata kepada regu II yang akan menggantikan tugasnya, mendapat laporan dari seorang pagar desa bahwa ada patroli Belanda yang datang. Dengan cepat Kopral Tugijo memerintahkan anggotanya untuk segera menyingkir, sedang dia sendiri berusaha menghilangkan jejak teman-temannya. Ia lari ke Desa Jongkang, tetapi tertembak gugur di tempat itu. Juga seorang petani yang sedang memanggul cangkul bernama Kromosentono, ditembak di sawahnya karena dikira anggota gerilya. Begitu pula Manguntaruna seorang duda tua ditembak mati di bawah "lincak" (tempat tidur dari bambu) karena disuruh keluar tidak mau. Suhardjo, lurah Desa Jaranan, dan carik Kartono serta pembantuannya, Sukarman, ditangkap kemudian dibunuh Belanda di halaman kelurahan. Penduduk disuruh melihat pelaksanaan hukuman mereka, dengan maksud agar mereka takut dan tidak berani membantu gerilya.⁵¹

Gerakan kedua, pasukan mobil dibantu oleh siswa-siswa Militer Akademi (MA) anak buah Kolonel Djatikusuma yang bemarkas di Kringinan Kecamatan Kalasan dan anak buah Letda Abdulrahman. Gerakan ini dimulai malam hari dari rumah ketua pasukan gerilya di Desa Pakem Kecamatan Kalasan. Mereka merencanakan penyerangan terhadap pos-pos Belanda yang berada di Bogem Kecamatan Prambanan dengan menggunakan taktik serangan "pajapat" yaitu menyerang dari empat jurusan.

Kekuatan pasukan dipusatkan pada dua tempat yaitu di Desa Randugunting dan di Desa Niten, sedangkan sebagian pasukan membuat pancingan-pancingan tembakan dari utara Candi Prambanan agar Belanda mengira bahwa serangan pasukan gerilya datang dari Desa Klurak. Sebagian lainnya berada di tepi Sungai Opak. Serangan ini berlangsung sampai menjelang sembahyang subuh, sedangkan hasilnya berupa penguasaan tempat yang digunakan sebagai pos Belanda dan menewaskan empat serdadu Belanda. Pihak gerilya seorang dari siswa Militer Akademi (MA) luka tembak tangannya, tetapi tidak sampai meninggal.⁵²

2.3.2 Gerakan Pasukan Teritorial

Pada awalnya pasukan teritorial bertugas mengumpulkan bahan makanan baik yang berupa bahan mentah seperti beras, ketela pohon, kelapa, sukun dan lain-lain maupun bahan pangan yang sudah masak seperti nasi, ketela rebus, jagung rebus dan lain-lain. Dalam usaha mengumpulkan bahan maupun pangan yang telah masak itu mereka mendatangi rumah-rumah penduduk, menghadang "bakul" atau pedagang kecil di pasar Tulung, pasar Prambanan, pasar Salakan dan pasar Cangkringan. Di samping itu sering kali pula mereka memungut pajak-pajak di pasar-pasar dan mengambil barang milik penduduk yang ditinggal mengungsi.

Latihan-latihan kemiliteran seperti menembak, taktik memancing musuh ke dalam perangkap, cara menghindari serangan-serangan berat, dan cara menjadi mata-mata selalu dipelajari dari anggota-anggota pasukan mobil. Tugas pasukan teritorial selain sebagai pengumpul makanan, mencari tempat atau daerah yang aman, juga menjadi pelindung para pengungsi. Sering pula diperbantukan pada pasukan medan, seperti mengawasi keadaan atau posisi musuh dengan cara menyamar sebagai penghubung pos-pos gerilya dan mengikuti pertempuran-pertempuran di malam hari.

Di dalam pasukan teritorial terdapat beberapa pemuda yang kemudian dimasukkan dalam anggota pasukan mobil. Mereka memiliki keberanian, pandai menyamar, dan tubuhnya pendek

sehingga tidak dicurigai sebagai anggota pasukan gerilya. Mereka itu antara lain Suwardi, Dirsam, Sjamsuri, Ahmad dan Mahadi. Pernah suatu ketika Ahmad dan Muhadi tertangkap Belanda ketika sedang mengawasi pos-pos Belanda di Kalasan, mereka dibawa ke Maguwo dan diperiksa. Dua hari kemudian mereka dikeluarkan dari tahanan dan disuruh pulang dengan syarat mau membantu pihak Belanda serta setiap hari Minggu mereka diwajibkan lapor diri di pos Kalasan, tetapi kedua orang tersebut tidak menjalankan perintah.⁵³

2.3.3 *Korban Serangan Belanda*

Untuk membicarakan jumlah manusia, binatang piaraan dan barang-barang yang rusak maupun hilang akibat serangan Belanda sangatlah sulit diperkirakan dengan tepat. Tercatat hanya dalam ingatan para anggota pasukan gerilya tentang gugurnya beberapa orang yang bertalian dengan mereka akibat serangan Belanda. Mereka antara lain Kopral Tugijo yang gugur akibat tertembak Belanda dalam usahanya menyelamatkan anak buahnya di Pakem. Ia adalah komandan regu I pasukan medan, seorang anggota TNI Angkatan Darat anak buah Mayor Daryatno, disebabkan terpisah dengan induk pasukannya, kemudian bergabung dengan pasukan gerilya Muljoredjo.⁵⁴ Korban lain adalah Sakri yang gugur di Desa Jongkangan. Ia juga bekas anak buah Mayor Daryatno yang bergabung ke dalam pasukan medan regu II.⁵⁵ Juga Bedjo, seorang anak pagar Desa Punding Kecamatan Kalasan yang gugur tertembak Belanda sewaktu akan mengantar nasi untuk para gerilya.⁵⁶ Selain itu lurah Desa Jaranan Kecamatan Cangkringan yang bernama Suhardjo dan cariknya Sukarman serta pembantunya Karsono ditembak mati bersama-sama oleh Belanda di halaman kelurahan Jaranan, karena dituduh membantu dan melindungi para gerilya.⁵⁷ Korban-korban lain yang masih dapat diingat ialah Kartopawiro pembantu dukuh Desa Kringinan Kecamatan Kalasan yang ditembak mati oleh Belanda karena tidak mau menunjukkan letak markas Militer Akademi (MA). Wirjosentono dan Martodiredjo yang sering memberi bantuan

makanan kepada pasukan gerilya, juga ditembak mati di Desa Pakem Kecamatan Kalasan oleh Belanda. mBok Soirono, seorang perempuan tua, oleh Belanda ditusuk mati dengan bayonet di Desa Pakem Kalasan. Karto Djeber, seorang pager Desa Pakem Kalasan dibunuh dengan kejam oleh Belanda karena dituduh menyembunyikan gerilya, dan masih banyak lagi korban-korban keganasan Belanda yang tidak tercatat.

2.3.4 *Akhir Perang Gerilya*

Sementara itu instruksi penghentian tembak-menembak ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada 3 Agustus 1949, tetapi seingat para anggota Pasukan Gerilya Sleman antara lain Sugeng, Muh Dirsan dan Sjamsuri, instruksi tersebut diumumkan kira-kira seminggu sebelum hari Proklamasi 17 Agustus 1945. Hal itu mungkin memang dikehendaki oleh pimpinan-pimpinan setempat. Instruksi penghentian tembak-menembak baru diumumkan kurang-lebih setelah seminggu dari pengumuman yang resmi, sehingga mereka tetap waspada menghadapi setiap kemungkinan, sebab berdasarkan pengalaman, telah beberapa kali pihak Belanda selalu menggunakan siasat yang licik. Sebagai contoh, mengenai perintah perang Jenderal Spoor, panglima tentara Belanda, dan lebih mencolok lagi pelanggaran oleh Belanda atas Perjanjian Renville sehingga oleh KDM Sleman, pasukan gerilya Sleman Timur diperintahkan tetap dalam siaga menjaga keamanan daerahnya masing-masing.

Pada Kamis malam, sebagian besar pasukan gerilya Muljoredjo berkumpul di rumah mertua R. Muhammad Basuki, yang digunakan pula sebagai pos gerilya, untuk mengadakan selamat-an menyongsong hari Proklamasi 17 Agustus 1949. Di samping itu mereka juga saling membicarakan tujuan dan cita-cita masing-masing setelah perang selesai dan negara sudah aman.

Dalam bulan Oktober 1949, anggota-anggota pasukan gerilya Muljoredjo yang masih aktif sebagai anggota TNI diberi kesempatan untuk melaporkan diri ke KDM Sleman, bahwa selama *clash* II mereka tetap aktif bergerilya di bawah Muljo-

redjo. Hal ini untuk memberi pengokohan kepada mereka bila akan kembali ke kesatuannya masing-masing. Mereka itu antara lain : (a) dari TNI Angkatan Darat ialah Kadijo, Djuminin, Basrowi, Sarosa, Lahada, Darmin; (b) dari TNI Angkatan Udara yaitu Supardi, Dalimin, Tukiran dan Sugimin; dan (c) dari Kepolisian yaitu Abdul Samad, Muhadi.

Pada Desember 1949, pasukan gerilya Muljoredjo menerima panggilan penggabungan kelaskaran bekas gerilya. Maka komandan pasukan Muljoredjo menyerahkan pimpinan kepada Suratman dan ia sendiri kembali menduduki jabatannya semula yaitu sebagai kepala jawatan kemakmuran Kelurahan Taman Martani.

Dalam lingkungan kesatuannya yang baru, bekas pasukan gerilya Muljoredjo berada dalam Batalyon STMD, dan kemudian dipindah ke Batalyon MDJ di bawah komandannya Mayor Basuni.

Sementara itu ada juga pilihan lain dari tugas ketentaraan. Suratman dan Sugeng ternyata kemudian mengundurkan diri dan melanjutkan sekolah, sedangkan yang langsung masuk mengikuti Batalyon III MDJ hanya tinggal dua orang yaitu Teguh dan Djuminan. Ada empat orang yang lain, tetapi mereka harus melalui penampungan di Corps Tjadangan Nasional (CTN) dan baru pada tahun 1959 mereka resmi menjadi militer dalam kesatuan. Mereka itu adalah Senen, Tugiran, Sukardi dan Sugijo. Sebenarnya banyak dari anggota yang ingin tetap dalam dinas ketentaraan, antara lain Tugiman Bodong, Sukiman, Marjadi, Djoyudo, Tresno Teklok, Djunijo dan Wajidjo, tetapi karena terkena rasionalisasi mereka terpaksa meninggalkan kesatuannya.

Di samping itu ada juga penghargaan dari pemerintah atas jasa-jasa para bekas anggota pasukan Gerilya Muljoredjo, misalnya Letda Soewohadi mendapat anugerah "Bintang Gerilya"; istri Kopral Tugijo mendapat tunjangan uang, juga Suratman dan Sugeng mendapat bia siswa untuk meneruskan sekolah. Perhatian pemerintah juga tidak melupakan bantuan penduduk

pada revolusi fisik dulu, misalnya pemberian bantuan kepada masyarakat Cangkringan untuk mendirikan sebuah mesjid di Desa Jambon Kecamatan Cangkringan.

2.4 Perang Gerilya di Pedesaan

2.4.1 Kabupaten Sleman

Sehari setelah menduduki ibukota Yogyakarta pada 19 Desember 1948, tentara Belanda menduduki Beran, Sleman, dan Medari.⁵⁸ Sebelum terjadi penyerangan, para ahli strategi militer Republik telah menduga, bahwa jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya Yogya Utara merupakan daerah paling berbahaya apabila Belanda melakukan penyerangan atas Kota Yogyakarta, sebab tentara Belanda yang berada di Semarang dan Salatiga pasti akan melalui jalan Yogyakarta – Magelang, Boyolali – Gondangwinangun – Yogyakarta. Hal ini terbukti ketika tentara Belanda masuk Yogyakarta melalui udara dengan parasutnya, tentara Republik dan para patriot Republik yang berada di ibukota tidak menuju ke utara, melainkan ke selatan dan barat.⁵⁹

Dalam peperangan, pihak yang merasa dirinya mempunyai syarat-syarat materiil yang kuat mencoba memaksakan kehendaknya dengan menghancurkan kekuatan lawan.⁶⁰ Cara itulah yang ditempuh Belanda, dengan harapan dapat segera mengakhiri peperangannya melawan Indonesia. Berbeda dengan Republik Indonesia dalam menghadapi Belanda, pada tingkat menghindarkan kehancuran dari kekuatannya dan sesudah itu bersama-sama kekuatan rakyat menjalankan perlawanan yang ditujukan untuk menghabiskan musuh dan mematahkan kemauannya dalam perjuangan.⁶¹

Seerti telah disinggung di atas bahwa beberapa waktu setelah Belanda melakukan agresi II atas Kota Yogyakarta, dilakukan konsolidasi dari tentara yang cerai-berai dan telah membagi daerah Yogyakarta menjadi beberapa sektor untuk mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Sektor utara masih terbagi dalam beberapa sektor, yakni sektor barat, sektor

tengah dan sektor timur. Di tiap-tiap sektor beroperasi pasukan yang berlainan. Misalnya di sektor utara bagian barat atau wilayah Sleman Barat beroperasi kesatuan Brigade XVI dan Brigade Mobil Polisi, sektor utara bagian tengah atau wilayah Sleman Tengah beroperasi kesatuan Tentara Pelajar (TP), dan di sektor utara bagian timur atau wilayah Sleman Timur, beroperasi kompi dari Batalyon IV Infantri Mobil.⁶²

Guna menunjang keberhasilan perjuangan, pihak Indonesia merasa perlu menyempurnakan dan memperkuat organisasi teritorial ke bawah. Pada tingkat kabupaten dibentuk Komando Daerah Militer (KDM), di tingkat kelurahan dibentuk Pagar Praja.⁶³ Organisasi teritorial ini mendampingi pemerintahan sipil. Dalam keadaan biasa KDM dan KODM berfungsi sebagai jembatan untuk menghubungkan antara militer dan sipil, tetapi apabila dalam keadaan perang mereka merupakan satu alat pemerintahan bersama-sama Pamong Praja dalam mengemudikan pemerintahan militer di bawah instansi militer. Pihak Pamong Praja tetap menjalankan kekuasaan seperti biasa, hanya ia bertanggungjawab pada instansi militer dan segala sesuatu yang akan dijalankan harus berdasarkan kepentingan militer.⁶⁴ KDM Sleman waktu itu dipimpin Radiono, kemudian diganti oleh Zatni Nuri dan bertindak selaku sekretaris adalah Dachlan.⁶⁵

Seperti telah disebut di muka bahwa di wilayah Sleman Tengah beroperasi kesatuan Tentara Pelajar (TP), yang waktu itu terkoordinasi dalam Detasemen III Brigade 17 dipimpin Kapten Martono. Sebagai markas dipilih pedukuhan Tanjung dan pedukuhan Balong Kelurahan Donoharjo Kecamatan Ngaglik. Masing-masing dijadikan sebagai tempat markas induk dan markas Palang Merah Indonesia. Salah seorang anggota TP yang mengelola PMI adalah Radius Prawira. Secara kebetulan rumah tinggalnya di dalam kota berdekatan dengan Rumah Sakit Petronela (kini RS Betesda), sehingga pengadaan obat-obatan untuk keperluan PMI tidak mengalami kesulitan.⁶⁶

Sebagai kesatuan yang bertanggungjawab dalam melaksanakan operasi di Sleman Tengah, TP sering sekali mengalami kontak senjata dengan tentara Belanda, baik saat melakukan penghadangan, penyerangan maupun bertahan. Kesatuan TP yang berjuang di Sleman Tengah terbagi menjadi tiga peleton, masing-masing peleton dipimpin oleh Darsono, Arief dan Aliadi.⁶⁷ Walaupun jumlah anggota TP di Sleman Tengah mencapai tiga peleton, dalam melakukan operasi TP mengadakan kerjasama dengan kesatuan lain dan tenaga rakyat.

Kontak senjata antara pasukan TP dengan Belanda bulan Maret 1949 telah melibatkan penduduk di Jumeneng Mlati. Waktu itu Darsono selaku komandan peleton I memerintahkan anak buahnya melakukan penghadangan di Jumeneng. Sasarannya adalah patroli Belanda yang akan melewati jalan Cebongan – Sleman. Patroli Belanda diperkirakan berkendaraan truk dengan penumpang kurang-lebih 15 orang. Ketika patroli Belanda yang bersenjata lengkap itu tiba, segera terjadi tembakan-menembak dengan tujuh orang anggota TP. Ketujuh anggota TP itu empat orang berada di sebelah kiri jalan dan tiga orang di sebelah kanan jalan. Dengan bantuan rakyat yang menciptakan suasana ramai seolah-olah jumlah tentara gerilya sangat banyak, mereka dapat mengacaukan patroli Belanda. Dalam penghadangan ini berhasil dilukai tiga serdadu Belanda dan diperoleh sepucuk senjata *sten gun*. Tujuh orang anggota TP yang melakukan penghadangan itu antara lain Sukamdi, Marjono, Suparjo, Surono, Suhadi, Suharto dan Dullahmukri.⁶⁸

Pada bulan Maret 1949 itu pula di Krandon Pendowoharjo Sleman terjadi kontak senjata antara pasukan TP dengan tentara Belanda. Waktu itu pasukan TP dipimpin langsung oleh Komandan Datasemen III Brigade 17 Kapten Martono. Dengan kekuatan kurang-lebih 35 orang, mengadakan *stelling* di pedukuhan Krandon. Kekuatan tentara Belanda kurang-lebih berjumlah 50 orang datang dari Jabung Gede arah barat dari padukuhan Krandon. Rupanya pihak Belanda mengetahui bahwa di hadapannya ada musuh siap tempur. Hal itu nampak dari cara mereka

menuju ke pedukuhan Krandon dengan merayap lewat tengah sawah yang padinya sedang menghijau setinggi lutut. Mengingat sangat terbatasnya persediaan peluru di pihak TP, tentara Belanda dibiarkan menuju ke arah Krandon. Ketika tentara Belanda berada kurang-lebih 100 meter di hadapan pasukan TP yang melakukan *stelling*, Kapten Martono memberi komando kepada anak buahnya agar melepaskan tembakan. Pihak Belanda bukannya melepaskan tembakan balasan melainkan mundur. Sementara itu ada penduduk yang melaporkan bahwa dari arah utara dan selatan Krandon datang tentara Belanda menuju ke Krandon. Dalam keadaan bahaya, Kapten Martono memerintahkan anak buahnya agar mengundurkan diri. Walaupun tentara Belanda sempat memasuki pedukuhan Krandon, pasukan TP berhasil menghindari dari kepungan tentara Belanda, sehingga berhasil mundur dengan selamat. Dalam baku tembak itu pihak Belanda kehilangan dua anggotanya dan seorang menderita luka-luka, sedangkan pihak TP tetap utuh.⁶⁹

Peristiwa kontak senjata antara gerilyawan Republik Indonesia dengan tentara Belanda terjadi di dekat jembatan Sempor. Pada suatu hari di bulan April 1949, di jembatan Sempor yang menghubungkan Kota Yogyakarta dengan Magelang dipasang dua buah trek bom, masing-masing seberat 250 kg. Rencananya trek bom akan diledakkan saat kendaraan Belanda melewati jembatan. Untuk itu beberapa anggota kesatuan TP, anggota kesatuan polisi dan laskar rakyat, membagi tugas. Sebagian berada di sebelah barat jembatan dan sebagian lain ada di sebelah timur jembatan. Kira-kira pukul 11.30 dua kendaraan lapis baja Belanda lewat dan aba-aba meledakkan trek bom lewat tembakan pistol berbunyi, tetapi trek bom tidak berhasil diledakkan. Mengetahui ada bahaya mengancam, kendaraan lapis baja Belanda yang belum sempat menyeberangi jembatan kemudian memuntahkan tembakan ke arah suara letusan pistol tadi. Terjadilah baku tembak antara kendaraan lapis baja yang masih berada di sebelah barat jembatan dengan gerilya Republik yang ada di makam Sempor. Dua kendaraan lapis baja Belanda

yang telah melewati jembatan dengan selamat dan telah berada di sebelah timur jembatan mencoba kembali mundur. Malang bagi salah satu kendaraan lapis baja itu karena menginjak ranjau yang dipasang oleh para gerilyawan dan hancurlah tank Belanda itu. Bersamaan dengan ledakan ranjau yang dipasang 50 meter di sebelah timur jembatan, gerilyawan yang berada di sebelah timur jembatan melepaskan tembakan-tembakan dengan gencar. Penghadangan di jembatan Sempor berhasil menghancurkan salah satu kendaraan lapis baja dan menewaskan 10 serdadu Belanda, walaupun usaha menghancurkan jembatan tidak berhasil.⁷⁰

Di Kecamatan Tempel ada satu tempat yang sangat strategis untuk mengadakan pencegahan-pencegatan konvoi Belanda. Daerah jalur Yogyakarta — Magelang sering dilewati tentara Belanda, baik dari Yogyakarta ke Magelang maupun sebaliknya. Setiap saat rombongan Belanda yang lewat mengalami gangguan berupa rintangan jalan ataupun penghadangan. Untuk mengatasi gangguan itu Belanda mendirikan pos keamanan di Tempel. Pos keamanan ini pun tidak luput dari gangguan pihak gerilya Republik Indonesia. Pada 1 Januari 1949 Komandan KODM Tempel Jasmani memimpin anak buahnya melakukan serangan ke pos Belanda di rumah seorang keturunan Cina dekat jembatan Krasak. Dalam serangan tersebut 7 orang/serdadu Belanda meninggal dan dari pihak gerilya jatuh korban dua orang, satu di antaranya adalah Jasmani, komandan KODM Tempel.⁷¹ Waktu-waktu selanjutnya aksi penghadangan terhadap Belanda tetap dilakukan oleh para gerilyawan. Kesatuan yang pernah terlibat dalam penghadangan di antaranya kesatuan TP, 151 dan KODM setempat. Setelah berkali-kali pihak Belanda mendapat gangguan dari pihak gerilyawan Republik Indonesia, Belanda nampaknya mulai geram, karena itu Belanda dengan menggunakan kendaraan lapis baja melakukan penyerangan ke Desa Lumbungrejo. Di sini tidak mendapat perlawanan, karena para gerilyawan tidak ada yang bermarkas di Lumbungrejo. Yang menjadi sasaran Belanda kemudian adalah penduduk se-

tempat yang tidak menduga akan mendapat serangan Belanda. Akibat amukan Belanda, penduduk yang menjadi korban dan meninggal dunia sejumlah 40 orang.⁷²

Kontak senjata antara Belanda dengan tentara Republik dan Belanda mendapatkan perlawanan cukup gigih terjadi di Ngetiran Sariharjo, Ngaglik, Sleman. Waktu itu menjelang tengah hari pada hari Minggu 29 Mei 1949, saat yang telah diputuskan sehari sebelumnya bahwa pasukan TP akan meninggalkan Dukuh Ngetiran, karena telah empat hari bermarkas di situ, tetapi secara tiba-tiba Belanda melakukan serangan.⁷³ Anggota TP yang tinggal di Ngetiran waktu itu kesatuan Peleton III di bawah pimpinan Letda Aliadi. Ketika datang berita yang disampaikan oleh seorang perempuan bernama Parinah, bahwa dari arah selatan datang serombongan tentara Belanda, kepemimpinan Komandan Regu I diambilalih oleh Sersan Suwono. Berita kedatangan serombongan tentara Belanda segera disebar ke segenap anggota TP yang terpencar di beberapa rumah penduduk. Sersan Suwono segera keluar dari Ngetiran menyongsong kedatangan tentara Belanda. Sersan Suwono beserta anak buahnya mengambil posisi tempur di sekitar gubuk beberapa meter di KM 10 sebelah utara jurusan Yogyakarta – Pulowatu. Kemudian mereka menuju ke selatan untuk menyerang sambil bertahan dengan berbentengkan tanggul selokan irigasi.⁷⁴

Sementara itu pasukan Belanda yang ratusan jumlahnya dan diperkirakan datang dari pos Belanda di Beran bergerak lebih leluasa. Menurut saksi mata kedatangan Belanda waktu itu sekitar pukul 09.00–10.00. Sebelum sampai di tempat berlangsungnya kontak senjata, tepatnya di perempatan Poton, sebagian pasukan Belanda berbelok untuk berpencar menuju ke tempat baku tembak.⁷⁵

Pasukan TP Regu I Peleton III yang terdiri atas Sersan Suwono (selaku komandan regu), Kopral Harsono (selaku wakil komandan regu), Supanoto, Sukapdi, Suroyo, Daryono, Ali Basah dan Haryono sebagai anggota, merupakan prajurit-prajurit militer. Dalam jumlah personal yang tidak seimbang, mereka

berani menghadapi tentara Belanda yang datang dari arah selatan, pasukan TP dengan berlindung tanggul irigasi mampu memberikan perlawanan, tetapi ketika datang tentara Belanda dari arah lain, yaitu dari barat dan timur, Suwono dan anak buahnya tidak mampu lagi mengimbangnya. Akibatnya satu-persatu prajurit TP yang terjepit itu gugur. Kiranya Haryono masih dalam lindungan Yang Mahakuasa. Sambil melakukan perlawanan dengan sisa peluru yang ada, dia menyusuri selokan irigasi ke arah timur kemudian membelok ke utara sehingga terhindar dari sasaran peluru tentara Belanda.⁷⁶

Sementara itu regu II peleton III TP bersama beberapa anggota KODM Ngaglik mengambil posisi di selatan pedukuhan Ngetiran sambil melepaskan tembakan-tembakan, berhasil membendung tentara Belanda, sehingga tidak sempat memasuki pedukuhan Ngetiran.⁷⁷

Peristiwa baku tembak di Ngetiran ini di pihak Belanda kehilangan 17 serdadunya dan beberapa orang lainnya menderita luka-luka. Untuk mengumpulkan para korban, Belanda memaksa penduduk sekitarnya. Umumnya mereka terdiri atas kaum wanita, karena para lelaki pergi mengungsi.⁷⁸ Untuk membawa pergi para korban, Belanda mendatangkan bantuan lewat udara. Dengan lindungan pesawat udara, Belanda berhasil mengangkatnya dengan selamat.⁷⁹ Karena didukung kapal terbang, maka regu II Peleton III Tentara Pelajar, pasukan KODM Ngaglik dan satu peleton dari kesatuan 151 tidak melakukan pengejaran terhadap tentara Belanda yang mengundurkan diri.⁸⁰

Setelah Belanda pergi, kesempatan terbuka bagi anggota Tentara Pelajar dari regu II Peleton III, beberapa anggota pasukan KODM Ngaglik dan penduduk untuk mengurus jenazah anggota TP yang gugur. Lewat tengah hari seluruh delapan jenazah telah dikumpulkan dan dibawa ke mesjid Rejodani.⁸¹

Setelah dilakukan upacara keagamaan untuk pemakaman, pada Minggu 29 Mei 1949, sekitar pukul 17.00 dilangsungkan pemakaman di makam Rejodani.⁸²

Penghadangan-penghadangan terhadap tentara Belanda yang dilakukan oleh tentara Republik Indonesia paling sering berlangsung di jalan jurusan Yogyakarta – Kaliurang dan Yogyakarta – Magelang, sebagai tempat penghadangan biasanya dipilih jembatan atau tempat yang agak jauh dari pemukiman penduduk. Dalam melakukan penghadangan biasanya para gerilyawan menggalang suatu kerjasama. Mereka terdiri atas kesatuan-kesatuan yang ada seperti kesatuan TP, Yon 151, KODM, Hisbullah, dan rakyat. Di jalur Yogyakarta – Magelang penghadangan berlangsung di jembatan Jombor, jembatan Mulungan, jembatan Ngancar, jembatan Sempor, jembatan Bedog dan di Tempel.⁸³ Penghadangan di jalur Yogyakarta – Kaliurang berlangsung di jembatan Jurug, dekat pedukuhan Karangpedak, jembatan Candi, dan dekat pedukuhan Kledokan.⁸⁴ Penghadangan yang termasuk berhasil ialah di jembatan Sempor. Di sini pihak Belanda kehilangan sebuah kendaraan lapis baja dan sepuluh prajurit.⁸⁵ Juga di jembatan Ngancar, di sini Belanda kehilangan sebuah kendaraan lapis baja dan sejumlah serdadu.⁸⁶ Pencegatan di jalan Kaliurang yang paling berhasil ialah di jembatan Candi. Di jembatan Candi ini Belanda paling sering mendapat penghadangan, sehingga jumlah korban baik berupa peralatan perang maupun serdadu sangat besar. Waktu itu seorang mengatakan bahwa jembatan Candi merupakan "neraka" bagi Belanda.⁸⁷ Di dekat bekas asrama Jepang, Belanda kehilangan sebuah kendaraan lapis baja dan sembilan serdadu.⁸⁸ Di dekat pedukuhan Ngaben Belanda juga kehilangan sebuah kendaraan lapis baja dan beberapa serdadu termasuk salah seorang berpangkat perwira menengah,⁸⁹ namun pemasangan ranjau di jembatan Dayu tidak mengenai sasaran yang dituju, melainkan mengenai gerobag bambu yang ditarik penduduk desa.⁹⁰

Dalam melakukan penyerangan-penyerangan terhadap pos-pos Belanda di Tempel, Medari, dan Kaliurang, para gerilyawan juga menggalang suatu kerjasama seperti halnya ketika melakukan penghadangan.⁹¹

Peranan sangat besar kesatuan Tentara Pelajar selama *Clash* II di Sleman Tengah diakui oleh banyak kalangan, namun demikian tidak berarti bahwa tidak ada pasukan lain yang ikut berjuang di Sleman Tengah, karena itu keterlibatan pasukan lain juga perlu diketengahkan. Waktu itu di Sleman Tengah berjuang kesatuan 151, Hisbullah, kepolisian dan badan-badan perjuangan dari rakyat.

Batalyon 151 di bawah pimpinan Mayor Haryadi masuk wilayah Sleman Tengah beberapa hari setelah peristiwa pendudukan Kota Yogyakarta. Kedatangannya langsung menuju ke arah utara Kabupaten Sleman. Pilihan tempat itu mungkin dianggap paling aman, karena letaknya demikian jauh dari jalur yang menghubungkan Yogyakarta – Magelang maupun Yogyakarta – Kaliurang. Rupanya kedatangannya di sebelah barat Kaliurang mendapat guntungan tentara Belanda dari arah timur Kaliurang dan dari arah barat (jurusan Tempel). Mayor Haryadi gugur di sana dan untuk meneruskan perjuangan, kedudukannya digantikan oleh adiknya bernama Haryo Sudirjo. Selanjutnya pasukan 151 dalam melakukan operasi selalu berada di wilayah Sleman tengah bagian utara. Untuk markas dipilih pedukuhan Karanggawang. Dalam melakukan aksi sering menggalang kerjasama dengan kesatuan-kesatuan lain seperti telah disinggung di atas.⁹²

Selama *Clash* II Hisbullah ikut terlibat dalam perang gerilya di Sleman Tengah. Kekuatannya terbagi dalam dua bagian. Sebagian menempati daerah sebelah timur jalur Yogyakarta – Kaliurang dan sebagian lagi menempati posisi sebelah barat jalur Yogyakarta – Kaliurang, masing-masing ada di bawah pimpinan Komaruddin dan Waston yang mendorong Komaruddin membawa anak buahnya diajak bergerilya di sektor pertahanan Yogyakarta Utara karena ingin balas dendam. Rasa dendam Komaruddin bermula dari kematian pamannya yang bernama KH. Muhdi akibat operasi Belanda di daerah Krapyak, Wedomartani, Ngemplak. Dendam Komaruddin dilampiaskan dengan melakukan penghadangan-penghadangan terhadap rombongan

Belanda yang melewati jalan Yogya – Kaliurang. Dalam melakukan aksi selalu mengadakan kerjasama dengan kesatuan lain seperti telah diuraikan di atas.

Selama revolusi, kesatuan polisi tidak ketinggalan ikut berjuang di Sleman Tengah. Kesatuan Polisi di Sleman yang terlibat dalam perjuangan berada di bawah pimpinan Kadim. Di sini polisi mempunyai tugas ganda, satu sisi melindungi rakyat dari gangguan pencurian dan perampokan, sisi lain berjuang melawan Belanda. Markas polisi di Sleman Tengah selalu berpindah-pindah mulai dari Nangari, Manggungsari, Kecamatan Turi ke Kecamatan Ngaglik (pedukuhan Jetis Suruh, Donoharjo) kemudian pindah lagi ke Randusongo Kecamatan Turi hingga Belanda pergi meninggalkan Kota Yogyakarta. Keikutsertaan pasukan polisi dalam berjuang pernah terlibat tembak-menembak dengan Belanda di Kadilobo Kecamatan Pakem dan di Ngepas Kecamatan Ngaglik pada 6 Januari 1949, penyerangan ke markas Belanda di Kaliurang sebanyak empat kali, penyerangan ke markas Belanda di Tempel, penyerangan markas Belanda di Medari, penghadangan dan perusakan jembatan Sempor dan penyerangan atas Kota Yogyakarta pada 1 Maret 1949.⁹⁴

2.4.2 *Kabupaten Bantul*

2.4.2.1 *Geografi dan Masyarakat*

Sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai perjuangan rakyat Bantul, perlu kiranya diketengahkan mengenai gambaran sepintas tentang Kabupaten Bantul, khususnya mengenai geografi dan masyarakatnya. Kabupaten Bantul terletak di sebelah selatan Kota Yogyakarta. Jarak dari Kota Yogyakarta sampai Kota Bantul ± 10 km. Batas-batas Kabupaten Bantul, di sebelah utara dibatasi oleh Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, sebelah timur dibatasi oleh Kabupaten Gunungkidul, sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia, dan sebelah barat Kabupaten Kulon Progo. Di antara Kabupaten Bantul dan Kulon Progo terdapat sungai yang cukup besar untuk ukuran sungai di Pulau Jawa yaitu Sungai Progo dan Sungai Opak.

Kabupaten Bantul terdiri atas 18 kecamatan, 70 kelurahan dan 900 desa.⁹⁵

Luas Kabupaten Bantul kira-kira 459.320 ha, terdiri atas tanah dataran yang subur dan tanah pegunungan yang kurang subur. Sebagian besar tanah dataran terdiri atas tanah-tanah persawahan dan desa-desa serta jalan raya. Jalan raya dan jalan kereta api di Kabupaten Bantul mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam bidang perhubungan. Antara kota kecamatan yang satu dengan yang lain dapat ditempuh melalui jalan raya. Di samping itu alat transportasi yang lain adalah kereta api, meskipun hanya terdapat di sepanjang jalan jurusan Yogyakarta – Bantul sampai Palbapang. Rel kereta api itu kini sudah tidak digunakan lagi.

Jika ditinjau dari segi kemiliteran, Kabupaten Bantul kurang menguntungkan, sebab tanahnya sebagian besar datar. Meski demikian ada beberapa kelurahan dan desa di Kabupaten Bantul yang cukup besar peranannya pada masa revolusi. Kelurahan itu adalah Segoroyoso dan Desa Bibis Kelurahan Bangunjiwo. Kedua desa ini akan menjadi pokok tulisan ini. Karena keadaan alamnya kurang menguntungkan, maka sebelum *clash* II tahun 1948 itu terjadi, pimpinan militer telah merencanakan suatu sistem perang gerilya. Perlawanan gerilya dilakukan secara berkelompok dan gerakannya secara teratur. Biasanya mereka bermarkas di pedesaan. Di sinilah akhirnya desa menjadi penting artinya, yaitu sebagai pusat perjuangan.

Penduduk Kabupaten Bantul pada umumnya bekerja sebagai petani, buruh dan pedagang serta sebagian kecil adalah pegawai. Sejak tahun 1930 Kabupaten Bantul tercatat sebagai tempat aktivitas industri gula.⁹⁶ Di Kabupaten Bantul kurang lebih terdapat delapan buah industri gula yang diusahakan oleh pengusaha Eropa, terutama Belanda. Pengusaha-pengusaha tersebut mendirikan industrinya dengan jalan menyewa tanah milik sultan. Setelah Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942, industri tersebut diambilalih oleh Jepang, kemudian tahun 1945 tepatnya pada masa peralihan, semua industri milik

asing diambilalih oleh pemerintah Indonesia. Di samping industri gula yang ditusahakan oleh bangsa asing, rakyat dengan industri rumahnya membuat perabotan rumah seperti ukir-ukiran perak di Kota Gede, gerabah di daerah Kasongan, dan gula merah di Srandakan. Sementara itu di beberapa daerah penduduk membuat anyam-anyaman dari bambu dan bahan makanan antara lain tahu dan tempe.⁹⁷

Masyarakat Kabupaten Bantul pada umumnya bersifat paternalistik dan memiliki sifat loyalitas yang sangat besar terhadap kelompoknya. Sifat loyal tersebut berlaku baik secara vertikal maupun horisontal. Vertikal adalah sifat hubungan antara rakyat dengan pimpinan yaitu antara rakyat dengan para lurah dan pamong desa lainnya. Horisontal adalah sifat hubungan antara sesama rakyat, pada umumnya diwujudkan dalam bentuk gotong-royong. Sifat semacam itu ternyata sangat menguntungkan pada waktu terjadi revolusi. Hal itu dapat dibuktikan pada masa *clash* II, rakyat di daerah Kabupaten Bantul dengan suka rela membantu perjuangan kaum militer bahkan ikut aktif melawan tentara pendudukan Belanda. Karena partisipasi rakyat dalam melawan Belanda menyebabkan pasukan gerilya dapat bertahan lama sampai penyerahan kembali kedaulatan bangsa Indonesia dari tentara Belanda.

Demikian gambaran umum mengenai keadaan geografi dan masyarakat Kabupaten Bantul.

1.4.2.2 Peranserta Masyarakat dalam Perang Gerilya

Sebelum terjadi serangan Belanda ke Yogyakarta, ibukota Republik Indonesia waktu itu suasananya diwarnai oleh ketegangan-ketegangan di antara para pemimpin. Muncul berbagai kecurigaan dan persaingan di antara partai-partai. Keadaan semacam itu sengaja direkayasa oleh pihak Belanda agar persatuan bangsa Indonesia tertuju pada kemelut yang sedang menimpa para pemimpinnya. Berbagai siasat diciptakan antara lain dengan memecahbelah kelompok pejuang dan blokade ekonomi. Kenyataan menunjukkan bahwa Belanda berhasil mengacau-

kan bangsa Indonesia. Siasat yang dijalankan oleh Belanda menimbulkan konflik antara golongan di dalam masyarakat. Dalam situasi kacau itu banyak bermunculan berita-berita tidak resmi baik yang berasal dari tentara Belanda maupun dari kalangan kelompok politisi Indonesia yang kontra dengan Republik.⁹⁸ Pada pokoknya berita itu bertujuan mengacau rakyat Indonesia agar supaya mengikuti jejak pembuat berita tidak resmi. Sebagai contoh, pengertian MBKD diputarbalikkan menjadi Markas Belanda Keliling Jawa.⁹⁹ Gejala mementingkan diri sendiri dan pelanggaran-pelanggaran hukum pun terjadi di mana-mana.

Sebagai akibatnya timbul beberapa peristiwa yang sangat melemahkan bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi Belanda. Peristiwa itu antara lain terjadi di daerah Surakarta, Srambutan, Pekalongan dan yang paling memukul perjuangan bangsa Indonesia adalah pemberontakan PKI di Madiun yang terjadi pada 18 September 1948.¹⁰⁰ Pemberontakan itu jelas merupakan tragedi nasional yang sangat melemahkan bangsa Indonesia sebelum melakukan aksi, para tokohnya sudah sempat ditangkap oleh yang berwajib.¹⁰¹

Setelah politik *divide et impera* Belanda sempat direalisasikan dan menimbulkan berbagai konflik antargolongan yang ada dalam masyarakat, Belanda tidak lagi membuang-buang waktu. Kesempatan itu dipakai untuk menyerang Republik Indonesia. Kemudian terjadilah serangan yang dilakukan oleh Belanda pada 19 Desember 1948 pagi hari. Pada waktu itu TNI sedang mengadakan persiapan latihan perang-perangan. Kurang-lebih satu jam sebelum rencana latihan dimulai, Belanda menyerbu Republik Indonesia.

Jenderal Sudirman yang pada waktu itu menjadi panglima angkatan perang, setelah menerima laporan keadaan yang gawat itu, segera mengeluarkan surat perintah kilat No. I/PB/D/48 yang berbunyi sebagai berikut :

..... karena kita diserang oleh Belanda, maka semua angkatan perang menjalankan perang sesuai dengan ren-

*cana yang telah ditetapkan untuk menghadapi Belanda.*¹⁰²

Serangan Belanda itu jelas menimbulkan kepanikan dan sangat mengejutkan masyarakat Yogyakarta. Keadaan menjadi kacau, rakyat menjadi takut dan bingung.

Sekitar pukul 05.45, bom pertama meledak di sekitar Lapangan Terbang Maguwo dan setelah mengalami perlawanan pada pukul 08.00 lapangan terbang sudah dikuasai oleh musuh. Belanda meneruskan rencananya masuk kota, dalam perjalanan menuju ke kota, di perbatasan kota mendapat perlawanan dari TNI. Meskipun mendapat rintangan akhirnya Belanda dapat masuk kota sebelah timur pada pukul 14.45 dan kira-kira pukul 16.00 pada hari itu juga kota dapat diduduki. Presiden dan wakil presiden serta beberapa pemimpin negara ditawan oleh Belanda.¹⁰⁹ Setelah Kota Yogyakarta diduduki oleh tentara Belanda, Tentara Nasional Indonesia mengundurkan diri ke luar kota sesuai dengan perintah panglima angkatan perang untuk mengadakan perang gerilya.

Para pemimpin yang dapat meninggalkan kota untuk memimpin gerilya di desa antara lain Letnan Jenderal Sudirman (panglima besar angkatan perang), Kolonel Djatikusumo (kepala angkatan perang), Kolonel TB. Simatupang (wakil kepala staf angkatan perang), Komandan *Wehrkreise* III Letnan Kolonel Soeharto. Sebelum melangkah lebih jauh lagi perlu kiranya dijelaskan mengenai istilah *Wehrkreise*. Dengan demikian nantinya peranan desa sebagai basis revolusi/perlawanan dengan jelas dapat diketahui.

Pada waktu terjadi Agresi Militer I, angkatan perang Indonesia mengalami kegagalan dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Kegagalan itu disebabkan angkatan perang Indonesia mencoba melakukan pertahanan linier terhadap serangan Belanda. Angkatan perang Indonesia di mana-mana selalu mendapat kekalahan taktis, dan di segala front Belanda berhasil menerobos garis-garis pertahanan Indonesia.¹⁰⁴ Selama periode

antara kedua aksi militer Belanda itu, para arsitek militer Indonesia menganalisis kegagalan itu dan merancang suatu sistem pertahanan yang berbeda yang berlandaskan *Wehrkreise* (lingkaran pertahanan). Dalam sistem itu front terdapat di segala penjuru dan musuh dianggap datang dari segala arah.¹⁰⁵ Pangkalan perlawanan tidak berada di kota-kota, melainkan di desa-desa. Dalam pada itu tentara yang disusun dalam unsur-unsur yang berdiri sendiri dapat beroperasi secara merdeka dalam satuan-satuan yang relatif kecil dengan ukuran kompi atau kurang.¹⁰⁶ Tentara Nasional Indonesia berada dalam setiap desa. Demikianlah dengan pertahanan yang berupa lingkaran pertahanan (*Wehrkreise*) itu desa menjadi jelas keterlibatannya dalam perlawanannya terhadap Belanda.

Pelosok-pelosok desa akhirnya dipakai sebagai pusat-pusat perlawanan terhadap Belanda. Gunung-gunung menjadi pusat kegiatan gerilya. Rakyat desa pada umumnya menyambut dengan baik keberadaan tentara yang ada di desanya. Para tentara itu dibantunya menurut kemampuan masing-masing, baik moral maupun materiil dengan kesadaran penuh dan secara sukarela. Hal semacam itu juga dilakukan kepada semua alat negara yang menyelenggarakan pemerintahan RI di desa-desa.

Sementara itu dengan dasar pertimbangan tertawannya para pemimpin RI, dan untuk mengisi kekosongan pemerintahan sipil, Panglima Teritorium Jawa (PTTD) Kolonel AH. Nasution¹⁰⁷ mengeluarkan Maklumat No. 2/MBKD pada 22 Desember 1948 yang mengumumkan berlakunya pemerintahan militer untuk seluruh Jawa.¹⁰⁸ Pemerintah ini menggunakan sistem pemerintahan gerilya yang bersifat "totaliter" yaitu melibatkan seluruh rakyat atau menggunakan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Sistem ini ternyata lebih baik bila dibandingkan dengan sistem linier.

Anthony Reid, seorang penulis barat menamakannya Zaman Gerilya, yang berlangsung sampai 6 Juli 1949. Selanjutnya ia berpendapat :

. Ketika pihak Belanda mengakui gagal dalam petualangan militernya dengan mengembalikan kekuatan kepada para pemimpin Republik yang dipenjarakan di Yogyakarta. Dalam masa ini pasukan Republik mengetahui bahwa keunggulan Belanda di bidang persenjataan dan latihan tidaklah lagi efektif oleh karena para gerilyawan dapat menyerang mereka hampir di mana saja dan pangkalan-pangkalan di daerah pedesaan. Bagi pihak tentara, masalah ini juga memberikan suatu contoh bagi hubungan antara tentara dan penduduk sipil. Oleh karena itu orang-orang sipil terkemuka ditangkap Belanda, tentara mengambil alih pimpinan perlawanan rakyat dengan dukungan hangat dari para penduduk desa yang memberi mereka makanan dan pelayanan yang ramah-tamah.¹⁰⁹

Dalam pada itu di Kabupaten Bantul, desa yang cukup menonjol peranannya pada masa revolusi adalah Desa Bibis. Desa itu merupakan salah satu dari 19 pedukuhan dalam lingkungan Kelurahan Bangunjiwa, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis di utara dibatasi oleh tanah persawahan yang berupa sawah jabatan, di sebelah timur dibatasi oleh Desa Jipangan, di sebelah barat oleh Desa Bangen, dan di sebelah selatan dibatasi oleh Desa Guasari.¹¹⁰ Desa Bibis merupakan daerah minus jika dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Jumlah penduduknya pada tahun 1949 ada 400 jiwa atau kurang-lebih 85 kepala keluarga¹¹¹ dengan mata-pencanharian bertani.

Padukuhan Bibis mempunyai wilayah seluas 25 ha, terdiri atas 7 ha sawah tadah hujan, 16 ha pekarangan dan 2 ha sawah irigasi sebagai milik kas desa.¹¹² Sawah tadah hujan pada musim kering dapat ditanami palawija, seperti ketela pohon, ubi jalar, kacang tanah dan jagung.¹¹³ Hasil pekarangan adalah ubi-ubian dan kacang-kacangan¹¹⁴, sedangkan sawah irigasi yang mendapat air dari dam Sungai Badog menghasilkan padi rata-rata sekitar 35 kuintal per ha setiap kali panen.¹¹⁵

Jalur transportasi antara Desa Bibis dengan desa di sekitarnya dihubungkan oleh jalan-jalan desa yang pada musim hujan sangat sulit dilalui karena berlumpur. Dari sudut strategi militer, letak Desa Bibis sangat menguntungkan. Daerahnya berupa perbukitan dan terletak di tengah dan diapit oleh pedukuhan lain apabila dipertentangkan dengan adanya markas Belanda di Padokan.

Kepemimpinan masyarakat Dukuh Bibis dibedakan melalui fungsi dan peranan mereka¹¹⁶, yaitu :

- (1) Pemimpin formal, yaitu kepala dukuh dan para aparat setempat dari Kelurahan Bangunjiwo. Mereka merupakan penguasa yang bertugas melaksanakan keputusan serta mengurus berbagai kepentingan penduduk. Pedukuhan sebagai tempat kediaman yang tetap bagi masyarakat Jawa merupakan satu wilayah hukum yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan tingkat daerah yang paling kecil.¹¹⁷ Dengan adanya perang dan ditempatinya desa Bibis oleh tentara Suharto, tugas seorang kepala dukuh menjadi semakin berat karena harus dapat menyelesaikan sebagai persoalan yang menyangkut kepentingan tentara dan masyarakat.
- (2) Pimpinan informal, yaitu mereka yang tidak duduk dalam aparat pemerintahan desa tetapi mempunyai pengaruh dengan adanya kelebihan pada dirinya dalam segi-segi tertentu yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat sakral. Mereka biasa disebut kiai. Tentara gerilya maupun penduduk mengetahui kiai punya peranan yang kuat dalam masalah yang berhubungan dengan kekuatan gaib untuk memberikan semangat dalam bertempur menghadapi Belanda.

Sumbangan yang diberikan oleh penduduk Bibis kepada tentara gerilya pada masa itu tidak hanya berwujud materiil tetapi juga moral. Meskipun pedukuhan Bibis merupakan daerah minus, tetapi ternyata penduduknya masih bersedia juga mem-

bantu tentara gerilya yang mereka anggap sebagai keluarga sendiri.

Dalam usaha untuk mengundurkan diri dari Kota Yogyakarta menuju keluar kota, pasukan Soeharto tidak langsung menuju Bibis tetapi terlebih dahulu melalui beberapa daerah Bantul yang lain. Perjalanan pasukan Soeharto sejak meninggalkan Kota Yogyakarta pada 19 Desember 1948 tengah malam bergerak ke arah selatan melalui beberapa tempat, seperti Desa Gandok dan Gunung Piring dan akhirnya pada 20 Februari 1949 sampai di Desa Bibis.¹⁰⁹

Kehadiran pasukan Soeharto mendapat sambutan baik dari penduduk, baik perempuan maupun laki-laki serta anak-anak. Hal ini disebabkan telah ada pemberitahuan terlebih dahulu yang dibawa oleh beberapa orang stafnya yang mendahului pasukan.¹²⁰ Mereka dipersilakan menempati rumah kepala dukuh karena rumahnya besar dan beberapa rumah penduduk yang dianggap cukup mampu menampung tentara gerilya. Penempatan itu ditentukan terlebih dahulu oleh kepala dukuh dengan melihat kemampuan ekonomi masing-masing rumah tangga tersebut.¹²¹ Mereka yang dianggap mampu dan memiliki rumah cukup besar, diwajibkan menampung tentara gerilya minimal empat orang dan maksimal 20 orang.

Pilihan Letnan Kolonel Soeharto atas Desa Bibis tepat karena desa ini terletak di daerah yang berbukit-bukit, sehingga sangat baik untuk persembunyian dan pertahanan serta untuk melancarkan suatu perang gerilya. Lebih menguntungkan lagi karena di sebelah utara terbentang daerah persawahan yang letaknya lebih rendah daripada markas tentara gerilya.¹²² Padahal hanya dari sebelah utara inilah kemungkinannya tentara Belanda untuk menyerang dan dengan kondisi medan demikian tentara Belanda akan terlihat dari jauh sebelum mendekati daerah Bibis yang dipakai sebagai markas tentara gerilya. Letak markasnya sendiri berada di tengah-tengah terlindung oleh rumah-rumah penduduk yang lain. Di sebelah utara ada rumah Dulrochmat yang terletak dipinggir jalan desa,

di sebelah barat daya rumah Joatmo terletak di atas gang kecil menuju markas, di sebelah barat terletak rumah Asmuni, dan di sebelah selatannya terletak rumah Moh. Saelani.

Rumah kepala dukuh Harjowiyadi sering digunakan sebagai tempat pertemuan para komandan sektor dari daerah-daerah pertempuran yang lain. Untuk memudahkan pengaturan dan pengawasan, markas komando Soeharto dibagi menjadi beberapa kelompok dan ditempatkan di rumah-rumah penduduk yang memadai keadaannya dan dianggap strategis serta menguntungkan dari sudut militer. Kalau ada bahaya; misalnya adanya patroli Belanda yang bermarkas di Padokan dengan "sukarela" penduduk membantu pasukan Letnan Kolonel Soeharto dengan staf yang bertempat tinggal di rumah Harjowiyadi. Letak markas yang dipilih tentara gerilya ini ternyata juga sesuai dengan apa yang telah dianjurkan oleh penduduk.

Beberapa hari kemudian, setelah kedatangan pasukan Letkol Soeharto, berdatangan pula beberapa orang kota untuk mengungsi. Di antara mereka ada yang turut menggabungkan diri menjadi pasukan gerilya, yaitu orang-orang Kauman yang terkenal sebagai anggota barisan angkatan perang Sabilillah yang biasa disingkat APS. Atas inisiatif kepala dukuh, dibuatlah dapur umum¹²³ untuk membantu tentara gerilya. Tindakan ini sesuai dengan anjuran panglima Tentara Teritorium Jawa yang kala itu dipegang AH Nasution. Dengan bantuan rakyat desa, maka desa yang terkecil pun merupakan basis perang gerilya.

Kedatangan pasukan Letkol Soeharto ke Desa Bibis bertepatan dengan musim panen jagung.¹²⁴ Hal ini merupakan suatu keuntungan karena dari areal sawah yang terbatas hasil padinya, maka panen jagung tersebut sangat membantu usaha untuk mencukupi kebutuhan tentara gerilya. Makanan yang diberikan kepada tentara gerilya berupa beras dicampur dengan jagung dan lauk-pauknya sayur-mayur. Sayur-mayur datang dari sumbangan penduduk Desa Bibis dan sekitarnya, sedangkan daging di datangkan dari Wonosari tiap minggu.¹²⁵

Kepala dukuh bertugas melaksanakan instruksi dari bagian dapur umum untuk menyediakan berbagai kebutuhan seperti kayu bakar, minyak tanah, sayur-mayur dan kepala yang merupakan bahan pokok pada masa tersebut.¹²⁶ Untuk memenuhi kebutuhan sayur-mayur dan kayu bakar, daerah Bibis tidak mengalami kesulitan, tetapi setiap hari ada beberapa orang yang bertugas mengambil dari daerah di sekitarnya.¹²⁷

Guna menanggulangi terbatasnya persediaan beras disajikan makanan seadanya seperti ubi, nasi jagung. Setiap harinya kepala dukuh¹²⁸ mendapat uang belanja dari pihak tentara sejumlah empat ribu rupiah untuk mencukupi kebutuhan dapur, namun minyak tanah harus dibeli di pasar-pasar sekitar daerah Bibis.

Selama di Bibis tentara gerilya di bawah pimpinan Letkol Soeharto mendapat bantuan beberapa ekor kambing dari daerah lain untuk dijadikan lauk-pauk.¹²⁹ Kambing itu di-datangkan dari daerah Wonosari, karena ternak penduduk Desa Bibis sendiri telah habis disumbangkan.¹³⁰ Hewan-hewan ini diterima pada bulan ketiga sebanyak empat ekor dan pada bulan terakhir juga empat ekor selama mereka berada di Desa Bibis.¹³¹

Disiplin tentara di bawah Letkol Soeharto di Bibis sangat keras. Bagi seorang pelanggar peraturan yang cukup merugikan penduduk Bibis, berlaku hukum perang baginya. Hal semacam ini membuktikan bahwa tidak selalu anggota tentara yang mengatasnamakan pejuang dibenarkan untuk menuntut hak istimewa, yaitu berbuat sekehendak hati.¹³² Sebagai contoh, pernah terjadi beberapa orang gerilya mengambil jagung di sawah penduduk. Pemiliknya melaporkan perbuatan itu kepada kepala bagian umum urusan dapur. Sang kepala mengambil tindakan dengan menghukum anak buahnya. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa di lingkungan tentara diperlakukan disiplin yang keras. Peristiwa yang terpuji itu tersebar luas di desa-desa¹³³, sehingga rakyat lebih menaruh respek pada tentara gerilya.¹³⁴ Menurut lurah Bangunjiwo, pada masa itu orang

mudah marah, kadang-kadang disertai ancaman hanya gara-gara soal makan.¹³⁵ Pada masa itu lurah Bangunjiwo berke-wajiban mengirim bantuan untuk anak buah pak Harto¹³⁶ sedangkan yang membagi-bagi ke pos-pos sudah ada sendiri petugasnya.

Di Kelurahan Bangunjiwo, penduduk sangat menaruh kepercayaan kepada tentara gerilya pimpinan Soeharto sebagai pelindung dan pengaman mereka dari gangguan pasukan gerilya lain di bawah seseorang yang integritas perjuangannya belum dapat diketahui selama itu di lingkungan bibis. Hal semacam ini menjadikan kedudukan pasukan Soeharto semakin kuat. Semenjak kedatangan pasukan gerilya Letnan Kolonel Soeharto, di Desa Bibis secara bersama-sama didirikan pertahanan-pertahanan dengan menggali parit-parit di sekitar desa.

Selain itu penduduk desa berusaha membantu tentara gerilya dengan mencarikan berbagai keterangan tentang keadaan dan perkembangan medan di sekitar Desa Bibis. Salah satu pekerjaan yang dianggap cukup merepotkan penduduk adalah mencari alas tidur para tentara gerilya seperti tikar, papan, anyaman bambu, dan lain-lain. Di bagian dapur umum biasanya dikerahkan tenaga perempuan yang dapat membantu memasak secara bergiliran. Salah satu tugasnya seperti menunggu perapian, menanak nasi dan memasak lauk-pauk. Persoalan yang sering timbul di dapur umum, jika pada malam hari markas kedatangan tamu-tamu komandan pasukan tempur sektor yang akan memberikan laporan harian. Biasanya mereka sering langsung ke dapur minta makan. Jatah makan untuk para staf yang ada di situ harus ditambah, karena mereka datang dengan para pengawalnya. Dalam keadaan demikian tidak jarang kepala dukuh terpaksa berusaha mencari tambahan makanan dari rumah-rumah penduduk seperti jagung, ubi, ketela, dan apa saja yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan makan waktu itu.

Pasukan gerilya yang ada di Bibis tidak perlu risau setiap kali ingin minum dengan gula sehingga kepala dukuh dapat menyediakan dalam jumlah yang cukup, tentu saja berupa gula jawa. Ada juga gula pasir yang diambil dari pabrik gula Padokan sebelum dilancarkan taktik bumi hangus. Penduduk sering juga disuruh tentara mengambil beras di daerah Sanden dan Talkondo secara beranting dan dikawal oleh tentara yang menyamar sebagai petani.

Tentara gerilya melakukan blokade ekonomi terhadap kota pendudukan dengan tujuan agar di satu pihak kota sulit memperoleh bahan makanan, dan di lain pihak agar produksi untuk kebutuhan pangan di luar kota tidak berkurang. Penduduk dilarang menjual hasil tanaman, ternak ke daerah musuh.¹³⁸

Pada saat pasukan Letkol Soeharto datang ke daerah Bibis sedang berlangsung masa panen jagung, karenanya bahan makanan di Bibis bisa tercukupi. Kepala dukuh memerintahkan rakyat agar menyisihkan sebagian hasil panennya untuk ransum tentara kira-kira sebanyak satu sampai lima "gedeng" (30 batang jagung).

Bagian dapur umum yang tenaga kerjanya diambilkan dari para wanita secara bergantian, biasanya menyajikan sayur-mayur sebagai lauk dan kebanyakan terdiri atas sayur atau urap buah kluwih, sayur daun belinjo muda, sayur terong dan jipang (labu siam).¹³⁹

Di atas telah disinggung mengenai peranan kiai. Di samping itu menurut tradisi Jawa, pada umumnya sebagian dari masyarakat masih percaya adanya kekuatan gaib. Dengan perantaraan seorang guru atau kiai tertentu mereka bisa mendapatkan kekebalan dan kesaktian¹⁴⁰, begitu pula halnya penduduk Bibis. Mereka berusaha mencarinya, bahkan ada di antara beberapa tentara yang berguru dan minta nasihat apabila ingin pergi ke front. Pernah terjadi ada tentara minta nasihat dan petunjuk agar selamat, karena tentara itu akan pergi ke front. Tentara tersebut minta keselamatan, kekebalan dan kesaktian. Oleh sang guru atau sang kiai, tentara itu diwajibkan menjalani

puasa. Kenyataan menunjukkan bahwa tentara tersebut selamat dalam menjalankan tugasnya dan berhasil meruntuhkan beberapa pertahanan tentara Belanda. Demikianlah kenyataan menunjukkan peran kiai cukup memberikan arti dalam revolusi, meski terbatas pada nasihat-nasihat atau wejangan.

Pada umumnya, dalam kehidupan masyarakat dikenal adanya pimpinan. Para pimpinan itu diakui dan diangkat oleh masyarakat karena adanya kelebihan pada dirinya bila dibandingkan dengan masyarakat, kelebihan itulah yang menjadikan dirinya disegani masyarakat, Segala petunjuk, nasihat dan wejangan yang diberikan akan selalu dilaksanakan. Selain itu, masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa, dikenal sebagai masyarakat yang *paternalistik* atau sistem kepemimpinan; yang memimpin dan yang dipimpin seperti hubungan antara ayah dan anak-anaknya.¹⁴⁴ Dengan demikian para pemimpin itu mudah menggerakkan anak buahnya untuk kepentingan tertentu, khususnya dalam hal ini pada masa revolusi. Demikianlah sedikit gambaran mengenai peranserta kiai dalam masa perang gerilya di Desa Bibis.

Di muka telah dijelaskan bahwa yang akan menjadi sorotan dalam tulisan ini hanya dibatasi sekitar Kelurahan Segoroyoso dan Desa Bibis saja yang keduanya masuk dalam wilayah Kabupaten Bantul. Berikut ini penulis akan mencoba menguraikan peranserta yang dilakukan masyarakat Segoroyoso dalam perang gerilya. Sebelum melangkah lebih jauh alangkah baiknya jika tulisan ini memulai uraiannya dengan mengemukakan kondisi geografinya dan keadaan masyarakatnya. Dengan demikian peransertanya dapat dilihat dengan jelas.

Kelurahan Segoroyoso ini termasuk di wilayah Kecamatan Plered, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bila ditempuh dari Kota Yogyakarta kira-kira berjarak 20 km arah tenggara. Kelurahan ini terdiri atas 10 desa seperti Segoroyoso, Tiukan, Klaron, Jembangan, Jongkang, Srumbung, Dakromo, Karanggayam dan Karangwuni. Luas wilayahnya 4580125 ha terdiri atas tanah datar dan perbukitan. Jalan-jalan pada

masa itu masih merupakan jalan setapak.¹⁴² Kondisi yang demikian sebagai salah satu alternatif dipakai sebagai basis perlawanan gerilya, sehingga akan sulit dicapai oleh musuh. Potensi lain yaitu bahwa Kelurahan Segoroyoso merupakan penghasil kelapa, pisang, polowijo dan sayur-sayuran.¹⁴³ Dengan demikian potensi ini sedikit banyak bisa disumbangkan untuk kepentingan perang. Sebagaimana telah dicanangkan oleh para arsitek militer kita yaitu perang total yang artinya melibatkan seluruh potensi yang ada. Termasuk di dalamnya masyarakat pedesaan. Penduduk Segoroyoso pada umumnya sebagai pedagang dan petani di samping sebagai buruh. Selain di Kelurahan Segoroyoso dikenal juga sebagai tempat pemotongan hewan atau lebih dikenal sebagai Rumah Pemotongan Hewan (RPH).¹⁴⁴ Pada waktu agresi Belanda II keberadaan RPH ini sangat bermanfaat sekali. Karena sejak agresi itu terjadi dan para tentara gerilya berdatangan di Segoroyoso, maka timbul inisiatif dari Atmo Priyono untuk memanfaatkan keberadaan RPH itu untuk turut memberi sumbangannya dengan para tentara gerilya itu. Terus terang saja bagi Atmo Priyono keadaan itu sangat membingungkan bagi dirinya, karena dia yang diberi tugas atau bertanggungjawab di dapur umum. Dana yang ada sangat terbatas, oleh karena itu dengan sekuat tenaga Atmo Priyono berusaha mencari tambahan dana.

Setelah berpikir-pikir, kemudian ia menemukan jalan, mengapa ia tidak memanfaatkan saja RPH yang ada Segoroyoso. Setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan Gordo Utomo yang pada waktu itu lurah Segoroyoso, maka diputuskan bahwa setiap jagal hendaknya melaporkan diri ke kantor kelurahan. Kemudian diinstruksikan kepada semua jagal yang menyembelih seekor hewan diharuskan untuk memberi sumbangan sekitar 3 kg.¹⁴⁵ Sumbangan itu kemudian dimanfaatkan oleh pengurus dapur umum untuk menutup kekurangan lauk yang ada.¹⁴⁶ Dengan demikian *nuk* (bungkusan kecil) yang berasal dari Segoroyoso lauknya daging. Sampai saat ini Segoroyoso dikenal sebagai pemotong hewan atau yang sering disebut dengan Rumah Pemotongan Hewan (RPH).

Bermula dari datangnya para pengungsi yang sejak sore membanjiri Kelurahan Segoroyoso akibat jatuhnya Kota Yogyakarta itulah Kelurahan Segoroyoso mempunyai andil pada masa agresi Belanda II. Pada waktu itu rumah Gordo Utomo digunakan sebagai markas Laskar Segoroyoso dan dipakai sebagai tempat menampung para pengungsi dan para pejuang. Selain itu pada 20 Desember 1948 berbagai laskar dan TNI bermarkas di rumah Gordo Utomo.¹⁴⁷

Pada 26 Desember 1948, tepatnya pada hari Minggu Pon, Letnan Kolonel Soeharto yang pada waktu itu menjadi Komandan Brigade X Divisi III dengan sejumlah stafnya mulai memasuki Segoroyoso. Setelah sampai di Segoroyoso, maka diputuskan bahwa rumah Lurah Gordo Utomo yang digunakan untuk Markas Komando Brigade X Divisi III.¹⁴⁸ Selain itu rumah penduduk sekitarnya juga digunakan untuk kepentingan tentara juga, seperti rumah Darmi Wisastro juga digunakan untuk Kantor Administrasi. Kemudian rumah ibu Somo Sedono digunakan untuk Rumah Sakit Darurat (RSD). Rumah Kerto Sainan digunakan untuk bengkel senjata. Sedang untuk Dapur Umum selain di rumah Gordo Utomo sebagai pusatnya, juga tersebar di rumah-rumah penduduk seperti di Joyo Utomo dan di rumah Amat Yusak.¹⁴⁹

Berbagai kesatuan yang ada di Kelurahan Segoroyoso pada waktu itu di antaranya terdiri atas para anggota Brigade X, Pasukan P3 (Polisi Pelajar Pertempuran) yang berada di bawah pimpinan Johan Suparno. Kemudian Laskar Hisbullah, Laskar Kotagede, Laskar Segoroyoso sendiri, Tentara Pelajar (TP) pimpinan Darsono dan anggota Militer Akademi (MA).¹⁵⁰

Dari wilayah Segoroyoso inilah pada 29 Desember 1948 pasukan Letnan Kolonel Soeharto melakukan berbagai serangan. Di antaranya menyerang markas-markas Belanda yang berada di sekitar Sentul, Pengok, Kantor Pos, Ngabean, Patuk dan Pakuningratan. Serangan itu cukup membawa hasil yaitu dengan jatuhnya beberapa korban dari pihak Belanda. Pasukan Letkol Soeharto juga berhasil merebut persenjataan berikut

amunisinya.¹⁵¹ Serangan berikutnya juga dilakukan yaitu pada 9 Januari dan 4 Februari 1949.

Sebagai akibat serangan yang dilakukan Belanda pada bulan Januari 1949 penduduk Segoroyoso menjadi korban. Di antaranya, Joyopariwo, Romli, Amat Dasuki, Musdi, Pariworejo, Dulmungin, Dullah, Dani, Johar, Dasir, Muh. Rosidi, Sarido, Amatdikromo, Ny. Harjoutomo alias Sari dan anaknya. Sedang yang luka-luka terdiri atas Mursidi, Munijo, Ponidi dan Kawati.¹⁵²

Demikianlah gambaran peranserta masyarakat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

2.4.2.3 Hubungan Tentara Gerilya dan Masyarakat

Pasukan Letkol Soeharto berada di daerah Bibis selama satu panen jagung, yaitu kurang lebih lima bulan. Selama itu pasukan yang benar-benar berjuang selalu bentrok beberapa kali dengan *gerombolan* bersenjata yang memeras penduduk. Salah satu gerombolan yang terkenal waktu itu adalah gerombolan pimpinan Warsojumeno yang terkenal kebal.¹⁵⁹ Namun gerombolan Warsojumeno ini dapat dihancurkan, dan Warsojumeno sendiri tewas terbunuh oleh tentara gerilya.

Menurut keterangan beberapa penduduk, Warsojumeno adalah anak seorang kiai dari pesisir selatan. Sebelum kedatangan pasukan Letkol Soeharto ia menguasai daerah pertempuran sekitar Selarong. Kemudian terdesak oleh adanya tentara pemerintah yang masuk ke desa, salah satu diantaranya yang berada di Bibis itu untuk bergerilya melawan pasukan Belanda. Ada beberapa isu yang tersebar bahwa gerombolan Warsojumeno anti republik, bekerjasama dengan pasukan Belanda dan berusaha mengacaukan semangat perjuangan membela Proklamasi 17 Agustus 1945. Gerombolan ini hanya mencari keuntungan saja dan mencari kesempatan di air keruh dan selalu menjarah harta penduduk.

Pada masa itu terjadi pula perebutan daerah yang kadang mempersulit kedudukan penduduk setempat. Itu dapat terjadi

jika pasukan yang telah lebih dahulu menguasai satu daerah berkekuatan kecil saja sedangkan yang datang kemudian berkekuatan besar. Kedudukan kepala dukuh menjadi sulit dan dapat dituduh anti gerilya.¹⁵⁴

Penduduk setempat tidak hanya menghadapi pasukan gerilya, tetapi kadang-kadang menghadapi patroli pasukan Belanda yang tentu saja menaruh curiga terhadap kepala dukuh yang daerahnya berdekatan dengan daerah gerilya yang menjadikan kepala dukuh harus selalu pandai-pandai menilai situasi.¹⁵⁵ Sebagai contoh, ketika tentara Belanda yang berada di Padokan berpatroli mendekati Bibis yaitu sampai pedukuhan Kalangan, kepala dukuh Kalangan menjadi sasaran utama, dari depan diancam Belanda dari belakang ditekan tentara gerilya yang tidak bertanggung jawab. Jika salah menilai situasi maka saat itu akan berakhirilah segalanya.¹⁵⁶

Kadang-kadang pada saat-saat tertentu beberapa pasukan tidak dikenal pada tengah malam meminta beras, ayam, bahkan sering kambing penduduk dengan alasan untuk perjuangan.¹⁵⁷ Kesulitan yang terjadi pada masa itu, baik bagi penduduk Desa Bibis maupun sekitarnya adalah untuk membedakan secara pasti antara pasukan pemerintah dan pasukan dari laskar yang menjadi tentara gerilya.¹⁵⁸

Perlengkapan perang tentara, seperti senapan dan pelurunya biasanya disembunyikan di kebun-kebun penduduk untuk menjaga agar senjata tersebut tidak diketahui jika suatu saat datang patroli Belanda yang kekuatannya tidak bisa dilawan.¹⁵⁹ Sering juga penduduk ditugaskan sebagai kurir dengan dikawal beberapa tentara gerilya yang menyamar masuk Kota Yogyakarta. Pada waktu-waktu tertentu, penduduk juga diperbantukan dalam pertempuran sebagai pengangkut amunisi dan perbekalan lainnya. Ketika terjadi pertempuran di sebelah timur Desa Bibis, yaitu di sekitar Mrisi,¹⁶⁰ pertengahan Maret.

Pada waktu pertempuran di dekat Mrisi tersebut, ada 10 orang penduduk dikerahkan untuk membantu.¹⁶¹ Karena keadaan geografis daerah Mrisi sangat sulit, terdiri atas deretan

pegunungan kapur, padahal pasukan Soeharto bagian persenjataan berat hanya berjumlah 10 orang,¹⁶² maka terpaksa jumlah penduduk yang sedianya menyiapkan perbekalan langsung dikerahkan membantu bagian senjata berat ini. Apabila pasukan ini terpaksa mundur ke arah barat yang jalannya sulit secara bergantian penduduk dikerahkan untuk mengangkat jenis senjata berat itu. Dalam keadaan biasa jika tidak ada pertempuran penduduk melakukan pekerjaan yang ditugaskan sehari-hari. Pada malam hari sering beberapa tentara gerilya memberikan pelajaran kepada penduduk cara membersihkan senjata, mengisi peluru dan menembakkannya di samping hal-hal yang berhubungan dengan kemilteran pada waktu itu.

Hubungan penduduk Bibis dengan tentara khususnya staf komando yang bertempat tinggal di rumah kepala dukuh, kurang dapat dirasakan. Berbeda dari mereka yang menginap di sekeliling Desa Bibis dan di rumah-rumah penduduk. Para tentara gerilya berusaha ikut membantu pemilik rumah secara sukarela. Kadang-kadang mereka bergantian ikut memelihara tanaman penduduk. Para anggota staf komando jarang berhubungan dengan penduduk setempat, hal ini dimaklumi oleh penduduk karena kesibukan para tentara yang ada di dalam staf tersebut. Kepala dukuh sendiri, walaupun rumahnya dipakai sebagai markas tentara gerilya tidak juga mengetahui beberapa banyak pasukan Letnan Kolonel Soeharto yang berada di sekitar Bibis.¹⁶³ Demikian pula tentang jumlah tentara gerilya yang ada di dapur umum.

Sistem keamanan dalam Desa Bibis dibagi dalam blok-blok rumah dan setiap blok dikepalai oleh seorang yang bertugas memberikan laporan mengenai tingkah-laku orang-orang yang tidak dikenalnya. Jika ada hal-hal yang mencurigakan dan bisa mengganggu keamanan, maka sebagai isyarat adalah pukulan kentongan. Dengan dipakainya sistem komunikasi tradisional kentongan, setiap rumah penduduk diwajibkan memiliki sebuah kentongan. Kentongan dibunyikan pada saat-saat yang penting saja, seperti isyarat keharusan berkumpul, jika ada patroli

Belanda di sekitar daerah Bibis maupun bahaya lain. Isyarat bunyi kentongan yang sangat penting pada waktu itu adalah *titir*.¹⁶⁴ Di pos-pos penjagaan tertentu ditugaskan seorang yang telah ditunjuk untuk mengawasi keadaan dan membunyikan kentongan apabila ada bahaya mengancam. Setiap harinya tidak kurang 15 pemuda bertugas di pos-pos pengawasan sebagai penabuh kentongan yang pada hari berikutnya diganti oleh rombongan lain.¹⁶⁵

Mereka yang pernah bertugas di bagian keamanan ini menyatakan bahwa tugas ini mereka terima dengan berat hati, karena seakan-akan keamanan seluruh pasukan gerilya pada siang hari praktis berada di pundak mereka.¹⁶⁶ Kesalahan dalam menjalankan tugas menimbulkan resiko yang sangat menakutkan. Namun demikian kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh tentara gerilya maupun oleh penduduk setempat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak menjadikan lemahnya semangat mereka. Kerjasama yang didasari dengan rasa saling pengertian mengakibatkan terjadinya suatu persatuan yang cukup kokoh untuk mendukung perjuangan. Demikianlah beberapa gambaran yang dapat dilukiskan melalui beberapa informan, peranserta penduduk Bibis kepada pasukan gerilya maupun sikap tentara gerilya kepada masyarakat pada masa Agresi Belanda II.

Sementara itu hubungan antara tentara gerilya dan masyarakat selama mereka berada di Segoroyoso terjalin dengan baik. Jauh sebelum terjadi Agresi Belanda II tepatnya sejak ibukota Republik dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta tahun 1946, karena keadaan ibukota yang semakin gawat. Pemindahan ibukota itu dilakukan atas tawaran dari Sultan Hamengku Buwono IX kepada Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta.¹⁶⁷

Sejak Yogyakarta menjadi ibukota Republik perannya semakin penting sebagai pusat perjuangan melawan Belanda. Guna membantu tentara Republik dan menjaga segala kemungkinan, di beberapa daerah didirikan laskar-laskar. Di Yogyakarta laskar-laskar rakyat itu tidak didominasi oleh

satu golongan apa pun, karena semua unsur dari berbagai haluan menyatu ke dalam badan kelaskaran.¹⁶⁸

Masyarakat Segoroyoso tidak ketinggalan untuk membentuk laskar perjuangan. Laskar Segoroyoso terbentuk berkat inisiatif Wakijan, salah seorang pemuda Segoroyoso yang pernah mengikuti pendidikan kader kelaskaran di Kabupaten Bantul pada akhir tahun 1945.¹⁶⁹ Setelah itu kira-kira pada tahun 1946, Wakijan mengajak teman sedesanya bernama Darmo Rumecko untuk mengikuti kembali latihan kemiliteran di Bantul. Berkat pengalaman latihan itu dan sepulangannya dari pendidikan, kemudian Wakijan, Darmo Rumecko dan satu teman lagi kadernya yaitu Wagimin mendirikan laskar rakyat Segoroyoso. Laskar rakyat ini berdiri dengan resmi pada bulan Februari tahun 1946 dengan nama Laskar Segoroyoso.¹⁷⁰ Laskar Rakyat Segoroyoso dipusatkan di rumah Wakijan, jumlah anggotanya sebanyak 60 orang. Pelatih Laskar Segoroyoso ini didatangkan oleh Wakijan dan Darmo Rumecko dari para anggota TKR Batalyon III di bawah naungan resimen 22 yang berkedudukan di Wiyoro. Komandan TKR Resimen 22 pada waktu itu adalah Letnan Kolonel Soeharto. Para pelatih Laskar Segoroyoso ini biasanya dua bulan sekali selalu mengalami pergantian atau digilirkan pada para anggota Resimen 22 yang lain. Para pelatuhnya biasanya terdiri atas dua orang. Di sinilah sesungguhnya hubungan antara tentara dan rakyat mulai terjalin dengan akrab. Dalam hal ini hubungan Laskar Rakyat Segoroyoso dengan para anggota tentara Resimen 22, khususnya dan yang lebih luas lagi antara tentara dengan masyarakat Segoroyoso. Demikian pula Letnan Soeharto selaku komandan Resimen 22 sering pula melakukan kunjungan ke pedesaan meninjau laskar-laskar yang menjadi asuhan para anak buahnya.¹⁷¹

Demikianlah hubungan itu ternyata sudah terjalin cukup lama, semenjak di Segoroyoso dibentuk laskar rakyat. Hubungan yang baik itu ternyata berkelanjutan sampai terjadi pada masa Agresi Belanda II. Selain itu ternyata Laskar Segoroyoso terus mendapat pembinaan dari pihak militer. Salah

satu bentuk pembinaan itu adalah dengan cara mengadakan latihan bersama. Adapun maksud dan tujuan dari latihan itu adalah apabila nanti diperlukan sewaktu-waktu oleh pihak militer selalu siap.¹⁷²

Pada waktu jatuhnya Kota Yogyakarta, rakyat dan pihak militer pergi keluar kota. Mulai 20 Desember 1948 rumah Wakijan yang kemudian berganti nama Gardo Utomo, semenjak menjabat lurah Segoroyoso, dipakai sebagai markas gerilya. Adapun Letnan Soeharto selaku komandan Brigade X Devisi III bersama sejumlah staf dan pengawalnya mulai memasuki Segoroyoso terus langsung ke rumah Gardo Utomo. Kehadiran mereka bukan tanpa alasan, selain antara Gardo Utomo sudah dikenal lama sebagai pendiri Laskar Segoroyoso. Gardo Utomo alias Wakijan mempunyai kedudukan sebagai lurah Segoroyoso. Dalam kehidupan masyarakat desa, kepala desa (lurah) merupakan pimpinan formal yang sangat berpengaruh, baik dalam kehidupan ketataprajaan maupun kemasyarakatan.¹⁷³ Sebagai pimpinan, kepala desa (lurah) itu mewakili warga masyarakat di dalam maupun di luar masyarakat desa.¹⁷⁴

Dengan demikian sewaktu-waktu pihak militer membutuhkan masyarakat setempat langsung dapat berhubungan dengan lurahnya tanpa harus mendatangi sendiri pada warga masyarakat. Tidak mengherankan apabila pada waktu diumumkan berlakunya pemerintahan militer dimulai pada 22 Desember 1948 itu lurah dimasukkan dalam struktur pemerintahan itu. Diharapkan lurah dapat menjadi penghubung antara pihak militer dengan masyarakat setempat.

Masyarakat Segoroyoso pada waktu itu beranggapan bahwa hadirnya militer di pedesaan itu sangat senang, karena masyarakat desa beranggapan bahwa masuknya tentara ke pedesaan sebagai pelindung mereka.¹⁷⁵

Masyarakat desa berpikir masalah harta bisa dicari pada waktu aman. Kemudian terjadilah hubungan timbal-balik yang saling membutuhkan antara yang melindungi dan dilindungi.

Rakyat dengan sadar memberikan sumbangan baik moral maupun materiil. Salah satu ujud sumbangan rakyat adalah membantu bahan-bahan mentah untuk keperluan Dapur Umum dengan cara sukarela. Tanpa kerjasama yang baik sudah barang tentu tidak akan ada sumbangan dari masyarakat. Demikianlah untuk mengakhiri tulisan ini, maka keterlibatan desa dalam perjuangan kemerdekaan tidak bisa diabaikan begitu saja. Perjuangan itu merupakan bentuk perlawanan perang total yang dilakukan oleh pasukan gerilya dengan bantuan rakyat pedesaan yang mengandung arti bahwa hubungan kerjasama militer dan sipil yang pernah dijalin dan menunjukkan adanya suatu kesadaran yang ditujukan ke usaha menegakkan Proklamasi 17 Agustus 1945. Kerjasama ini tanpa mengenal pamrih dalam usaha membela diri terhadap ancaman kekuasaan asing. Dengan demikian peranan rakyat pedesaan tidak bisa begitu saja diabaikan. Tulisan ini tidak mempersoalkan siapa yang menentukan kemenangan, tetapi bagaimana kemenangan itu didapat, yaitu melihat sejauh mana hubungan kerjasama dijalin secara berkaitan antara garis belakang sebagai pendukung garis depan. Untuk Kabupaten Bantul Desa Bibis, Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan dan Kelurahan Segoroyoso Kecamatan Pleret mempunyai andil yang cukup besar pada masa perjuangan menegakkan Proklamasi 17 Agustus 1945.

2.4.3 Kabupaten Gunungkidul

2.4.3.1 Wilayah dan Masyarakat

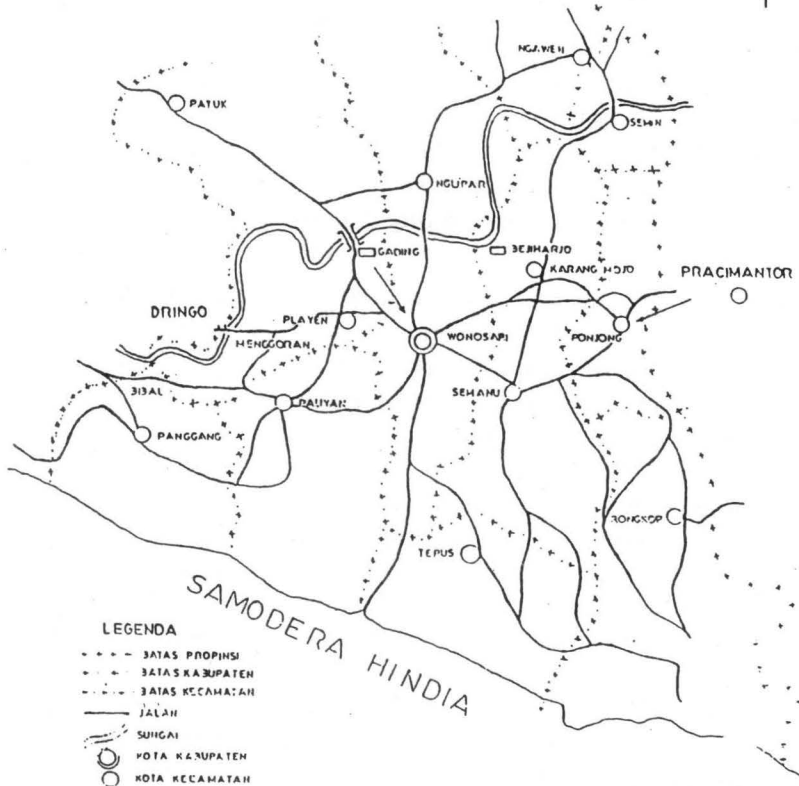
Kabupaten Gunungkidul sering dikenal dengan sebutan Gunung Seribu karena di sana terdapat bukit-bukit yang jumlahnya ribuan. Sebagian besar tanahnya berbukit, dan hanya sebagian kecil saja yang merupakan dataran rendah. Daerah ini merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan meliputi 13 kecamatan yaitu : Kecamatan Semin, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Patuk, Kecamatan Playen, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Panggang, Kecamatan Tepus, Kecamatan

Rongkop, Kecamatan Pojong, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Semanu, dan Kecamatan Wonosari.

Wilayah Kabupaten Gunungkidul membentang di sebelah utara dibatasi Kabupaten Klaten, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Bantul. Sebelah selatan membentang luas Samudra Indonesia, selanjutnya di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri. Dari ketiga belas kecamatan ini daerah yang terletak di sebelah selatan jalan raya Patuk sampai Bedoyo umumnya seringkali mengalami kurang air, baik untuk minum apalagi untuk mandi. Kecamatan yang sering mengalami keadaan semacam ini ialah Paliyan, Panggang, Tepus, Rongkop, dan Semanu. Keadaan air di musim kemarau panjang sering memprihatinkan, sehingga untuk minum, mandi dan guna ternaknya sangat kurang.

Pada saat musim kemarau panjang telaga-telaga yang biasanya merupakan tempat penampungan air hujan menjadi kering kerontang. Masalah kekurangan air ini merupakan problem yang sering menimpa masyarakat. Untuk mengambil air guna minum harus melalui jalan tunun-naik dan jauh. Namun pada waktu hutan masih lebat, masalah air tidaklah menimbulkan problem mereka. Rusaknya hutan jati ini sejak masa penjajahan Jepang dan berlanjut setelah proklamasi, terutama sekitar tahun 1947. Penebangan ini dengan dalih untuk membuat rintangan di jalan-jalan guna menghambat musuh. Hal ini berakibat luas di samping hutan semakin berkurang, juga menimbulkan kekurangan mata air untuk keperluan sehari-hari. Oleh karena itu waktu hendak mengembalikan fungsi hutan maka pemerintah setempat harus bekerja dengan giatnya. Hutan-hutan yang telah gundul harus ditanami dengan tanaman baru. Sehubungan musim kemarau yang panjang tanaman layu, kering, dan mati. Demikian juga ternak mengalami nasib yang sama dengan tuannya.

PETA KABUPATEN GUNUNGKIDUL



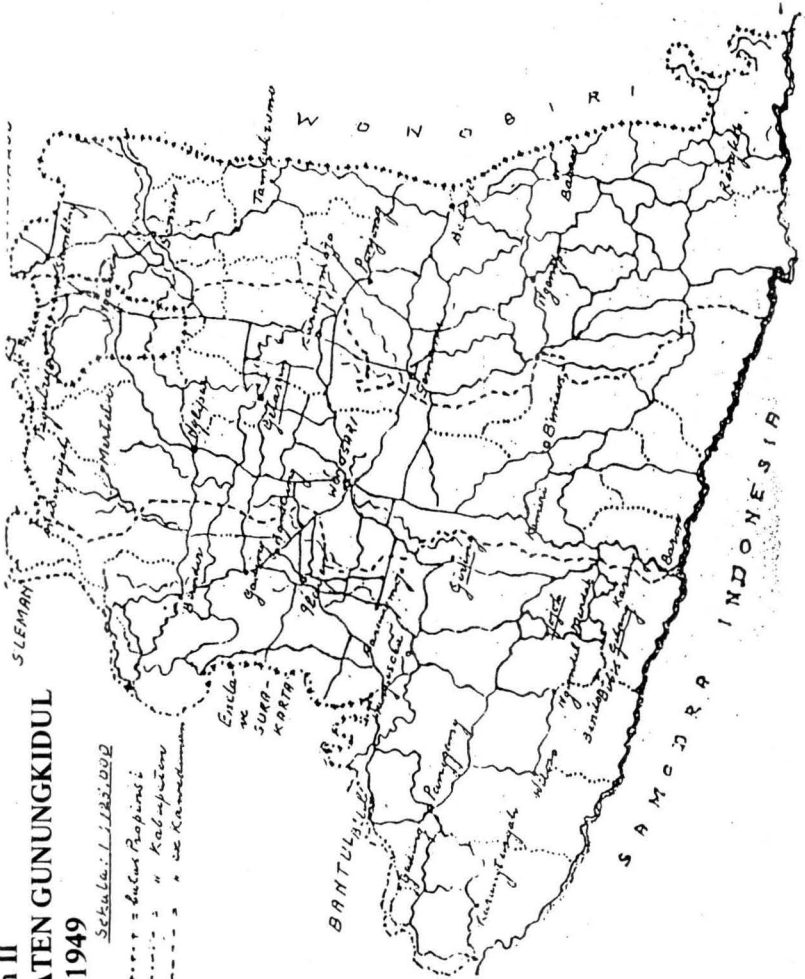
Lampiran II
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 1949

Skala: 1:125.000

..... = batas Propinsi

----- = " Kabupaten

----- = " Kecamatan



Lain halnya yang ada di daerah Kecamatan Ponjong, Karangmojo, Nglipar, dan Patuk masalah air ini tidak begitu mengganggu kebutuhan hidup sehari-hari. Di daerah ini, misalnya di Ponjong di sana banyak sumber air yang melimpah sehingga orang tani di sekitarnya dapat bertanam padi satu tahun lebih dari satu kali panen. Hal semacam ini juga terdapat di Gelaran daerah Kecamatan Karangmojo juga ada sumber air yang besar manfaatnya.

Adapun tentang jalan sebagian penghubung dari daerah kecamatan ke ibukota kabupaten, dan juga antarkecamatan waktu masa revolusi fisik belum selancar dewasa ini. Umumnya jalan aspal belum ada, tetapi jalan itu diberi alas batu kali yang belum begitu halus. Kendaraan sulit dan masih sangat jarang, maka dari daerah satu ke tempat lainnya terpaksa harus berjalan kaki sebagaimana dialami para pejuang di Gunungkidul. Panglima Besar Jenderal Soedirman ketika memimpin perang gerilya dengan ditandu dari Yogyakarta berjalan kaki melalui Parangtritis menuju Panggang, Paliyan, Playen, Wonosari dan Semanu.

Di samping hutan jati, Kabupaten Gunungkidul memiliki tempat-tempat wisata yang menarik para turis dan dapat menambah penghasilan pemerintah daerah, juga masyarakat. Misalnya pantai Baron, Kukup, dan Krakal sering dikunjungi orang. Tempat-tempat yang indah ini pada masa revolusi fisik belum dijamah pembangunannya, karena semua kekuatan dikonsentrasikan untuk modal perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Saat itu negara kita relatif masih muda, maka wajar bahwa dana pembangunan daerah itu belum terjangkau.

Perekonomian yang morat-marit lebih-lebih pada masa pendudukan Jepang menyebabkan bangsa kita benar-benar menderita lahir batin. Belum pulih dari penderitaannya maka sampailah zaman baru kemerdekaan Indonesia. Walaupun perpindahan ke zaman yang merdeka itu tetapi rakyat Gunungkidul juga belum sempat meningkatkan hasil pertaniannya, karena

datangnya Belanda yang hendak menjajah kembali. Keadaan semacam ini juga mengganggu perekonomian dan kehidupan sehari-hari rakyat di pedesaan Gunungkidul.

Tanah yang kering dan tandus terbentang di seluruh kecamatan sehingga rata-rata penghasilan penduduk jauh dari cukup. Hal ini masih ditambah lagi bilamana hujan turun terlambat berarti membawa kegagalan pertanian mereka. Ladang yang hanya dapat ditanami setahun sekali itu kadang-kadang masih ada gangguan antara lain datangnya hama tikus yang sering menyerang tanam-tanaman di daerah tersebut.

Sekitar 50% penduduk Gunungkidul hidup dari tanah pertanian yang kurang dari 0,5 ha, dan bahkan banyak yang hanya memiliki tanah 1000–2000 m²¹⁷⁶ Walaupun penduduk Gunungkidul menanam padi gaga, namun beras yang dihasilkan itu tidak untuk dimakan sehari-hari tetapi mereka umumnya makan nasi itu hanya pada hari-hari besar. Misalnya pada Idul Fitri, Maulud Nabi, dan juga pada waktu ada acara bersih desa.¹⁷⁷ Pada hari-hari biasa mereka makan nasi gaplek, walaupun di rumah ada juga beras atau padi.

Mengingat hasil pertaniannya tidak mencukupi untuk menopang kebutuhan hidup, maka di samping pertanian mereka ada juga yang berdagang, berternak lembu dan kambing, dan juga ada sebagian kecil yang menjadi pegawai pemerintah. Peternakan lembu yang diusahakan penduduk ternyata memiliki makna ganda. Di samping hasilnya dijual ke kota-kota, juga kotorannya dijadikan pupuk tanaman sehingga dengan harapan dapat meningkatkan produksinya.

Masyarakat Gunungkidul hidup dalam alam pedesaan. Hubungan mereka satu sama lain dalam suasana rukun dan terbina hidup bergotong royong. Mereka saling tolong-menolong secara sadar dengan tanpa diminta. Umumnya masyarakat pedesaan seperti di Gunungkidul ini kepedulian sosialnya tinggi. Pekerjaan dan kerepotan tetangganya dianggapnya juga menjadi kewajiban untuk menyelesaikannya. Hal ini tampak dalam me-

ngerjakan ladang. Mereka datang membantu ikut mengerjakan secara *sambatan*. Dengan *sambatan* ini mereka tidak mengharapkan imbalan uang. Walaupun uang mereka perlukan untuk keperluan hidupnya, namun uang tidaklah semata-mata menjadi tujuannya.

Sambatan mendirikan rumah umumnya berjalan dengan baik dalam kehidupan masyarakat pedesaan Gunungkidul pada awal revolusi fisik dan waktu-waktu selanjutnya. Mereka ber-tandang membantu mendirikan rumah dengan tenaganya, namun di samping itu juga dibawa bantuan berupa kebutuhan sayur, kelapa, tempe, beras dan sebagainya. Hal gotong royong ini juga masih tampak jelas pada acara peralatan, mengunjungi orang yang sedang sakit dan membantu saat mendapat musibah.

Sikap rukun dan gotong royong tampak secara kompak saat awal proklamasi kemerdekaan. Pada masa itu setiap warga negara tanpa memandang perbedaan paham dan golongan secara bersama-sama memiliki tujuan satu ialah Indonesia merdeka. Namun dalam perkembangan selanjutnya setelah munculnya kepartaian dan bangsa kita terwadahi dalam kotak-kotak organisasi, maka nilai sosial dan gotong royong ini mulai memudar. Lebih-lebih masyarakat pedesaan yang murni dan kurang pengertian serta pengetahuan itu kadang-kadang dibingungkan akibat adanya provokasi-provokasi yang tidak sehat yang selalu dihembuskan oleh golongan Marxisme. Golongan ini selalu mengadudomba satu dengan lainnya baik perorangan maupun organisasi, sehingga timbul suatu keretakan. Dalam kondisi yang kurang baik itu maka orang mudah dibawa dan dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak pada tempatnya. Rakyat miskin selalu diiming-imingi dan dicekoki agar timbul tidak senang terhadap orang-orang yang berada, walaupun hal ini merupakan hasil prestasi kerjanya sendiri. Mengail dalam air keruh dan mengipasi suasana panas akan memudahkan mereka menyusupkan ideologinya. Oleh karena itu rasa persatuan dan kesatuan yang tumbuh dengan baik dan meliputi kehidupan masyarakat pedesaan di Gunungkidul walaupun selalu didorong dan di-

desak oleh kaum Marxis akhirnya tegar kembali dengan diketahuinya itu dalam pemberontakan PKI Muso di Madiun 1948.

Kesadaran dan keyakinan bahwa perpecahan antargolongan bertentangan dengan sifat kehidupan di pedesaan yang menginginkan hidup damai, tenteram dan bergotongroyong penuh persaudaraan itu, maka dalam menghadapi Belanda tahun 1948 – 1949 sematang itu bangkit kembali. Itulah kondisi kehidupan sosial kemasyarakatan rakyat Gunungkidul yang cinta persatuan dan kesatuan dan ingin mempertahankan Republik Proklamasi 1945.

2.4.3.2 Timbulnya Kelaskaran

Pada awal revolusi fisik kehidupan politik pada masyarakat pedesaan di Kabupaten Gunungkidul belum begitu tampak, sehingga hubungan mereka satu dengan lainnya merupakan satu kesatuan. Hidup yang menyatu itu tampak jelas saat mereka menerima berita proklamasi negaranya. Mereka tanpa memikirkan kelompok maka bersama-sama memikirkan tugas berat menghadapi musuh yang hendak menghancurkan Republik Indonesia. Waktu itu organisasi-organisasi perjuangan belum menampakkan diri identitasnya. Dengan adanya kenyataan ini merupakan suatu keuntungan besar dalam perjuangan menghadapi Belanda. Sikap yang demikian itu merupakan modal dan kekuatan besar untuk menghadapi keadaan yang kurang menentu dan kacau. Mereka berdiri sama tinggi dalam satu sikap melawan musuh. Mereka belum membedakan golongan dan aliran tetapi hanya merupakan pembela tanah air.

Setelah proklamasi kemerdekaan, di Gunungkidul muncul laskar-laskar perjuangan. Para pemuda bergabung dalam Barisan Pelopor, Barisan Benteng, Suang Tai, Sureng Kurenso, Sureng Kuren Tai, *Keibodan* secara bersama-sama menyusun kekuatan sebagai barisan perjuangan. R. Aryono, S. Hadisumarto, dan Sugaib serta pemuda-pemuda lainnya mengambil alih keamanan Kota Wonosari termasuk mengibarkan Sang Merah Putih di ha-

laman kabupaten yang diikuti oleh pemuda-pemuda.¹⁷⁸ Pengambilalihan kekuasaan itu mempunyai makna yang luas. Selanjutnya pada malam hari diadakan jaga malam dijadwalkan kepada pemuda-pemuda. Bilamana malam hari ada orang-orang yang dicurigai, maka mereka ditangkap dan diusutnya. Penangkapan itu termasuk para pelacur. Setelah diadakan pemeriksaan seperlunya dan ternyata tidak terdapat indikasi mata-mata mereka dilepas. Pemeriksaan ini dilakukan di kabupaten.

Berita proklamasi yang diterima di Gunungkidul membangkitkan semangat mereka untuk secepatnya mengenyahkan kaum penjajah dari tanah air Indonesia. Gabungan pemuda-pemuda yang menamakan dirinya Promotor Pemuda Nasional (PPN) telah bersiap diri menghadapi kemungkinan.¹⁷⁹ Promotor Pemuda Nasional itu di bawah pimpinan K. Aryono, S. Hadisumarto, dan Sugaib berkumpul di gedung DPR Wonosari sekarang yang dahulu diduduki Jepang, setelah gedung itu ditinggalkan lalu didudukinya. Dalam situasi yang penting itu keamanan kota dan daerah-daerah diatur sedemikian rupa, sehingga pemuda dan pamong praja diadakan koordinasi dalam menghadapi keadaan yang sangat genting itu. Saat itu penjagaan di pedesaan pengaturannya diserahkan kepada asisten wedana.

Perlu dicatat pula para bupati Gunungkidul yang berperan dalam bidang pemerintahan secara berturut-turut dalam masa revolusi itu sebagai berikut :

- (1) KRT. Dirdjodiningrat, sebagai bupati kepala daerah (bupati pamong praja), bekas wedana Godean.
- (2) KRT. Suryaningrat, sebagai bupati anom, bekas wedana semanu.
- (3) RW. Projosuwandi, bekas penewu pamong praja Tugu Yogyakarta Utara sebagai wedana ekonomi.
- (4) RP. Projopuspito, bekas penewu pamong praja Semin, sebagai penewu dipertahankan bupati kepala daerah.

(5) RP. Projopawiro, sebagai sekretaris kabupaten.¹⁸⁰

Bupati bersama pembantu-pembantunya itu selaku penggerak melalui bidang pemerintahan. Namun berita akan adanya pertempuran Kotabaru melawan Jepang telah membangkitkan semangat pemuda Gunungkidul, karena itu para tokoh pemuda menghadap bupati anom agar mereka diizinkan membantu pertempuran di Kotabaru itu. Mereka secara bulat menyatakan kehendaknya, dan mohon agar di Gunungkidul segera dibentuk barisan di bawah pimpinan Sarjono (kemudian brigjen purnawirawan, dan Widodo, jenderal purnawirawan). Keduanya setelah dihubungi menyatakan bersedia memimpin barisan yang akan dikirim ke Yogyakarta.

Setelah itu di Gunungkidul dibentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. BKR ini terdiri atas bekas Peta, Keibodan dan Seinendan. Dengan terbentuknya BKR maka Promotor Pemuda Nasional melebur diri.

Pada 8 -- 9 November 1945 di Senisono Yogyakarta diadakan rapat pemuda dari berbagai kelompok dan tempat, dan tidak ketinggalan juga datang pemuda-pemuda dari Gunungkidul dalam pertemuan itu. Rapat membicarakan sikap menghadapi situasi yang penting, yaitu ancaman pihak Sekutu untuk membumihanguskan dan menghancurkan Surabaya. Mereka tidak mengikuti pertempuran di Surabaya seperti pemuda yang lain.

Di samping Badan Keamanan Rakyat di Gunungkidul juga dibentuk Komite Nasional Indonesia (KNI). S. Hadisumarto yang kemudian menjabat seksi keamanan yang diberi kepercayaan turut membidani lahirnya BKR di Kabupaten Gunungkidul. Hadnyadijaya dari sipil terpilih sebagai ketua, sedang sekretarisnya Werdaya.¹⁸¹

Setelah terbentuk KNI, gerak langkah organisasi itu meneruskan keputusan atau perintah apa saja dari pemerintah DIY. Bilamana ada keputusan KNI dari DIY maka diteruskan ke kabupaten dan juga sampai ke kecamatan-kecamatan. Saat itu

di kecamatan terdapat lembaga bernama Gabungan Dewan Kalurahan (GDK). Di samping itu di kecamatan juga ada jawatan-jawatan yang bertugas membantu jalannya pemerintahan.¹⁸²

Perlu diutarakan bahwa dengan dibukanya pendaftaran menjadi anggota BKR maka berbondong-bondong pemuda yang merasa berbadan sehat serta memiliki minat dan keberanian. Saat itu sebagai anggota BKR belum mendapat fasilitas apa-apa kecuali bila mereka sedang di lapangan diberi makan sedaranya. Umumnya mereka telah tergabung dalam Barisan Banteng, Barisan Pelopor, Sureng Kurenso, Sureng Tai yang selanjutnya menjadi Batalyon I.

Setelah berbentuk BKR timbullah suatu masalah mengenai suplai bahan makan yang diperlukan untuk para pejuang di garis depan, karena saat itu belum ada jaminan dari pemerintah. Mereka kemudian menghadap ke kabupaten untuk membantu suplai tersebut. Untuk dapat memenuhi permintaan itu maka dibentuk staf terdiri atas RW. Projosuwandi, RP. Projopuspito, dan sekretarisnya R. Bejo. Dengan seizin bupati staf tersebut dipimpin oleh bupati anom. Selanjutnya diadakan gerakan pengumpulan bahan. Oleh karena itu semua penewu dan stafnya diminta mencari bantuan untuk mendukung BKR. Apa saja yang diberikan rakyat diterima dengan baik. Saat itu dari Kewedanaan Semanu disediakan bantuan padi yang merupakan hasil pengumpulan pada masa pendudukan bala tentara Jepang di daerah itu. Berkat bantuan badan usaha ini ternyata besar artinya guna mendukung kekuatan BKR. Setiap dua minggu sekali dari Gunungkidul dikirim satu atau dua truk bahan bantuan ke kota Yogyakarta.

Setelah BKR berjalan secara baik maka pada 5 November 1945 menjelma menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau disingkat TKR. Pada suatu ketika terjadilah kericuhan berkaitan dengan bahan makanan yang disimpan di kabupaten, namun hal itu segera dapat diselesaikan dengan baik.¹⁸³ Untuk itu demi keamanan di kabupaten diadakan piket jaga dari segenap staf kabupaten. Dengan adanya penerbitan itu maka selamatlah

bahan suplai itu. Hal ini berlanjut sampai digantinya TKR menjadi TRI yaitu Tentara Republik Indonesia. Sejak 5 Oktober 1945 kebutuhan suplai bahan makanan tanggungjawab pemerintah.

Walau tugas khusus mencari bantuan telah selesai tetapi staf khusus terutama pimpinannya masih diminta bersedia menjadi penasihat Batalyon Sarjono. Selanjutnya melalui pemerintah kabupaten terus berusaha mendengung-dengungkan serta meresapkan jiwa merdeka dengan memekikkan *merdeka* setiap mereka bertemu di mana pun. Dengan jalan ini jiwa perjuangan menggelora terus dari kota sampai di desa-desa. Untuk keperluan itu kepada rakyat dibagi-bagikan bendera merah putih kecil dan juga lencana merah putih.¹⁸

Sementara itu Laskar Rakyat Mataram dan pendemokrasian pemerintah berkembang juga di Kabupaten Gunungkidul yaitu dengan terbentuknya Komite Nasional Indonesia sebagaimana telah disebutkan di muka, bahkan sebelum BKR menjelma menjadi TKR di Wonosari dibentuk sebuah lembaga Inspektorat Biro Perjuangan.¹⁸⁵ Lembaga ini dipimpin oleh S. Radisumarto, namun lembaga ini tidak berusia lama karena diganti dengan Laskar Rakyat. Hal ini berdasarkan maklumat 26 November 1945 Nomor 5/1945. Komandan Laskar Rakyat ialah S. Hadisumarto, sedang wakilnya RP. Projopuspito.

Waktu itu laskar rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta ada lima Divisi.¹⁸⁶ Laskar Rakyat yang berada di Gunungkidul diberi nama Divisi Tidar, yang selanjutnya pada tahun 1946 dilikuidasi menjadi Tentara Keamanan Rakyat, karena itu untuk menyatukan kekuatan perjuangan maka laskar rakyat itu dibentuk sampai tingkat kecamatan dan dibuat Resimen Laskar Rakyat.

Berdasarkan maklumat 26 November 1945 yang merupakan perintah dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX, maka di setiap kecamatan ada empat batalyon, sedang dalam satu kabupaten satu divisi. Jumlah laskar rakyat yang ada di Gunungkidul pada

waktu itu lebih-kurang 62 ribu orang terdiri atas pemuda-pemuda dan rakyat umum.¹⁸⁷ Penyematan Laskar Rakyat Gunungkidul dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX.¹⁸⁸ Beliau adalah pelopor yang mempunyai pemikiran dibentuknya Laskar Rakyat.

Mengenai pemilihan pengurus laskar rakyat tersebut tidak dilakukan secara tunjukan tetapi dengan cara pilihan. Jadi cara-cara demokrasi telah dikembangkan dalam pemilihan komandan Laskar Rakyat di daerah ini. Waktu itu diajukan dua orang calon ialah S. Hadisumarto dan Istiajid, kemudian S. Hadisumarto terpilih sebagai komandannya. Sebagai pimpinan/ketua dewan kabupaten ialah bupati. Di atas divisi dalam susunan lembaga perjuangan itu disebut hulubalang atau panglima yang saat itu untuk daerah istimewa dipimpin oleh Muhammad Yen kepala Polisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tujuan pembentukan Laskar Rakyat adalah (a) mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta; (b) Mempertahankan daerah/kampung/desa terhadap musuh; (c) menjaga daerah kampung/desa; (d) membantu rakyat yang membutuhkan tenaga dengan jumlah besar dan teratur.

Persyaratan memasuki anggota laskar rakyat sebagaimana telah disebut di muka bahwa dasarnya suka rela, semua penduduk laki-laki yang masih kuat badannya dan belum menjadi anggota TKR. Semua kepala barisan di kecamatan-kecamatan/kemantren/pangrehpraja bertugas merundingkan dan mengatur segala kepentingan bersama-sama penewu atau mantri pamong praja. Dalam pada itu wakil KNI dan TKR turut duduk dalam dewan tersebut. Mengenai pimpinan barisan dipilih di antara anggota Laskar Rakyat, Pangreh Paraja, KNI, lurah dan para pegawai lain tidak boleh mencampuri.

Tugas Laskar Rakyat ialah pertahanan, sehingga telah mengambil langkah mengadakan latihan perang-perangan untuk

menyiapkan diri sewaktu-waktu apabila mereka terjun di medan pertempuran telah memiliki ketrampilan dan kemampuan menangkis dan membela tanah diri dari bahaya yang datang dari musuh. Untuk itu mereka digerakkan dalam latihan besar-besaran di Yogyakarta bagian selatan yang dipimpin oleh Mayor Sarjojo dan S. Hadisumarto.¹⁸⁹

Di dalam kelaskaran, bupati adalah ketua dewan, sedang wakilnya ialah Wedana Prodjosuwandi yaitu wedana kabupaten. Untuk kelancaran tugas diadakan pembagian secara rinci antara satu dengan lainnya. Untuk itu ketua dewan yang dibantu wakilnya bertugas menyiapkan segala kebutuhan dari pemerintah. Untuk memudahkan komunikasi secara mudah dan cepat, Kantor Divisi Laskar Rakyat waktu itu berada di kabupaten sehingga hubungan antarlembaga atas dan bawah lancar. Untuk efektivitas kerja, di setiap kecamatan dibentuk Resimen Laskar Rakyat. Meskipun di Kabupaten Gunungkidul terdapat 13 Resimen Laskar Mataram termasuk di Kecamatan Ngawen yang waktu itu merupakan daerah *enclave*, tetapi juga telah dibentuk Laskar Rakyat. Semua tenaga perjuangan yaitu orang-orang yang kuat badannya dimobilisasi dalam Laskar Rakyat.

Adapun segala keperluan yang bersangkutan dengan anggaran Laskar Rakyat dicukupi dengan uang Rukun Kampung dan diperbolehkan mencari jalan istimewa untuk mengumpulkan uang dan bahan-bahan, tetapi dengan mengingat kemampuan masyarakat setempat. Untuk itu Laskar Rakyat diupayakan memiliki segala macam senjata. Latihan kemiliterannya diserahkan kepada TKR, sedang dalam memberikan bimbingan kepala barisan senantiasa berhubungan dengan ketentuan Ketua Rukun Kampung atau Rukun Desa Pangreh Praja. Semua pegawai negeri harus aktif bersama Laskar rakyat di tempat masing-masing. Kepala daerah pangreh paraja menjadi pelindungnya dan turut bertanggungjawab atas segala hal yang berhubungan dengan Laskar Rakyat.

Pada bulan Desember 1945 peraturan mengenai pembentuk-

an Laskar Rakyat mengalami perubahan antara lain sebagai berikut. Semua penduduk laki-laki bangsa Indonesia yang masih kuat badannya wajib menjadi laskar rakyat, kecuali TKR, anggota Hisbullah, Kepala Daerah Pangreh Praja paling banyak tiga orang pegawai yang ditunjuk. Lurah, carik, ketua Rukun Kampung, pegawai jawatan atau perusahaan untuk menjaga dan menjalankan pekerjaan di kantor, pabrik dan lain-lain. Badan-badan perjuangan dan orang-orang yang karena kewajibannya dikecualikan menurut keputusan badan pimpinan Laskar Rakyat. Penduduk laki-laki yang umurnya kurang dari 15 tahun dimasukkan ke dalam kepanduan. Selanjutnya Laskar Rakyat di tingkat kepanewon menentukan dewan pimpinannya terdiri atas kepala resimen, para kepala batalyon, para kepala kompi, wakil TKR, panewu/mantri pamong praja, wakil KNI, PMI, Perwani, dan para kepala Rukun Kampung.

Adapun di tingkat kabupaten dibentuk Dewan Pimpinan Laskar Kabupaten yang terdiri atas dua orang Dewan Pimpinan Laskar Kapanewon, dan dua orang wakil TKR, seorang wakil Pamong Praja, seorang wakil KNI, seorang wakil PMI dan seorang wakil Perwani. Semua Laskar Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk yang ada di Gunungkidul berada di bawah pimpinan pusat yang berada di Yogyakarta.

Mengenai hubungan Laskar Rakyat dengan badan-badan perjuangan lain di luar daerah dikoordinasikan oleh pihak militer. Sewaktu di perlukan bantuan untuk menyerang Ambarawa dan Srandol Semarang, dari Gunungkidul juga ikut dikirim ke tempat-tempat pertempuran tersebut. Dengan demikian antara Laskar Rakyat dan militer merupakan partner yang selalu berdampingan di mana pun diperlukan. Laskar Rakyat selalu bersiap diri membantu militer dan juga berada di tengah-tengah rakyat. Laskar Rakyat Gunungkidul waktu itu aktif menjaga pantai selatan dari serangan musuh.

Pada awalnya laskar ini masih murni belum mendapat pengaruh dari mana pun. Baru dalam perkembangan selanjutnya

pengaruh dari *Pesindo* tidak dapat terelakkan lagi. Mereka melontarkan tuduhan bahwa S. Hadisumarto dan kawan-kawannya ingin mengembalikan pemerintahan ke dalam feodalisme. S. Hadisumarto sering menghadap Sri Sultan Hamengku Buwono IX di Keraton Yogyakarta untuk membicarakan tentang kelaskaran tersebut.

Sebagai rasa kecurigaan terhadap kegiatan yang dilakukan selama ini, kaum sosialis yang berkembang di Kabupaten Gunungkidul berusaha menculik S. Hadisumarto dan ditempatkan di Gedung DPR sekarang. S. Hadisumarto dituduh orang yang disangsikan kesetiaannya kepada Republik. Itulah dalih yang dilontarkan kaum sosialis dalam rangka mengadudomba satu dengan lainnya.

2.4.3.3 Perjuangan Melalui Jalur Informal

Di samping perjuangan dengan melalui jalur formal yaitu badan-badan kelaskaran dan lembaga-lembaga resmi pemerintahan yang dibentuk setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, jalur perjuangan melalui olah kebatinan pun mempunyai makna yang besar artinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa sampai bulan November 1945 situasi negara dalam keadaan genting karena terancam musuh. Sehubungan dengan hal itu maka datanglah utusan Sri Sultan Hamengku Buwono IX ke Gunungkidul dengan membawa *titah* untuk mendaftari seluruh kiai yang ada di Gunungkidul. Selanjutnya pada 11 November 1945 para kiai tersebut supaya berkumpul di kabupaten. Setelah berkumpul semua maka pada 2 November 1945 para kiai tersebut diangkut ke Yogyakarta, berhubung dengan pecahnya pertempuran di Surabaya melawan Sekutu pada 10 November 1945. Menurut perintah Sri Sultan agar para kiai itu dikawal sendiri oleh KRT. Suryaningrat (bupati Among) ke Yogyakarta.

Pada 12 November 1945 sore, para kiai Gunungkidul yang seluruhnya berjumlah 28 orang termasuk pemimpinnya dibawa ke Ambarukmo. Waktu itu ada dua orang kiai yang tidak dapat

mengikuti ke Yogyakarta yaitu Kiai Slametan dari Karangmaja dan kiai dari Gedaren Ponjong. Sesampai di Yogyakarta para kiai tersebut diterima oleh BPH. Guntoro. Beliau lah yang membawa titah Sri Sultan. Adapun titah tersebut sebagai berikut: "Para kiai agar berjuang menurut jalan kebatinan, mohon kepada Tuhan Yang Mahaesa agar bangsa Indonesia dapat mencapai kemerdekaannya dan Republik Indonesia terus berlangsung".

Para kiai setelah sampai di Yogyakarta diasramakan selama kurang-lebih dua minggu. Setelah selesai melaksanakan tugasnya para kiai tersebut baru diperkenankan pulang ke daerahnya masing-masing. Sebagai pengganti para kiai Gunungkidul ialah para kiai dari Kabupaten Bantul dan Sleman.

Asrama kiai waktu itu ditempatkan di Istana Ambarukmo bagian timur. Di tempat ini Sri Sultan Hamengku Buwono IX didampingi BPH. Bintoro menyampaikan titahnya kepada para kiai dan apa saja yang harus mereka lakukan selama di asrama itu. Setelah selesai menyampaikan titah Sri Sultan bersama BPH. Bintoro meninggalkan Ambarukmo. Selanjutnya para kiai menyiapkan diri. KRT. Suryaningrat lalu menyusun staf terdiri atas lima orang termasuk kepala rombongan, sedangkan sisanya 23 orang dibagi menjadi tiga menurut alirannya masing-masing.

Setelah pembagian kelompok selesai, KRT. Suryaningrat memerintahkan kepada para kiai untuk segera melaksanakan titah Sri Sultan menurut caranya masing-masing. Untuk itu setiap pagi para kiai setelah melakukan tugas diwajibkan melapor apa yang telah diperolehnya pada malam hari itu. Jika mereka pada malam hari tidak ada atau belum menerima firasat dari Yang Mahakuasa, mereka tidak perlu memberikan laporannya. Setelah beberapa hari melaksanakan titah Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan berdasar laporan yang diterima KRT. Suryaningrat tugas para kiai dianggap telah cukup dan mohon diperkenankan menghadap Sri Sultan untuk melaporkan hasil pelaksanaan tugas para kiai. Sri Sultan menerima laporan

tersebut pada hari Jum'at 16 November 1945 di Gedung Wilis. Waktu menghadap Sri Sultan, KRT. Suryaningrat disertai Kiai Sastropratomo, pangarem-arem Kamituwa Playen.

Sri Sultan menganggap tugas para kiai telah cukup, rombongan kiai dari Gunungkidul sudah boleh pulang ke tempat tinggalnya. Bersamaan itu datang menghadap Sri Sultan Jenderal Oemar Joi mengajukan permohonan berhubung para kiai itu diminta bantuannya agar dapat membantu perjuangan di front, untuk menjadi tameng para pejuang bersenjata. Permohonan ini tidak seluruhnya dikabulkan, kecuali Kiai Sastropratomo agar mengikuti ke Jawa Timur, sedang lainnya diminta bekerja dengan olah kebatinan dan di garis belakang. Setelah selesai melapor para kiai diperkenankan kembali ke Ambarukmo untuk menjalankan tugas baru sebagaimana dititahkan Sri Sultan.

Untuk tugas yang kedua ini rombongan kiai lalu dibagi menjadi empat agar lebih kuat dalam mengarahkan tujuannya. Satu rombongan mohon agar pihak luar negeri terutama Amerika dan Rusia suka membantu perjuangan kita bangsa Indonesia; kedua agar kapal laut musuh tidak mencapai sasarnya, ketiga agar kapal udara musuh tidak mencapai sasarnya pula; keempat agar pemuda kita selalu berhasil sasaran penyerangannya. Sejak itu para pejuang kita senantiasa minta petunjuk dan atau saran dari rombongan kiai tersebut dan ternyata sesuai dengan tugas para kiai. Para kiai tersebut dalam usahanya menerima petunjuk dari Tuhan berupa petunjuk gaib antara lain dari mana pemuda itu harus menyerang musuh. Di samping itu dari mereka kadang-kadang diberi syarat-syarat oleh kiai sesuai dengan diterimanya. Dengan jalan demikian maka pemuda dari Gunungkidul yang bukan anggota TKR pun turut bertempur di mana saja mereka diperlukan. Dari Gunungkidul banyak juga dikirim ke Magelang, Banyubiru, Ambarukmo, Srandol, Surabaya dan lain-lainnya.

Pada 25 November 1945 rombongan kiai dari daerah Bantul dan Sleman di bawah pimpinan Kiai Moehdi dari

Krapyak. Tugas yang dibebankan kepada kiai dari Gunungkidul selanjutnya diserahkan rombongan kiai dari Kabupaten Bantul dan Sleman. Setelah selesai mengadakan serah terima rombongan kiai Gunungkidul menunggu jemputan kendaraan yang akan membawa pulang ke daerahnya, tetapi belum sampai rombongan itu berangkat tiba-tiba datang serangan udara dan musuh membom Kota Yogyakarta. Tidak lama kemudian datang utusan Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk menyampaikan titah beliau supaya kepulauan kiai dari Gunungkidul ditanggihkan.

2.4.3.4 Gunungkidul Saat Meletus PKI Musa Madiun

Pada saat meletus pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 Kabupaten Gunungkidul juga terkena imbasnya. Pada suatu hari sekitar pukul 17.00 tatkala bupati sedang menemui tamu dari Yogyakarta yaitu KRT. Purwokusumo, SH dan rombongan, masuklah kepala Polisi Wonosari, dan disusul oleh Sugaib dengan menarik revolver dengan tangannya gemetar tidak jadi-jadi. Margono, lurah Desa Nglora Paliyan yang akan mengayunkan pedang terhunus, tetapi lalu berdiri mematung saja; demikian juga Hadisukanto yang telah membawa panah dan akan dilepaskannya tetapi juga mematung saja, sedang di luar telah siap kurang lebih pemuda bersenjatakan *granggang* mengepung rumah Kabupaten Wonosari.¹⁹⁰

Dalam adegan yang demikian itu Sugaib menuntut supaya bupati memerintahkan kepada polisi melepaskan Istiajid yang ditahan oleh polisi. Setelah bupati memberi keterangan secukupnya tentang permasalahannya maka suasana ketegangan dapat diredakan dan pengepungan pemuda terhadap rumah kabupaten dibubarkan. Pemuda yang turut mengepung kabupaten akhirnya sadar bahwa diperalat dan tertipu oleh orang-orang PKI. Pengusutan Istiajid berkaitan dengan penggelapan uang koperasi di mana dia menjadi pengurusnya. Pengadilan Negeri Wonosari memutuskan vonis dihukum kepada yang terlibat. Semula mau naik banding, tetapi belum sampai berlanjut

meletuslah pemberontakan PKI Madiun, yang disambung dengan Clash II oleh Belanda.

Pada hari Senin malam 18 September 1948 kepala Polisi Wonosari memberitahukan kepada bupati Gunungkidul bahwa ia mendapat perintah dari Kepala Polisi Daerah Yogyakarta untuk menjalankan penangkapan pada orang-orang yang dicurigai berhubungan dengan kudeta di Madiun yang terjadi pada tanggal 18 September 1948. Setelah Kepala Polisi mengadakan perundingan dengan Bupati tentang orang-orang yang harus ditangkap lebih dahulu, mengingat alat-alat dan kekuatan yang ada, serta mengingat pula letak rumah orang-orang yang harus ditangkap lebih dahulu, mengingat alat-alat dan kekuatan yang ada, serta mengingat pula letak rumah orang-orang yang harus ditangkap, maka malam itu juga terus dijalankan penangkapan oleh Polisi Wonosari dan dibantu tentara terhadap orang-orang yang dianggap berbahaya.

Menurut dokumen yang diketahui di rumah Istiajit, direncanakan 23 September 1948 PKI akan merebut kekuasaan di Wonosari, 24 September 1948 di Pracimantoro, 26 September 1948 Bantul, tanggal 27 September 1948 Sleman, lalu setelah itu dkonsentrasikan untuk merebut kota Yogyakarta. Selanjutnya BTI telah merencanakan pada hari Sabtu tanggal 25 September 1948 akan mengadakan rapat raksasa di alun-alun Wonosari yang akan dikunjungi oleh rakyat tani dengan pemudanya yang diperintahkan supaya membawa segala macam senjata yang ada dan akan dipimpin oleh Istiajit untuk mengadakan demonstrasi. Rencana tersebut dapat dicegah karena dengan ditangkapnya Istiajit pada malam tanggal 19 September 1948. Orang-orang yang waktu itu bertanggungjawab mengadakan rapat raksasa menjadi kebingungan untuk mencabut perintah rapat raksasa yang telah tersebar luas itu.

Pada tanggal 22 September 1948 terdengar berita bahwa pada tanggal 24 September 1948 rumah Jamaah Patuk akan diserbu, dan pada malamnya keadaan di Semanu menjadi genting, tetapi berkat kecekatan pihak Kepolisian segalanya dapat

dicegah dengan selamat. Selanjutnya tanggal 23 September 1948 didapat berita dengan telepon dari Baran bahwa pada tanggal 21 September 1948 daerah Sukoharjo dan Wonosari telah diduduki oleh Pemerintah Tentara Rakyat (Musu), berturut-turut Wuryantoro tanggal 22 September 1948, Baturetno tanggal 23 September 1948, dan Pracimantoro tanggal 24 September 1948.

Di Pracimantoro kelihatan musuh dengan kekuatan tentara bersenjata 40 orang mempunyai dua buah truk yang pada tanggal 25 September 1948 ditambah lagi dengan 20 orang, sehingga di Pracimantoro ada kekuatan 60 orang bersenjata lengkap, dan merupakan ancaman bagi daerah Gunungkidul yang sedang menjalankan pembersihan ke dalam, sedang kekuatan tentara dan polisi waktu itu belum cukup sama sekali untuk menghadapinya. Di sana hanya ada satu seksi kecil tentara dan satu seksi polisi yang bersenjata. Berhubung waktu itu bantuan dari Yogyakarta tidak segera datang, maka hanya dapat menjalankan provokasi ke daerah Pracimantoro, dan berkat Tuhan Yang Mahaesa berhasil, sehingga musuh yang semula akan mengadakan penyerbuan ke Wonosari menurut skema yang terdapat, mereka menjadi ragu-ragu dan mengadakan persiapan untuk bertahan.

Pada 27 September 1948 ada penyelidikan musuh dengan naik mobil bersama dua orang bersenjata lengkap dari Pracimantoro menuju Baran ke arah Wonosari juga. Setelah sampai di muka kepolisian mereka ditangkap di Wonosari, mobilnya dapat disita, sedang penyelediknya segera dikirim ke Yogyakarta untuk diurus lebih lanjut oleh pihak militer.

Keadaan terus menghangat, sedangkan bantuan yang ditunggu dari Yogyakarta tidak datang juga. Untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi maka rakyat yang dipersenjatai apa adanya dengan didukung oleh orang-orang yang mampu dan suka rela saja. Pada tanggal 30 September 1948 datang Sri Paduka Paku Alam VIII dengan pengiringnya meninjau keadaan Gunungkidul, sehingga dengan demikian beliau secara langsung

dapat menyaksikan sendiri situasi di Gunungkidul dan sekitarnya. Beliau berada di Gunungkidul sampai dengan tanggal 2 Oktober 1948, sebab waktu beliau tiba di Semin lalu ada perintah dari Sri Sultan supaya beliau segera kembali ke Yogyakarta. Penewu (camat) Semin pada waktu itu adalah lurah Wiladeg yang diangkat sebagai percobaan menjalankan tugas Panewu.

Pada tanggal 1 Oktober 1948 siang didapat kabar dari Semin bahwa di sebelah utara Semin terjadi pertempuran antara tentara hirjah dengan pengacau, dan sore harinya didapat kabar bahwa Manyaran di timur Semin ada kekuatan Tentara Rakyat (PKI Musa) satu kompi dan laskar campuran kurang lebih 800 orang, disusul oleh laporan dari Nglipar yang menerangkan bahwa Penewu Nglipar yang pada waktu akan menghadiri rapat di Kelurahan Tegalrejo diserobot oleh Pemuda Rakyat dari Klaten di bawah pimpinan Kariyosudarmo bekas kepala Jawatan Keamanan Nglipar yang melarikan diri pada waktu diadakan penangkapan para pemimpin Front Demokrasi Rakyat (FDR) dari PKI oleh Kepolisian Wonosari.

Berhubung adanya peristiwa ini maka anggota kepolisian yang masih terbatas itu dikirim 10 orang ke Nglipar menjaga keamanan dan ketertiban, sedang mantri Kabupaten Wonosari waktu itu juga dikirim untuk menjelaskan tugas Penewu Nglipar. Peristiwa sebagaimana terjadi di Nglipar juga dialami di tempat lain. Pada tanggal 2 Oktober 1948 Asisten Wedono Manyaran Semin diserobot, sedang di Ponjong Penewu dengan juru tulisnya serta beberapa pegawai lainnya diculik kaum pengacau. Untuk itu segera dikirim bantuan polisi mengatasi keadaan di Ponjong tersebut.

Pertempuran seru antara kaum pemberontak dengan pasukan MA di Pracimantoro di mana kekuasaan tentara pengacau tersebut berkekuatan kurang lebih 400 orang, sedang di pihak pemerintah tidak seimbang dengan mereka. Oleh karena itu diatur siasat mundur sampai di Semanu karena ada kekhawatiran diputus musuh di Bedoyo. Dalam pertempuran ini kedua belah pihak jatuh korban, seorang MA gugur, sedang pihak mu-

suh 3 orang. Sejak itulah perhatian dari Yogyakarta semakin besar, dan dikirim tentara serta polisi terus mengalir. Penculikan terhadap Penewu Nglipar berkat kegesitan alat negara dan mendapat bantuan rakyat dapat meloloskan diri dari tahanan mereka. Daerah-daerah yang telah dikuasai oleh kaum pengacau dapat direbut kembali.

Peristiwa yang kaitannya dengan pemberontakan PKI di berbagai tempat silih berganti. Baran suatu daerah ujung tenggara Wonosari dan berbatasan dengan Wonogiri menjadi genting, sehingga hal itu mengharuskan pengiriman bantuan polisi dan tentara dari Yogyakarta ke daerah tersebut. Semanu dijadikan markas pertahanan, demikian juga pasukan kita ditempatkan di Ngenep, sedang kekuatan yang lebih besar lagi ditempatkan di Semin. Berita lolosnya penewu Ponjong dari sekapan pengacau bersamaan pegawai-pegawainya membuat gembira penduduk wilayah setempat. Namun di Kabupaten Wonosari didatangi para pengungsi dari Pracimantoro dan Giritontro.

Dengan adanya berita pertumpahan darah di Kabupaten Gunungkidul, maka pada tanggal 7 Oktober 1948 Sri Sultan datang ke Wonosari. Setelah bupati menyampaikan laporan, secara lisan Sri Sultan memerintahkan sebagai berikut :

- (1) Bupati diberi kekuasaan penuh untuk memilih dan mengisi semua lowongan pegawai sampai pangkat panewu dan langsung bertugas, sedang surat keputusannya menyusul.
- (2) Daerah Surakarta yang terputus hubungannya dengan pusatnya supaya terus dipimpin untuk sementara dan dijamin pegawainya.¹⁹²

Berkat kerjasama yang baik antara pihak kepolisian, tentara dan rakyat maka kaum pemberontak dari berbagai daerah dapat dipatahkan. Wuryantoro, Pracimantoro, Baturetno, yang selalu menjadi sasaran pemberontak akhirnya dikuasai sehingga kaum pengacau dihalau menuju Pacitan. Sedang penangkapan terhadap orang-orang yang dipandang membahayakan berjalan

terus. Bantuan dari Yogyakarta sejumlah 250 orang kekuatan angkatan bersenjata dan 12 orang mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di datangkan ke Gunungkidul. Dalam upaya penangkapan terhadap tokoh PKI ada juga yang dapat meloloskan diri dari kejaran tentara kita.

2.4.3.5 Akibat Pemberontakan PKI

Akibat pemberontakan PKI Muso yang berpusat di Madiun itu, Kabupaten Gunungkidul yang juga menjadi daerah pengaruh Front Demokrasi Rakyat suatu organisasi yang berbau komunis itu akhirnya mengalami kerugian besar di kalangan pegawai.

Dilaksanakanlah perubahan di kalangan Pamong Praja. Pembentukan Datasemen Polisi Pamong Praja di setiap kecamatan diperintahkan supaya sudah terbentuk tanggal 1 Desember 1948. Namun hal itu mengalami kesulitan yang besar tentang penempatan tenaga dan jaminannya, sehingga terpaksa mundur dan baru terlaksana pada tanggal 1 Januari 1949. Kekuatan angkatan bersenjata yang telah melaksanakan tugasnya mengamankan Gunungkidul dari ancaman PKI telah ditarik kembali ke kesatuannya.

Keadaan ekonomi akibat kekacauan yang didalangi PKI itu membawa ke suasana kocar-kacir. Beras boleh dikata tidak ada, karena dikuras waktu terjadi aksi PKI Muso. Jawatan PPBM (Pengumpulan dan Pembagian Bahan Makan) ternyata tidak ada gunanya, bahkan sering menimbulkan kegelisahan. Dalam waktu panen PPBM ternyata hanya dapat mengumpulkan gapplek kurang lebih 150 ton dengan harga di atas umum, yaitu Rp. 1.500 per ton, sedang harga pasaran paling tinggi Rp. 1.400,—.¹⁹³

Sehubungan dengan hal-hal tersebut dan mengingat bahwa Gunungkidul penting untuk rakyat yaitu perlunya ada tandon gapplek sebagai persediaan musim paceklik yang menimpa masyarakat setempat dalam bulan Desember, Januari, Pebruari serta bulan Maret bahkan kadang-kadang sampai dengan bulan April, maka Bupati sebagai Kepala Daerah dan Ketua MPK (Markas Pertahanan dan keamanan) memberi penerangan ke-

pada para pengusaha dagang Tionghoa dan Indonesia supaya mereka suka mengadakan tandon gaplek untuk kepentingan rakyat yang akan diberi izin oleh Bupati. Anjuran ini mendapat tanggapan baik dan sampai akhir bulan Agustus 1948 dapat terkumpul seluruhnya \pm 2.000 ton gaplek. Kemudian keluarlah maklumat nomor 29 Jawatan PPBM. Berdasarkan maklumat tersebut PPBM menjadi jawatan yang berkuasa terhadap masalah bahan makanan. Untuk menghimpun bahan makan di Gunungkidul semua usaha yang bergerak dalam bidang itu harus mendaftarkan diri di PPBM. Dengan cara demikian itu Pemerintah dapat mengawasi sepenuhnya, dan bilamana ada keperluan lain dapat ditinjau kembali, misalnya ada serbuan mendadak dari Belanda ke Gunungkidul. Sehubungan pengaruh PKI masih menjiwai petugas PPBM maka seharusnya tandon gaplek berjumlah 2.000 ton, tetapi menjadi berkurang 835 ton.

Di samping mengadakan usaha tandon gaplek, maka dengan jalan mengadakan penerangan rakyat digerakkan memperhebat penanaman ketela pohon, dan jagung. Oleh karena itu pada bulan Desember 1948 di Gunungkidul terdapat tanaman ketela pohon seluas 36.000 ha dan jagung 20.000 ha yang merata di seluruh wilayah kecamatan/kepanewon, sedang tahun sebelumnya hanya ada 28.000 ha dan 12.000 ha. Dengan demikian tandon bahan makan yang terpendam cukup menggembirakan.

2.4.3.6 Penyerbuan Belanda ke Gunungkidul

Pada tanggal 19 Desember 1948 sekitar pukul 06.45 dengan mendadak Belanda melancarkan agresi kolonial terhadap ibu kota Republik. Agar supaya pemerintah tidak jatuh ke tangan musuh, maka Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta memutuskan memindahkan kekuasaannya kepada Mr. Sjafrudin Prawiranegara yang saat itu berada di Sumatera untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukittinggi. Adapun materi-materi negara lainnya keluar Kota Yogyakarta untuk melanjutkan perlawanan dengan Belanda. Mereka itu yang menyingkir ke Kabupaten Gunungkidul adalah Menteri

I.J. Kasimo, Supeno, Leimena, Susanto Tirtoprojo.¹⁹⁴

Pada waktu itu Sri Sultan Hamengku Buwono IX telah memerintah kepada Honggowongso untuk mempersiapkan Gunungkidul khususnya Wonosari sebagai daerah pengungsian, dan secara kebetulan pula oleh Pemerintah Republik Indonesia telah diputuskan untuk mengungsikan pemerintahan dan pasukan bersenjata ke luar Kota Yogyakarta.¹⁹⁵ Pasukan itu dipimpin Panglima Jenderal Soedirman telah menuju ke arah timur sampai Wonosari. Perjalanan memimpin gerilya ini beliau lakukan setelah membakar dokumen-dokumen agar jangan sampai jatuh ke tangan musuh. Kira-kira pukul 11.30 Pak Dirman berangkat meninggalkan Bintaran menuju kadipaten melalui Mergangsari, Gading dan Alun-alun selatan. Di sini beliau beristirahat selama satu jam dan kira-kira jam 14.00 Kolonel Abdul Latif komandan KMK Yogyakarta datang dan melaporkan bahwa Belanda sudah menyerbu dan masuk kota. Beliau disarankan segera keluar kota untuk menghindarkan diri dari penangkapan Belanda. Oleh karena itu dalam kondisi yang masih sakit beliau pergi meninggalkan Kota Yogyakarta menuju ke arah timur melalui Wonosari sebagaimana disebut di muka.

Untuk menghadapi serangan Belanda itu Panglima Komando Jawa Kolonel AH. Nasution menyusun konsep bahwa seluruh rakyat harus terlibat dalam perang melawan Belanda. Mereka dibagi-bagi menurut bidangnya masing-masing yang merata di segala lapangan.

Mengenai pendaratan Belanda ke Gunungkidul waktu itu dari dua arah yaitu dari timur melalui Eromoko. Di samping itu Belanda juga melakukan pendaratan lewat lapangan kapal terbang Gading. Pada tanggal 19 Desember 1948 daerah Gunungkidul terutama Gading dan sekitarnya mulai 06.00 mendapat serangan dari udara dan yang membawa korban 5 orang tewas dan 2 orang luka-luka. Dengan adanya peristiwa yang mendadak itu maka dari kabupaten terus mengadakan hubungan dengan Yogyakarta via telepon yang memperoleh keterangan bahwa Kota Yogyakarta mendapat serangan Belanda terus-

menerus. Waktu itu hubungan telepon dengan Yogyakarta hanya dapat berjalan selama satu jam setelah itu terputus. Pada pukul 10.00 pagi Kabupaten Wonosari mendapat telepon dari Yogyakarta bahwa Belanda melakukan serangan disertai pendaratan pasukan payung. Berita ini terus disebarluaskan ke kecamatan-kecamatan.

Pada malam harinya Bupati mendapat perintah dari KDM untuk menyingkirkan keluarga dengan membawa apa saja yang dapat diselamatkan. Juga supaya menyingkirkan alat-alat kantor yang dianggap vital agar dapat dipergunakan dalam pengungsian. Sementara para pengawal menjalankan perintah KDM, Bupati memanggil rapat MPR. Sesuai dengan instruksi rapat MPR dipimpin oleh Komandan KDM, sedang instansi sipil bekerja seperti sedia kala. Hanya mengenai pertahanan pimpinan pindah dari tangan Bupati ke tangan Komandan KDM.²⁹⁶

Dalam suatu rapat telah diterangkan bahwa sewaktu-waktu seluruh pegawai harus meninggalkan Kota Wonosari, karena ada kekhawatiran menurut dokumen yang dapat diterima di Wonosari bahwa Belanda akan menurunkan pasukan payungnya di sekitar Gading, Wonosari, atau Semanu. Berhubung dengan adanya berita dari dokumen itu maka diputuskan dalam MPR supaya Bupati segera menyerahkan gaji pegawai untuk bulan Januari dan Pebruari 1949 tanpa memandang Daerah Istimewa Yogyakarta (kesultanan) atau Republik. Oleh karena itu pada malam hari itu juga para pegawai sibuk menyingkirkan peralatan kantor.

Sebagai siasat jika Gunungkidul diserbu musuh (Belanda), maka telah diputuskan pemerintah akan dibagi dua yaitu :

- (1) Di sebelah utara jalan Patuk – Bedoyo akan dipimpin oleh Wedana Prodjoprawiro dengan staf separuh dari pegawai kabupaten, instansi lainnya dan polisi.
- (2) Di sebelah selatan jalan Patuk – Bedoyo dipimpin oleh bupati sendiri dan kepala polisi dengan staf sisa pegawai yang ada.

Bupati mempunyai wakil **Wedana Prodjopuspito** dan kepala polisi diwakili oleh seorang inspektur polisi **Klas II**, dengan tujuan agar bupati dengan kepala polisi selalu dapat berdam-pingan dengan pimpinan militer. Untuk itu telah ditetapkan pula urutan-urutannya pergantian pimpinan jika ada kemungkinan salah seorang pemimpin tertangkap musuh atau gugur.

Tanggal 10 Maret 1949 merupakan peristiwa penyerbuan Belanda ke Gunungkidul. Waktu itu pagi-pagi telah terdengar arah kapal terbang dengan jumlah banyak, disusul oleh tembakan mitralyur dan ledakan yang terang dari arah lapangan terbang Gading dan di atas Kota Wonosari dan terus meluas sampai di Semanu, Sodo dan ke barat sampai Paliyan. Setelah tembakan mitrayur dan pemboman dari udara lalu disusul tembakan revolve di bawah dari arah lapangan terbang Gading ke Wareng, kemudian disusul lagi tembakan gencar ke arah bekas kantor bupati di Seneng.

Pada kira-kira pukul 09.00 kelihatan kapal terbang, dan bupati yang mengungsi di Desa Pulutan dalam perjalanan ke kantor kabupaten di Desa Karangkuang kurang lebih satu kilometer Kota Wonosari mendengar teriakan orang bahwa Belanda telah menurunkan parasut di bulak sebelah utara tempat pengungsian dalam jarak ± 500 m dan di sebelah baratnya dalam jarak ± 300 m yang berjumlah kurang lebih 60 orang.¹⁹⁷ Setelah mendengar berita itu Bupati bersiap diri untuk meninggalkan tempat sambil memperingatkan para keluarganya untuk mengamankan diri. Bupati menganggap kepentingan negara dan bangsa harus didahulukan dari pada kepentingan pribadi atau keluarganya. Oleh karena itu walau dalam masa penting itu harus berpisah dengan keluarga bukanlah menimbulkan pemikiran yang utama. Maka bupati diikuti oleh **RW. Prodjopuspito** dan juga juru tulisnya bernama surana terus menuju Desa Pulutan kurang lebih 2 km dari tempat pengungsian lama. Di Pulutan bupati bersembunyi disuatu rumah kecil sambil melihat kapal terbang yang terus berputar sambil memutahkan tembakan sampai pukul 18.00.

Dari tempat persembunyiannya di Pulutan itu dapat diketahui bahwa Belanda telah mengadakan patroli serta penyerbuan ke Desa Karangmojo dan membakar rumah di Desa Grogol. Pejuang kita lalu membumihanguskan Kecamatan Paliyan. Taktik ini dilakukan oleh pejuang kita agar jangan sampai dijadikan markas Belanda. Di sebelah timur Belanda terus menyerbu Desa Wareng dan sekitarnya, sedang ledakan bom terus terdengar dari arah Gading. Dengan penyerbuan itu orang-orang meninggalkan tempat tinggalnya masing-masing dan mencari tempat yang dianggap aman.

Di dalam serangan udara yang terus menghebat itu sambil menurunkan payungnya di sekitar tempat pengungsian Bupati di Pulutan bergerak menuju Wonosari dan Playen. Di samping itu ada juga yang menuju ke Karangmojo. Berdasarkan laporan yang dikirim bahwa Belanda pada kira-kira pukul 10.00 menduduki dan mendirikan pos di Karangmojo dan berpatroli sampai Desa Cangring, Kelurahan Karangasem. Desa tahunan yang merupakan pusat pemerintahan kapanewo Paliyan dikosongkan, dan orang-orangnya mengungsi masuk ke hutan. Rumah sinder dan camat dibakar. Pemerintahan kecamatan paliyan dipindahkan ke Desa Kepek di Paliyan. Jembatan yang menghubungkan Desa Karangmojo ke Desa Cangkring dibakar rakyat yang dipimpin oleh KODM, yaitu Sukardi dan Sukarno¹⁹⁸ agar dapat menghambat penyerbuan Belanda.

Penyerbuan Belanda tidak terbatas dalam Kota Wonosari saja, tetapi juga menduduki Semanu, menyerang Karangmojo yang terletak di sebelah timur Wonosari. Bahkan di tempat ini pernah diserang dari udara oleh Belanda. Waktu itu di Karangmojo sedang ramai-ramainya orang di pasar, tak lama kemudian datang kapal terbang berputar-putar menghujani bom di pasar tersebut. Sebelum itu mata-mata Belanda dari arah Semanu dengan melalui tegalan-tegalan memberi tanda isyarat dengan cermin kepada kapal terbang Belanda.¹⁹⁹ Melihat gelagat penyerbuan itu maka pak Candu sebagai anggota KDM di Karangmojo telah memerintahkan agar pasar hari itu segera bubar.

Rupa-rupanya perintah ini kurang mendapat perhatian dari orang-orang yang sedang berada di dalam pasar tersebut. Kemudian tidak lama dari peringatan dan informasi itu menyeranglah Belanda dari Udara sehingga di pasar itu ada beberapa orang jatuh korban kena tembak serta pecahan bom yang dijatuhkan oleh Belanda. Kiranya dapat dipahami mengapa Belanda menyerang ke berbagai kecamatan di Gunungkidul karena di daerah inilah dianggap tempat persembunyian para pembesar pemerintahan termasuk Panglima Besar Jenderal Sudirman.

2.4.3.7 Pemerintahan Militer

Setelah nyata-nyata Belanda menguasai Yogyakarta, dan bahkan para pembesar Republik ditahan dan diasingkan ke daerah terpencil, serta Pemerintah Darurat Republik Indonesia telah diserahkan Mr. Sjafrudin Prawiranegara di Bukittinggi, maka dalam menghadapi Agresi Militer II Belanda ini oleh Panglima Besar Komando Jawa Kolonel AH. Nasution disusunlah suatu konsep perlawanan yang maksudnya bahwa seluruh rakyat ikut serta dalam pertahanan di segala lapangan.²⁰⁰ Oleh karena revolusi ini berakibat pula di daerah-daerah termasuk di Kabupaten Gunungkidul, maka seluruh pemerintahan dimiliterisasikan. Sebagai akibatnya pada tiap-tiap kabupaten sampai kelurahan-kelurahan dijadikan pemerintahan militer, hanya camat dan lurah sajalah waktu itu masih dapat secara langsung memerintah rakyat dengan tugas utamanya membantu gerilya dalam menghadapi musuh di segala lapangan, baik dalam lapangan sosial, ekonomi dan juga militer. Kemudian terjadilah suatu pembagian tugas antara pimpinan pemerintahan militer dan sipil.

Pemerintah sipil mempunyai tugas mengurus penduduk dan usaha mencari bahan makan untuk tentara Nasional Indonesia dan para gerilya, sedang pemerintahan militer bertugas mengurus keamanan rakyat dan mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Di kelurahan-kelurahan lalu dibentuk markas pertahanan kelurahan yang membantu dalam perang gerilya, mengurus

konsumsi bagi tentara Nasional Indonesia, para gerilyawan dan pengungsi. Dalam hal ini rakyat, pemerintahan sipil dan militer bekerja bantu-membantu. Pemuda desa dilatih oleh anggota militer untuk nantinya diperbantukan ke dalam militer sehingga timbullah apa yang dinamakan Laskar Rakyat, Tentara Pelajar dan lain sebagainya. Bahkan kerjasama ini juga mendapat dukungan yang sangat besar artinya dari segenap lapisan masyarakat. Mereka dengan tulus hati membantu militer dan para gerilyawan kita dalam segala bentuk dan kebutuhannya. Bahkan tenaga rakyat termasuk peranan ibu-ibu dalam mengurus dapur umum selama revolusi merupakan kekuatan yang tidak dapat diabaikan peranannya. Berkat kerja keras mereka itulah dapur harus mengepul menyiapkan *nuk* untuk makan militer dan gerilyawan lainnya. Kiranya dapat dibayangkan dan direnungkan kembali bagaimana orang-orang dipedesaan itu secara ikhlas menyumbangkan tenaga, pikiran, dan juga harta benda yang dimiliki. Walaupun sebenarnya kehidupan masyarakat pas-pasan bahkan dapat dikatakan kurang, namun semuanya itu dilakukan dengan senang hati.

Pemerintah militer itu dimulai tanggal 25 Desember 1948 atas perintah Panglima Besar Komando Jawa dalam upaya melawan Belanda. Untuk itu di Kabupaten Gunungkidul terbentuklah Komando Distrik Militer (KDM) yang dipimpin oleh Kapten Hadjid Soedibjo, dan setiap kecamatan terbentuk pula Komando Onder Distrik Militer yang terdiri atas Pemerintahan Militer kecamatan yang dibantu oleh anggota Gerakan Lawan penjajahan.

Gerakan Lawan penjajahan ini timbul atas inisiatif dr. Suwito yang mengorganisasi Pemuda Wonosari untuk mendapatkan latihan kemiliteran, sedang mereka dapat membantu Tentara Nasional Indonesia dalam melawan Belanda. Merekalah yang menjadi kader teritorial di Kecamatan Wonosari. Tugas dari pemerintahan Militer Kecamatan Wonosari. Tugas dari pemerintahan militer kecamatan ialah menjalankan pemerintahan dan mengadakan perlawanan. Karena keadaan tidak aman maka

pemerintahan militer kecamatan mempunyai markas yang pindah-pindah tempatnya. Hal ini untuk menjaga pula agar surat-surat dan dokumen yang dianggap penting tidak jatuh ke tangan Belanda. Bahkan markas ini pindah dari desa satu ke desa lainnya mencari tempat yang aman dan tidak mudah diketahui musuh. Sementara itu Kementerian Pertahanan telah membentuk batalyon mobil dengan tugas untuk menyerang kedudukan Belanda yang terpencil di pelosok-pelosok desa agar kekuatan musuh terpecah-pecah sehingga mudah untuk dihancurkan.²⁰¹ Batalyon mobil yang ada di Wonosari di bawah pimpinan Kapten Widodo, mempunyai tugas mengganggu Belanda yang berada di Wonosari. Selain itu Bupati Kepala Daerah juga mempunyai pangkat militer.

Dalam perkembangan selanjutnya Pemerintah Militer Kabupaten Gunungkidul menginjak periode baru. Dengan berdasarkan setelah beberapa hari di Wonosari dan memperhatikan advis-advis dari Komandan KDM lama dan SKDM, maka setelah dipelajari dengan seksama, keadaan Gunungkidul dapat dibagi menjadi 3 yaitu :

- (1) meliputi daerah Kepanewon Patuk, Nglipar, Ngawen dan Semin,
- (2) meliputi daerah kapanewon Karangmojo, Semanu, Ponjong dan Beran,
- (3) meliputi Kepanewon Tepus, Wonosari, Playen dan Panggang.

Dari ketiga daerah itu mempunyai permasalahan berbeda-beda. Di daerah no. 1 sangat rusuh (selalu ada kekacauan dan perampokan-perampokan) sedangkan daerah nomor 2 adalah daerah agitasi dan provokasi sangat aktif (politis). Mengenai semangat di daerah yang ketiga adalah spionase, berhubungan mereka menempatkan banyak rencana pekerjaan di daerah-daerah tersebut.

Mengingat perlunya diadakan perubahan-perubahan di ketiga daerah ODM, dan juga mengingat demi stabilitas peme-

rintahan militer, diputuskan bahwa Kabupaten Gunungkidul dijadikan tiga bagian diisi dengan tenaga-tenaga yang cepat bertindak yaitu bekas seksi komandan pada bagian pertama. Pada bagian kedua diambilkan tenaga-tenaga yang teguh tentang disiplin agar tidak mudah dipengaruhi, dan umumnya anak-anak dari Militer Akademi. Di daerah ketiga diambilkan tenaga-tenaga yang sudah kelihatan dalam pekerjaannya selama pendudukan Wonosari. Selanjutnya SKDM disesuaikan keadaan di ketiga daerah tersebut.

Tindakan yang diambil mengingat pada saat itu dalam peralihan Kota Wonosari akan dikembalikan, maka diperhitungkan setelah dikembalikannya Wonosari mutasi ketiga wilayah itu akan dilakukan. Di dalam menjalankan mutasi tersebut perlu diadakan tindakan ialah *bezzeting* daerah-daerah yang selalu kacau dengan pasukan mobil, umpamanya: Nglipar, Karangmojo, dan Semanu. Hal ini telah mendapat persetujuan dari Komandan Mobil Mayor Sardjono. Selanjutnya dipertimbangkan juga mutasi tersebut perlu diadakan di kalangan pamong praja karena tidak dapat menghadapi kesukaran-kesukaran tersebut, dan hanya menambahkan aktivitas mereka dalam gerakan partai. Demikian itu pemikiran-pemikiran dalam usaha mengatasi wilayah menurut Kapten Sukirman Komandan KDM Pemerintahan Militer Gunungkidul.

2.4.3.8 Kegiatan Rakyat Menghadapi Pendudukan Belanda

Pada bagian ini akan diungkap kegiatan perlawanan dan pertahanan rakyat Gunungkidul melawan pendudukan Belanda. Dalam hal ini juga dikemukakan bagaimana usaha pemerintah setempat menyelamatkan diri dan mengadakan usaha pertahanan supaya tidak jatuh ke tangan musuh. Walaupun wilayah di Gunungkidul sebagian besar menjadi sasaran atau menanggung dampak adanya pendudukan Belanda itu, namun pada penulisan ini diambil tempat-tempat yang menonjol yaitu :

- (1) Daerah Bajihajo, Kecamatan Karangmojo,
- (2) Kota Wonosari yang menjadi pusat pendudukan Belanda,

- (3) Playen yang dijadikan tempat penting selama perjuangan menghadapi Belanda dengan Radio Perjuangan.

2.4.3.8.1 Gelaran Bejiharjo dan Peranannya

Dalam usaha pendudukannya di daerah Gunungkidul yang menurut perhitungan Belanda dijadikan tempat perlindungan dan pusat perjuangan, maka tak ubahnya juga Gelaran, Kelurahan Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo memiliki peranan sejarah yang penting dalam masa revolusi fisik melawan Belanda.

Mengenai Kelurahan Bejiharjo semula terdiri atas dua kelurahan yaitu Kelurahan Banyubening, dan Kelurahan Grogol. Dengan adanya perubahan struktur pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1946, maka ketiga kelurahan itu digabungkan menjadi satu kelurahan.²⁰³ Kelurahan Bejiharjo ini terdiri dari atas 20 pedukuhan yang masing-masing diketuai oleh seorang dukuh. Adapun pedukuhan-pedukuhan itu ialah: Grogol I, Grogol II, Grogol III, Grogol IV, Grogol V, Grogol VI, Banyubening I, Banyubening II, Seropan, Sokolimo I, Sokolimo II, Gunungsari, Ngringin, Kulwo, Bulu, Kemiri, Karangmolor, Gelaran I, gelaran II, dan Gunungbang.²⁰⁴

Lokasi wilayah Bejiharjo terletak di sebelah timur laut, kira-kira delapan kilometer dari Wonosari. Dari Karangmojo Kelurahan Bejiharjo terletak di arah barat laut, dan mudah dijangkau dengan kendaraan yang waktu revolusi jalannya belum diaspal tetapi dibuat dari pengerasan batu-batu putih yang dikumpulkan penduduk dari daerah setempat.

Berdasar catatan luas wilayah Kelurahan Bejiharjo seluruhnya 1825, 4825 ha yang terdiri atas tegal 711, 9875 ha, pekarangan 708,4600 ha, sawah 46,0855 ha dan kawasan hutan seluas 238,3000 ha.²⁰⁵ Tanahnya berbukit-bukit kecil dengan dataran yang berjumlah 17 bulak. Melihat keadaan wilayahnya ini, maka dimungkinkan penduduk Bejiharjo mengembangkan usahanya demi kemakmuran mereka.

Dalam masa revolusi fisik menghadapi serangan Belanda, Bejiharjo dijadikan Markas Komando Distrik Militer (KDM) III yang meliputi wilayah Gunungkidul. Penduduk banyak memberikan bantuan kepada KDM III sebagai pemerintahan militer setempat saat itu. Pemerintahan sipil ditempatkan di Kelurahan Wiladeg. Selama masa revolusi fisik itu rakyat menyatu dengan pihak militer dan pejuang lainnya, maka pemuda-pemuda yang sudah umur turut aktif mengambil bagian menjaga ketertiban dan keamanan desanya masing-masing. Tugas menjaga keamanan itu mereka lakukan secara sadar dari pagi sampai malam secara bergantian. Demikian juga ibu-ibu di samping harus mencukupi keperluannya sendiri, mereka diberi tugas oleh pemerintah kelurahan untuk membantu sebagai pelaksana dapur umum.

Pada waktu Yogyakarta telah diduduki Belanda, hubungan dengan Wonosari terputus selama satu hari, kemudian staf KDM II Bagian Penghubung mencoba mencari informasi dan baru mendapat kepastian sore harinya. Pada sekitar pukul 16.00 seorang kurir dari Markas Komando Jawa (MBKD) Letnan Dua Moyoretno menyampaikan berita sebagai berikut : (1) Belanda sudah menguasai Ibukota Republik Indonesia Yogyakarta, (2) Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta serta beberapa menteri ditahan Belanda, (3) Panglima Besar Jenderal Sudirman berhasil meloloskan diri siang harinya, melalui Parangtritis dan tanggal 20 Desember 1948 kira-kira pukul 09.00 beliau sudah sampai di Gunungkidul. Oleh karena itu Komandan KDM III diharapkan menjemputnya di Panggang, dan seterusnya mengawalnya ke perbatasan Wonosari – Wonogiri bersama-sama yang mengawal sejak pemberangkatannya dari Yogyakarta, (4) Kapten Hadjid Soedibjo sebagai Komandan KDM III dengan disertai staf Bagian I Letda Arifin berangkat menuju perbatasan Panggang pada tanggal 19 Desember 1948 itu juga jam 23.00 dari Giring, Paliyan menuju ke rumah Wono-yudo.²⁰⁶

Perlu dikemukakan di sini bahwa struktur organisasi KDM III Gunungkidul yang juga pernah berkedudukan di Gelaran, Bejiharjo yang nama lengkapnya KDM III Sub Teritorial 13 TT IV adalah sebagai berikut:²⁰⁷

- (1) Komandan KDM III : Kapten Hadjid Soedibjo
- (2) Bagian I : Pelda Sulardi/Arifin
- (3) Bagian pertahanan : Peltu Sidik/Soetiyoso
- (4) Bagian Perlengkapan : Letda Samiran
- (5) Bagian PHB : Peltu Sumbodo
- (6) Bagian TU : Peltu Soerojo dan Lettu Sunarto
- (7) Bagian Suplai/Logistik : Peltu Sugito

KDM ini memegang peranan penting di Gunungkidul. Waktu pemberontakan PKI Madiun yang hendak melanda Kabupaten Gunungkidul dengan cepat bersama pihak kepolisian menangkap gembong-gembong PKI yaitu Istiyajid dan Sirwoko. Demikian juga waktu hendak mengadakan penumpasan terhadap PKI diperbatasan Wonosari dan Wonogiri, KDM III dan kepolisian Negara Wonosari mendapat bantuan dari batalyon 1/22/Div. III Batalyon Sarjono.

Sebagaimana telah disebut di muka bahwa Gelaran, Bejiharjo dijadikan markas KDM III yang lamanya kurang-lebih 40 hari. Kelurahan Bejiharjo pada waktu itu termasuk wilayah pemerintahan militer dalam lingkungan KODM Karangmojo yang berkedudukan di Sukoliman. Kiranya telah menjadi keputusan bahwa untuk menghadiri serangan yang tiba-tiba pos penting Gunungkidul seperti KDM III, Bupati dan Polisi Negara direncanakan berpindah-pindah tempat termasuk di wilayah Bejiharjo juga. Semula KDM III direncanakan pindah dari Wonosari ke Desa Giring, lalu ke Mulusan di tenggara Wonosari. Kemudian ke Ngawis dan terus ke Gelaran. Menurut perhitungan Belanda di Gelaran tinggal para pembesar pemerintahan dan rupa-rupanya juga telah diketahui oleh mata-matanya bahwa di Gelaran dijadikan pertahanan. Untuk itulah Belanda menyerbu ke Desa Gelaran itu. Setelah mengetahui bahwa satu rumah penduduk dijadikan markas KDM III kemudian Belanda dengan melampi-

askan rasa kegeramannya akhirnya membakar rumah bekas markas tersebut. Untuk itu, maka sebagai peringatan dan kenangan perjuangan melawan Belanda di Gelaran didirikan suatu monumen perjuangan. Untung waktu Belanda menuju Gelaran itu para pembesar kita telah dapat meloloskan dari pengejarannya. Rumah penduduk yang menjadi sasaran pembakaran Belanda itu adalah milik Hardjowono Sadikin, selaku Mantri Kehutanan Gunungkidul yang waktu itu sedang bertugas di Semanu.

Sebelum KDM III ini berada di Gelaran terlebih dahulu berada di Wiladeg selama tiga hari. Kemudian KDM III memisahkan diri dengan pemerintah sipil yang ada di Ngawis. Rupa-rupanya pertimbangan yang masak bahwa pusat pertahanan KDM III dipindahkan dari Wiladeg ke Gelaran Bejiharjo tersebut, semata-mata untuk menghindari serangan musuh karena tempatnya terlindung gundukan bukit-bukit kecil. Jumlah personalia anggota KDM III yang tinggal di Gelaran waktu itu 60 orang. Hubungan antara penduduk secara timbal-balik dengan pihak militer baik, penduduk memberi bantuan terhadap kegiatan KDM III. Bantuan mencari kayu bakar untuk keperluan dapur umum, memberi laporan kepada staf KDM III bilamana ada sesuatu yang dianggap mencurigakan. Walaupun rumah-rumah penduduk ala kadarnya perlengkapannya namun militer juga dengan senang hati tinggal bersama rakyat dalam waktu yang relatif lama. Rumah-rumah penduduk itu dijadikan tempat istirahat oleh pihak militer. Sebagai imbalannya pihak militer juga ke desa-desa dalam waktu luang untuk berbincang-bincang dengan mereka memberikan penyuluhan seperlunya yang berhubungan dengan negara, pendidikan dan kesehatan.

Dalam hal mengamankan persenjataan KDM III sangat berhati-hati karena senjata ini benar-benar besar nilainya dalam menghadapi musuh. Waktu itu senjata disimpan di rumah penduduk milik Podorejo dari Seporan yang tidak jauh dari markas KDM III di Gelaran. Adapun orang-orang yang diberi kepercayaan menjaga gudang senjata itu antara lain : Candu, Tumin, Giman, Sukir, Wariyun, Si Pon, Sugiri dan lain-lain. Gudang

senjata itu ditempatkan secara rahasia dan dijaga oleh petugas piket secara bergiliran.

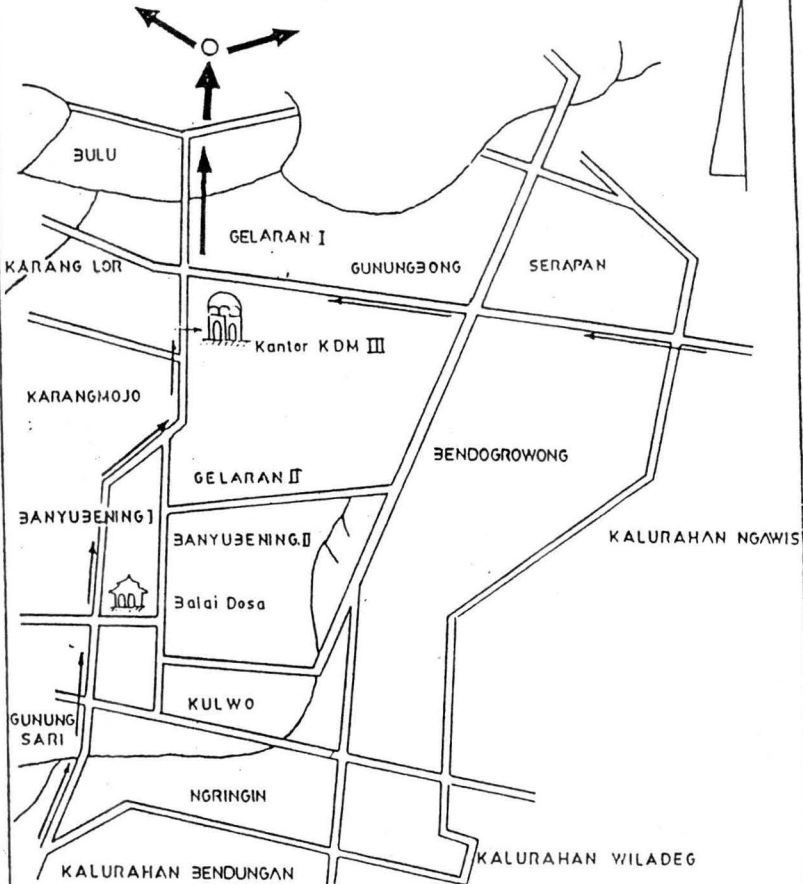
Untuk keperluan makan sehari-hari di samping menerima bantuan dalam jumlah yang besar dari segala kebutuhannya, pihak KDM III juga menerima bahan pokok lain misalnya minyak tanah, beras dan ikan asin. Bahan-bahan itu diserahkan ke pelaksana dapur umum. Bantuan dari rakyat bermacam-macam menurut kemampuan dan apa yang dimilikinya, antara lain kelapa, sayuran, ketela, jagung dan lain-lain.

Selama berada di Gelaran maka KDM III sering mengadakan rapat-rapat paling tidak seminggu sekali. Rapat yang paling mengesankan ialah saat Panglima Besar Jenderal Sudirman singgah sesaat di Gelaran sepulang dari Jawa Timur. Pada waktu itu hadir juga TB. Simatupang selaku wakil II Angkatan Perang RI. Dalam rapat itu Panglima Besar Jenderal Sudirman mengatakan bahwa dalam rangka perjuangan melawan musuh hendaknya dengan penuh keberanian, kehati-hatian serta dengan perhitungan yang cermat.²⁰⁸

Pada waktu datang informasi kepada KDM III bahwa Belanda akan menyerang Gelaran, Bejiharjo, maka Mayor Hadjid Sudibjo menginstruksikan kepada seluruh staf untuk mengungsi ke daerah Baon, suatu hutan yang termasuk wilayah Kepanewon Nglipar yang dianggap cukup aman dari kepungan tentara Belanda. Pejabat yang pada waktu itu sedang melakukan inspeksi ke markas KDM III ikut pula mengungsi, antara lain: Y. Kasimo (Menteri kemakmuran), Kolonel Suharjo (staf MBKD), Ir. Dipokusumo dan lain-lain. Setelah sampai Gadangan Nglipar rombongan pisah menadi dua. Rombongan pertama yang terdiri atas anggota KDM III dan pengawalnya menuju Patut, sedang para pejabat pusat yang dikawal oleh pasukan PHB menuju Beji, Kecamatan Ngawen untuk menghindari sergapan Belanda.

PETA PENYERBUAN BELANDA ke BEJIHARJO

U



Legenda

- JALAN
- BELANDA MENJU "ESA GELARAN"
- SELURUH SIF PAKS & PLEBAT POKAT PENGUNDURKAN Dini

PETA KALURAHAN BEJIHARJO



Setelah Belanda dalam operasinya ke markas KDM III di Gelaran tidak menemukan yang dicari, dan baru saja meninggalkan markas maka semakin beranglah Belanda. Dengan minyak tanah yang masih ada di dalam rumah tempat markas itu memudahkan Belanda membakarnya. Walaupun rumah penduduk dibakar oleh Belanda, tetapi semangat juang penduduk tidak pernah padam, mereka terus bersemangat memberikan bantuan kepada pihak militer untuk berhasilnya perjuangan. Daerah Gunungkidul yang dikenal orang sebagai daerah yang tandus itu ternyata menyimpan mutiara-mutiara dalam membantu perjuangan mengusir Belanda yang ingin menjajah kembali Republik Indonesia. Perjuangan dan bantuan rakyat pedesaan yang besar itu sepantasnyalah mendapat tempat dan penghargaan dalam sejarah perjuangan bangsa, paling tidak dilupakan dari penulisan sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

2.4.3.8.2 Perlawanan di Kecamatan Wonosari

Wonosari yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Gunungkidul menjadi sasaran pertama dari penyerbuan Belanda. Ditinjau dari tempatnya Wonosari sangat strategis, maka sudah sewajarnya di Kota Wonosari inilah dijadikan pusat pemerintahan dari masa ke masa berikutnya dimulai dari zaman Belanda, zaman Jepang, sampai zaman sekarang. Kecamatan Wonosari terbagi menjadi 14 kelurahan, yakni Kelurahan Gari, Karang Tengah, Piyaman, Wonosari, Selang, Kepek, Pulutan, Siraman, Wareng, Baleharjo, Karangrejak, Duwet, Mulo, dan paling Selatan adalah Kelurahan Wunung. Sebelah utara dibatasi Sungai Oya yang merupakan perbatasan dengan Kecamatan Nglipar. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Karangmojo, sebelah tenggara berbatasan Kecamatan Semanu, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Playen, kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tepus.

Pada tanggal 10 Maret 1949 pukul 06.00 pasukan Belanda dari udara telah mengadakan pengintaian terhadap lapangan terbang Gading dan juga Wonosari kota beserta daerah sekitar-

nya. Sebanyak 37 pesawat udara Belanda lalu mengadakan serangan secara besar-besaran. Selain membom lapangan terbang Gading yang dianggap merupakan landasan kapal terbang, maka pemboman juga terjadi atas Kota Wonosari untuk yang kedua kalinya pemboman: pendapa Kabupaten Wonosari, markas Polisi Negara Wonosari, Kecamatan Playen, dan jembatan di Karang Tengah yang menghubungkan Wonosari dengan Nglipar.

Pada pukul 08.00 Belanda menurunkan pasukan payungnya satu kompi di lapangan Gading dan sekitarnya bersama penerjunan parasit yang berisi senjata berat, secara bersamaan waktu Wonosari juga mendapat serangan dahsyat dari 3 jurusan dari udara, dan dari arah barat melalui Desa Terong, Dodongan, Ngleri, Banaran langsung menuju Gading, Kecamatan Playen, sedang dari arah timur Belanda masuk melalui Pracimantoro, Rongkop, Bedoyo, Semanu dan Karangmojo dengan kekuatan dua kompi.

Walau Belanda telah dapat menduduki Wonosari dan bermarkas di rumah Nyoo Piek Bie (toko Kawiharsono) bukan berarti telah menguasai keadaan. Oleh karena tempat ini selalu menjadi sasaran gerilya baik pemuda atau TNI yang bertugas di wilayah itu atau pasukan mobil yang berasal dari kompi Widodo. Pasukan ini telah mendapat kepercayaan dari Brigade "O" di bawah pimpinan Letkol Soeharto, karena pasukan ini merupakan pemukul yang tangguh dan pasukan istimewa. Walaupun demikian untuk mengusir Belanda yang telah menduduki Kota Wonosari tidak dapat berhadapan secara frontal karena persenjataan yang mereka miliki lebih lengkap dan modern, seperti *watermantel*, *stengun*, bren, mortir, tekidanto, thomson, mouser, senjata LE, panser, tank beserta alat pengangkut lain berupa truk, sedang kekuatannya berjumlah 1 kompi di bawah Kapten Wooltoft.

Usaha mengusir Belanda yang menduduki Wonosari terpaksa dilakukan secara bergerilya pada malam hari dari berbagai arah yaitu dari arah utara di bawah pimpinan Thomas Raharjo dari

batalyon IV pimpinan Mayor Soejono yang berkedudukan di Nglanggeran Patuk; dari arah selatan oleh kompi Widodo bersama regu Abdul Kayad dari batalyon IV di bawah Mayor Soejono pula yang berada di Desa Siraman dan Desa Wareng. Pasukan ini juga berpindah-pindah untuk menghilangkan jejak dari pelacakan musuh. Dari arah tenggara juga terjadi serangan gerilya di bawah Abdul Kayad yang bergabung dengan KODM Tepus dan Semanu yang bermarkas di Sekolah Menengah Pertama Mulo.²⁰⁹ Perlawanan terhadap Belanda itu di samping secara resmi dilakukan oleh TNI, juga turut serta badan-badan perjuangan lainnya menopang pihak militer.

Ketika Kapten Widodo bersama pasukannya yang berjumlah 300 prajurit berada di Kelurahan Wareng di Siraman, Pamong bersama Pager Desa mengorganisasi konsumsi buat para gerilyawan berupa makanan jadi dalam bentuk nuk. Makanan itu di samping berasal dari rakyat setempat juga berasal dari Kelurahan Duwet sebanyak satu pikul dari rumah-rumah tertentu yang telah dibuat dapur umum, misalnya rumah Wongso Saniyem, mBok Wongso Sangkep Singkar, Jiwosentono, Joyodikromo, dan Temu. Setiap dapur umum melayani sekitar 20 sampai 25 orang tentara.²¹⁰

Tentara yang berada di Siraman diberi tugas mengacau Belanda yang berada di Wonosari. Untuk itu Mangunwidarso sebagai keamanan supaya memimpin pengacuan itu. Atas perintah itu segera diatur penempatan gerilyawan di rumah-rumah penduduk untuk mengadakan pengacuan kepada Belanda di Wonosari. Untuk membantu TNI maka penduduk Siraman dan Glondongan mendapat tugas merusak jembatan Siyono yang menghubungkan Wonosari dan Gading.

Upaya menghancurkan Belanda yang bercokol di Kota Wonosari dikoordinasikan juga oleh Kapten Widodo, yang berusaha mencari peluru untuk menyerang Belanda. Berhubung peluru tidak ada maka ada yang dimiliki hanyalah sekedar mengacau saja, dan dilakukan secara berterus-menerus. Begitu mengetahui sarang gerilyawan yang tidak jauh dari kota, maka pada siang

harinya mereka menghujani tembakan kearah tempat persembunyian gerilya itu. Perang gerilya itu. Perang gerilya yang dilakukan para pejuang kita membingungkan Belanda karena bila siang hari gerilya ini menghilang, sedang di malam hari mereka dengan mendadak berkali-kali diserangnya. Oleh karena itu Belanda kewalahan menghadapi sistem perang gerilya itu. Sulit Belanda mencari mana gerilya dan rakyat karena antara keduanya menyatu tidak mudah dibedakan. Kerjasama TNI dan rakyat erat sekali. Oleh karena itu sering kali rakyat memberikan tempat berlindung, memberi jaminan makan, serta menyampaikan informasi yang berhubungan dengan gerak-gerik Belanda,

Taktik Kapten Widodo selanjutnya adalah memindahkan markas gerilyawan itu dari tempat lama di baratdaya Wonosari ke arah timur yaitu di Karangrejek dan Mulo. Dalam pada itu para gerilyawan dari arah tenggara seringkali bergabung dengan KODM Tepus dan Semanu di bawah Abdul Kayad dan Kapten Darsono.

TNI bersama rakyat di samping mengadakan gerilya juga melakukan bumi hangus seperti dilakukan pada jembatan Keppek. Siyono dari Karangtengah yang bertugas memasang ranjau/granat di jalan-jalan yang kemungkinan dilewati oleh Belanda. Bumi hangus yang lainnya yang pernah dilakukan antara lain pemasangan alat peledak di jalan antara Wonosari – Munggi yang dapat menggulingkan truk yang sedang mengangkut pasukan Belanda.

Sementara itu Kapten Widodo di Karangrejek dapat menempati rumah Sodinomo. Dari sana ia manerima informasi bahwa sejumlah dua regu pasukan Belanda hendak mengadakan patroli dan akan melalui jalan tersebut. Di Ngemplak tentara Belanda dicegat gerilyawan Belanda berusaha membalasnya dengan memberondong ke arah sarang gerilyawan, dan mengejar mereka dengan menghujani tembakan yang bertubi-tubi, di Karang Gemuk I, Karangrejek, lalu di Desa Dung Gubah, Kelurahan Duwet. Selanjutnya Kapten Widodo mundur ke arah barat sam-

pai di Desa Wareng, dan ada sebagian menuju ke Soko, dan yang ke arah barat menuju Sodo.

Penyerbuan kota oleh Belanda itu mengejutkan dunia internasional, semua pihak ikut campur tangan sehingga PBB mendesak untuk diadakan Konferensi Meja Bundar antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Belanda. Perundingan itu berhasil diputuskan bahwa Belanda harus menarik pasukannya dari daerah pendudukan, khususnya di Wonosari.

Sebelum diadakan penyerahan keputusan itu, terlebih dahulu oleh beberapa pimpinan di Gunungkidul diadakan rapat besar yang dihadiri oleh Mayor Soejono, dan KDM lama dan baru, staf dari KDM III, Bupati Wedono, Bupati Anom dari Kapatihan yang diperbantukan di Wonosari, Panitia Komisi Timbang terima KDM III STMY Yogyakarta. Sebelum itu Sri Sultan Hamengku Buwono IX lewat Letnan Sulardi, putra Lurah Broto Dayakan untuk menyampaikan perintah kepada seluruh pasukan supaya mendekati kota paling jauh dua kilometer dari Wonosari dan persiapannya diserahkan sepenuhnya kepada KDM III untuk mengatur segala sesuatunya jangan sampai mengecewakan, sebab penyerahan kedaulatan di Wonosari akan dijadikan contoh untuk daerah lain. Menurut keputusan rapat, apabila nanti Sri Sultan Hamengku Buwono IX datang, rakyat diminta supaya menyambut dengan mengibarkan Sang Merah Putih.

Berita persetujuan Roëm — Royen di KMB terdengar di Gunungkidul pada 8 Mei 1949, suatu pembicaraan antara Pemerintah Indonesia dengan Belanda tentang pengembalian Pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta. Pada 27 – 28 Mei 1949 RW. Prodjopuspito dipanggil ke Kapatihan Yogyakarta untuk mewakili Bupati menghadiri rapat. Pulangnya tanggal 30 Mei 1949 disertai dua orang Bupati Anom yang berkewajiban membantu bupati Gunungkidul. Setelah R.W. Prodjopuspito mengadakan laporan tentang hasil rapat maka sehari kemudian tanggal 31 Mei 1949 diadakan rapat dengan memanggil para wedana sektor untuk membicarakan persiapan

pengembalian Kota Wonosari. Setelah selesai rapat para wedana sektor kembali ke tempat masing-masing, sedang RW. Prodjo-puspito bersama dengan kedua orang Bupati Anom menuju ke Giring untuk membicarakan dengan Bupati dan Markas Militer Kabupaten dalam rangka mendekatkan kantor dengan Kota Wonosari.

Dalam perundingan di Giring diputuskan bahwa Bupati dan Komandan KDM menunggu di Kepek. Sedang menurut perintah tempat menunggu adalah di Siraman untuk masuk Kota Wonosari. Dengan adanya perubahan rencana penarikan tentara kolonial Belanda, maka telah diperhitungkan pula jarak antara kurir dari Wonosari dengan Bupati, dan perjalanan Bupati ke pos menunggu perintah masuk Kota Wonosari.

Sampai terlaksananya perintah penarikan Belanda dari Gunungkidul Bupati telah mengirim kurir ke Kota Yogyakarta untuk menerima perintah sampai empat kali, tetapi yang ketiga kalinya terpaksa kembali di tengah jalan, karena setelah sampai di batas kota terjadi pertempuran yang tidak memungkinkan masuk Kota Yogyakarta. Kurir yang keempat kalinya kembali tanggal 24 Juni 1949 pagi pukul 06.30 dengan membawa surat perintah yang menyebutkan bahwa bupati, tentara dan polisi pada tanggal 24 Juni 1949 pukul 10.00 supaya berada di Siraman menunggu perintah masuk Kota Wonosari. Perintah tersebut diberitahukan kepada Komandan KDM, Kepala Polisi dan Komandan Tentara Mobil yang telah berada di Siraman, sedang camat dan lurah Wonosari lalu berangkat menghampiri Bupati Anom yang diperbantukan di Gunungkidul. Pembesarpembesar yang berwenang akan turun di Gading sekitar pukul 10.00 - 11.00 dan diminta supaya menyediakan minuman dan makanan ringan, sebab Sri Paduka Paku Alam VIII akan datang sendiri di Siraman dengan anggota UNCI, (*United Nations Committee for Indonesia* pengganti *Committee of good offices* yang dikenal sebagai Komite Tiga Negara).

Setelah sampai di Siraman telah siap Komandan Mobil Soejono, kepala polisi dan para pejabat lainnya. Tidak lama

setelah kedatangan Bupati di Siraman, menyusul pula kedatangan komandan KDM sehingga persiapan untuk menunggu kehadiran Sri Paduka Paku Alam VIII dirasakan cukup dan tinggal menunggu saja. Dan dalam waktu menunggu ini datanglah kurir yang membawa surat dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk Mayor Soejono yang isinya supaya masuk Kota Wonosari. Untuk itu pada tanggal 25 Juni 1949 dengan pesawat terbang Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang isinya supaya masuk Kota Wonosari. Untuk itu pada tanggal 25 Juni 1949 dengan pesawat terbang Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang disertai Kolonel Van Langen dan anggota UNCI, beberapa pejabat dan wartawan tiba di lapangan Gading. Kemudian terjadilah upacara serah terima di Desa Siraman Wonosari. Sri Sultan Hamengku Buwono IX memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa atas kerjasama yang baik dengan Komisi Tiga Negara, maka seluruh Indonesia termasuk juga Kabupaten Gunungkidul diserahkan kepada Indonesia kembali. Untuk itu penarikan Belanda ini dimulai dari Wonosari. Upacara ini sederhana tetapi mempunyai makna yang sangat penting dalam lembaran sejarah perjuangan bangsa kita dalam menghadapi penyerbuan Belanda. Hadir dalam upacara itu di samping wakil Belanda Walf Staff, Kolonel Van Langen dari UNCI, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Bupati Wonosari, KRT. Suryaningrat komandan KDM, camat, lurah dan undangan lainnya.²¹¹

Penarikan Belanda dari Gunungkidul ini merupakan titik tolak rakyat memperbaiki hidupnya dengan melanjutkan pembangunan. Penderitaan telah lama menghimpit tidak ada habis-habisnya, maka bermula dari penarikan Belanda yang mengambil tempat di pertigaan Jalan Siraman ini berarti berakhirilah pendudukan Belanda di Indonesia. Dengan demikian Gunungkidul merupakan tempat yang penting untuk dicatat dalam lembaran sejarah perjuangan Indonesia.

Kemudian setelah upacara serah terima itu selesai, maka rombongan yang berjumlah sekitar 15 sampai 17 mobil sempat singgah di rumah Hardjopawiro di Desa Pancuran. Sambil ber-

istirahat Sri Sultan Hamengku Buwono IX duduk di sebuah dipan dari kayu bersama Mr. Purwokusumo dan Muhammad Yamin. Kemudian Ibu Hardjopawiro dipanggil oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk menerima uang sebanyak Rp 50,00 berupa uang logam yang terdiri duapuluhlima. Semula Ibu Hardjopawiro tidak mau menerima uang tersebut, tetapi akhirnya uang tersebut diterima saja sebagai jimat. Waktu itu berdasar keterangan yang masih diingat oleh Ibu Hardjopawiro bahwa Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengenakan celana panjang dari bahan dril dan kemeja biasa.^{2 1 2}

2.4.3.8.3 *Perjuangan di Banaran Playen*

Sebagaimana telah diungkapkan di muka bahwa beberapa daerah di Gunungkidul telah memainkan peransertanya dalam revolusi fisik melawan Belanda. Untuk itu kiranya perjuangan tidak dapat dipisahkan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Oleh karena itulah daerah Banaran Playen saat revolusi fisik dijadikan tempat pemancar radio perjuangan Republik Indonesia. Walaupun di Playen secara fisik tidak diduduki Belanda, tetapi dalam rangka patroli memiliki arti penting sebagai pemancar komunikasi yang memegang peranan penting dalam usaha perang waktu itu.

Pemancar radio perjuangan itu adalah milik AURI yang semula berada di lapangan terbang Gading yang tidak jauh dari Wonosari. Pemancar radio ini menurut pertimbangan harus dipindahkan ke suatu tempat yang aman dari pengamatan Belanda. Setelah diadakan peninjauan ke berbagai desa, maka Kampung Banaran Playenlah yang dianggap aman dan tenang untuk dijadikan tempat pemindahan pemancar radio tersebut.

Selama revolusi menghadapi pendudukan Belanda itu kecuali di Banaran Wonosari, maka didirikan juga pemancar yang kuat di Kotaraja, Bukittinggi, Bengkulu, Pakanbaru, Jambi, Tanjungkarang, di Gunung Lawu perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur, di Madiun dan sebagainya.^{2 1 3} Waktu itu Pe-

merintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) juga mempunyai pemancar yang bergerak sendiri. Pemancar-pemancar tersebut umumnya milik AURI dan telah benar-benar memberi sumbangan besar dalam perang gerilya.

Dengan dipilihnya Banaran yaitu di rumah orang tua Sumarjono, maka pak Budiharjo dengan beberapa orang tinggal di rumah tersebut. Selama berada di Banaran itu masyarakat yang masih tinggal di tempat selalu memberikan bantuan apa yang diperlukan Bapak Budiharjo untuk perjuangan, dan dari tempat inilah terbuka hubungan dengan luar negeri misalnya ke India, Birma dan lain sebagainya sehingga apa yang ada di Indonesia secara nyata dapat diketahui secara jelas negara-negara sahabat Indonesia dalam membantu perjuangan. Dari pemancar radio Banaran itu dapat ditangkal berita tanpa bukti danewartakan hal-hal yang sebenarnya. Dari radio itu juga dapat dipatahkan *gembargembor* pihak Belanda yang mengatakan bahwa penyerbuannya tanggal 19 Desember 1948 itu telah melumpuhkan pemerintahan Indonesia.

Di Banaran dan sekitarnya juga diadakan dapur umum yang bertugas memasak. Apa yang disajikan untuk makan pak Budiharjo benar-benar makanan rakyat setempat ala kadarnya. Kadang-kadang nasi nuk itu dengan lauk urap dan sambal. Namun dalam keadaan yang memaksa harus demikian, maka apa yang disediakan rakyat dinikmati Pak Budiharjo bersama pembantu-pembantunya dengan senang hati. Pak Budiharjo dengan akrabnya bergaul dengan masyarakat setempat.

2.4.4 Kabupaten Kulon Progo

2.4.4.1 Keadaan Wilayah dan Masyarakat

Berdasarkan sejarahnya, yakni pada zaman penjajahan Belanda, Kabupaten Kulon Progo semula terbagi dalam dua kabupaten yaitu Kabupaten Adikarto yang beribukota di Wates (termasuk wilayah Kesultanan Yogyakarta) dan Kabupaten Kulon Progo yang beribukota di Sentolo (termasuk wilayah Kadipaten Paku-

alaman). Keadaan ini berlangsung hingga awal republik. Baru setelah lahirnya undang-undang nomor 18 tahun 1951 yang mengatur tentang perubahan undang-undang nomor 15 tahun 1950, maka dua kabupaten tersebut secara resmi digabung menjadi satu kabupaten dengan nama Kabupaten Kulon Progo yang beribukota di Wates dan yang terletak 35 km sebelah barat Yogyakarta. Nama Kabupaten Kulon Progo secara harfiah berarti sebelah barat Sungai Progo.

Secara geografis daerah wilayah Kabupaten Kulon Progo terdiri atas dataran rendah dan berbukit-bukit. Keadaan wilayahnya yang berbukit-bukit, dengan jalan yang berkelak-kelok, turun naik dan dengan dihiasi tanah persawahan yang tersebar di sana sini adalah merupakan suatu panorama yang indah dan menawan. Kabupaten Kulon Progo ini dibatasi oleh Samudera Indonesia di sebelah selatan, Kabupaten Purworejo di sebelah barat, sebelah utara adalah Kabupaten Magelang dan sebelah timur Sungai Progo.

Berbeda dengan keadaan di daerah Gunungkidul yang sangat sulit air apabila musim kemarau namun di daerah Kabupaten Kulon Progo wilayahnya berbukit-bukit ternyata air bukan menjadi masalah utama. Sebab irigasi di daerah ini telah berjalan dengan baik dan mampu mengairi tanah-tanah persawahan. Sedang tanah-tanah tegalan di daerah perbukitan juga mendapat cukup air dari bukit-bukit yang masih rindang ditumbuhi pepohonan.

Demikianlah gambaran sekilas keadaan wilayah Kabupaten Kulon Progo yang memiliki potensi besar dalam masa revolusi sebagai daerah pertahanan dan daerah gerilya. Kondisi geografis yang demikian itu lebih mantap lagi berperan sebagai tempat pertahanan dan daerah gerilya dengan ditopang oleh keadaan masyarakatnya yang ramah dan memiliki rasa solidaritas dan jiwa gotong-royong yang masih kuat. Memang masyarakat pedesaan di daerah Kabupaten Kulon Progo yang merupakan etnis Jawa, pada umumnya masih memiliki dan dilandasi oleh budaya Jawa. Mereka masih memegang erat

tradisi dan budaya Jawa. Sikap, tingkah laku dan tata kramanya pun masih asli dan masih belum banyak terpengaruh oleh budaya luar. Hal ini tercermin dari kehidupan mereka sehari-hari. Baik dalam bentuk hubungan horisontal maupun vertikal. Hubungan horisontal diwujudkan dalam bentuk sikap dan semangat (jiwa) gotong-royong yang mengakar dalam masyarakat. Di samping itu perilaku yang ramah, sopan, suka menolong, *polos* dan *andap asor* merupakan ciri-ciri khusus yang masih tetap melekat pada masyarakat pedesaan di Kabupaten Kulon Progo khususnya dan masyarakat pedesaan-pedesaan di Jawa pada umumnya. Jiwa gotong-royong, perilaku ramah, dan suka menolong yang menjadi milik masyarakat pedesaan di Kabupaten Kulon Progo tersebut ternyata merupakan modal yang besar dalam masa revolusi. Dengan modal semangat dan jiwa gotong-royong, perilaku yang ramah dan suka menolong itu masyarakat pedesaan di Kabupaten Kulon Progo siap membantu TNI dan bahkan mereka tidak hanya membantu dalam arti menyediakan tempat berlindung dan menyediakan perbekalan, tetapi mereka juga ikut memanggul senjata dalam perang gerilya di masa revolusi. Keterlibatan masyarakat pedesaan di Kabupaten Kulon Progo dalam masa revolusi ini makin mantap lagi dengan masih lestarnya bentuk-bentuk hubungan vertikal dalam masyarakat. Hubungan vertikal ini diwujudkan dalam bentuk sikap hormat, loyal dan ketaatan serta kepatuhan rakyat atau bawahan terhadap atasan atau pimpinan. Kondisi yang demikian ini juga merupakan modal yang sangat penting dalam perjuangan di masa revolusi. Dengan kondisi yang demikian itu, maka rakyat akan mudah sekali digerakkan dengan cukup melalui pimpinan formalnya.

2.4.4.2 Peranserta Masyarakat Pedesaan dalam Perang Gerilya

Dalam masa revolusi, Kabupaten Kulon Progo (sekarang) masih terdiri atas dua kabupaten yakni Kabupaten Adikarta dan Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten tersebut dalam masa revolusi mempunyai nasib dan penderitaan yang sama dengan

kabupaten-kabupaten lainnya di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan adanya penyerangan Belanda secara mendadak di ibukota republik Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948, maka sejak itu seluruh wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi ajang pertempuran dan perjuangan. Sehubungan itu dalam penelitian ini kami fokuskan pada daerah-daerah pedesaan yang memiliki peranserta sangat menonjol dalam masa revolusi. Untuk daerah Kabupaten Kulon Progo, masyarakat pedesaan yang memiliki peranserta sangat menonjol dalam masa revolusi antara lain adalah: (1) Dusun Banaran, Desa Banjarsari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo; (2) Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo; dan (3) Kelurahan Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo.

2.4.4.2.1 Dusun Banaran, Desa Banjarsari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo

Dusun Banaran adalah salah satu dari 14 dusun di Desa Banjarsari Kecamatan Samigaluh yang wilayahnya di sebelah utara berbatasan dengan Desa Purwoharjo Kecamatan Samigaluh, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, di sebelah timur berbatasan dengan Dusun Juhut Desa Purwoharjo, dan di sebelah barat berbatasan dengan Dusun Ngaran Desa Banjarsari.

Luas Dusun Banjaran adalah 57 ha yang hampir seluruhnya berupa daerah perbukitan dengan rincian tanah sawah 21 ha, tanah tegalan 16, 5 ha, pemukiman 19 ha, dan untuk penggunaan lainnya 0,5 ha. Kondisi tanahnya termasuk jenis tanah litosol yang mempunyai sifat labil. Dusun Banaran terletak pada ketinggian 600 meter di atas permukaan air laut, dikelilingi oleh bukit-bukit pegunungan seperti Gunung Manik dan Gunung Sigong dan dilalui beberapa sungai kecil seperti Kali Wadas dan Kali Dung Bangkong.²¹⁵ Mata pencaharian penduduk Dusun Banaran sebagian besar adalah pertanian, sedang lainnya bekerja

pada lapangan usaha dan jasa antara lain sebagai tukang batu, tukang kayu serta buruh dan pegawai negeri ada \pm 10 orang sebagian besar adalah guru sekolah dasar.

Setelah ibukota republik Yogyakarta diduduki oleh Belanda, Tentara Nasional Indonesia mengundurkan diri ke luar kota sesuai dengan perintah Panglima Besar Angkatan Perang untuk mengadakan perang gerilya. Sementara itu para pimpinan dapat meninggalkan kota untuk memimpin gerilya dan mengatur pertahanan di desa antara lain adalah Jenderal Sudirman (Panglima Besar Angkatan Perang), Kolonel Djatikusumo (Kepala Staf Angkatan Perang), Kolonel TB. Simatupang (Wakil Kepala Staf Angkatan Perang), Letkol Suharto (Komandan Wehrkreise III).

Dalam pada itu Kolonel TB. Simatupang selaku wakil kepala staf angkatan perang beban tugasnya makin bertambah yakni di samping mengkoordinasi pertahanan Jawa dan Sumatera, juga harus mengatur hubungan dengan MBKD, MBKS dan Panglima Besar Angkatan Perang Jenderal Sudirman. Untuk melaksanakan tugas itu diperlukan alat komunikasi yang efektif dengan segala sarananya dan personal yang tangguh dapat dipercaya serta dukungan rakyat dan juga tempat yang aman. Setelah melalui proses perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan serta berbagai pertimbangan yang masak, terutama faktor tempat yang strategis dan aman serta adanya dukungan rakyat dan komunikasi yang tidak terlalu sulit dengan MBKD dan MBKS, maka pilihan jatuh pada Dusun Banaran Memang sangat tepat Dusun Banaran dipilih oleh Kolonel TB. Simatupang sebagai markas gerilya. Dusun ini secara alami merupakan tempat yang aman karena banyak hambatan bagi musuh (Belanda) untuk menjangkaunya dan kenyataan Belanda tidak pernah menjangkau daerah ini. Di samping itu Dusun Banaran berdekatan dengan MBKD (Markas Besar Komando Jawa) di Borogunung dan juga tidak ada kesulitan untuk berhubungan dengan MBKS (Markas Besar Komando Suamtera) melalui pemancar radio. Masyarakat desa di Dusun Banaran ini pun ternyata sangat ra-

mah, terbuka dan menunjukkan dukungan serta loyalitas yang tinggi kepada Republik dan TNI, bahkan lebih dari itu masyarakat Desa Banaran mampu menunjukkan peranserta aktif dalam perjuangan yang antara lain terlihat dari kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

- (1) Mengadakan perlindungan yang efektif terhadap semua kegiatan para gerilyawan dengan latihan kemiliteran dan tugas jaga.
- (2) Rumah Bapak Karyoutomo digunakan sebagai markas Kolonel Simatupang dan merupakan pusat aktivitas perjuangan gerilya. Di samping itu rumah ini juga digunakan sebagai dapur umum selama perang gerilya.
- (3) Mengadakan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makan bagi para tentara (jumlahnya kurang-lebih 150 orang) dan para pengungsi dari Yogyakarta. Dapur umum ini dipimpin oleh Ny. Karyoutomo dengan dibantu Sutilah, Rujiah, Rubinah, Sadirah, Inem, Rubinem, dan lain-lain.^{2 1 6}
- (4) Beberapa pemuda termasuk Bapak Karyoutomo bersedia menjadi kurir pos untuk menyampaikan surat-surat dan berita-berita penting secara estafet.
- (5) Beberapa warga Desa Banaran dan sekitarnya juga dengan ikhlas bersedia dijadikan barisan penyelidik atau mata-mata, dan di antaranya adalah Bapak Karyoutomo yang sering dikirim untuk menyelidiki kekuatan musuh (Belanda).
- (6) Beberapa warga desa dengan senang hati mendapatkan pendidikan keterampilan dan pengetahuan bahasa Inggris dari Bapak Ali Budiarmo dan Mr. Sastro Pawiro.

Berdasarkan keterangan Bapak Karyoutomo, tokoh-tokoh dan TNI yang tinggal dan bermalam di rumahnya antara lain adalah Kolonel TB. Simatupang, Haryono MT, Ali Budiarmo, Sastro Pawiro, AK. Gani, Ir. Dipa Kusumo, Mokoginta, Nasution, Kawilarang, Dr. Djodiningrat, Sukidjan, Slamet, Sarpan, Djatikusumo, Niti Prawata, Bambang, Sugeng, Babat, Dinga,

Piet Suntoro, Sunu, Widya, Simbolon, Bahrin, Nuradi, Muslimin, Sulaiman, Arselan. Di samping itu masih banyak lagi para gerilyawan dan pengungsi tinggal di rumah-rumah penduduk warga Dusun Banaran. Mereka ternyata mampu menjalin hubungan dan kerjasama yang akrab, saling bahu-membahu dan saling bergotongroyong dalam segala hal.

Adapun langkah-langkah yang diambil oleh Wakil II KSAP Kolonel TB. Simatupang pada saat berada di Banaran adalah: (1) mengadakan rapat strategi militer, (2) melatih kemiliteran para pemuda setempat, (3) mengadakan kursus bahasa Inggris dengan gurunya Mr. Ali Budiarjo dan Mr. Sasro Pawiro, (4) melatih peningkatan pengetahuan bagi para wanita setempat, dan (5) mengadakan penerangan situasi gerilya bagi warga desa setempat. Salah satu peristiwa penting yang patut dicatat dari Banaran yaitu adanya pertemuan antara Kolonel TB. Simatupang dengan Kolonel Bambang Sugeng pada tanggal 18 Januari 1949 yang membicarakan seputar rencana Serangan Umum ke Yogyakarta.²¹⁷

Demikianlah gambaran sekilas situasi, konsep-konsep pemikiran, pandangan dan berbagai langkah yang muncul di dusun terpencil Banaran, serta tanggapan dan peran serta masyarakat Dusun Banaran yang akrab, ramah dan menunjukkan loyalitasnya yang tinggi terhadap republik dalam ikut mempertahankan Republik Proklamasi selama periode revolusi kemerdekaan.

2.4.4.2.2 *Kelurahan Banjarasri Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo*

Pada masa Agresi Belanda II Kelurahan Banjarasri menjadi salah satu tempat penting dalam usaha melakukan taktik perang gerilya. Kelurahan ini termasuk dalam Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo dan yang terletak 35 km sebelah barat laut Kota Yogyakarta.

Kawasan ini sangat memungkinkan untuk menunjang kelangsungan perjuangan, karena keadaan alamnya berbukit-bukit

terjal serta medannya sukar dilalui oleh musuh. Selain itu secara alami wilayah ini dipisahkan oleh bentangan Sungai Progo sehingga letaknya terpisah dengan daerah di sebelah timurnya. Kelurahan Banjarasri memiliki luas wilayah 1141.9195 ha dan meliputi 32 dusun yaitu Dusun Boro, Borosuci, Borowetan, Borogunung, Jurang, Pancuran, Kalijeruk, Gejlig, Nglebeng, Jetis, Ngaren, Sinongko, Kagok, Tlangu, Kepikan, Poros, Ngendok, Jurungan, Tirup, Bentulu, Gebeg, Ngroto dan Tuksongo.²¹⁸ Seperti desa lainnya di daerah Yogyakarta, Kelurahan Banjarasri juga sudah teratur untuk menjadi pendukung perjuangan kondisi ini mempermudah pembentukan pemerintah gerilya, karena telah tersedia susunan perangkat desa untuk melaksanakan pemerintahan yang otonom. Pemerintahan desa dapat menampung urusan pengungsi, mengatur pertahanan sipil, perbekalan dan penerangan.

Sementara itu dengan aksi gerak pembersihan yang terus-menerus dilancarkan oleh tentara Belanda terhadap kedudukan kubu-kubu perjuangan, maka kedudukan rakyat juga menjadi terdesak dan karenanya rakyat turut mencari tempat yang dianggap aman untuk berlindung. Mengikuti keadaan yang demikian maka tampak berbaur antara rakyat dan pejuang. Rakyat semakin banyak meninggalkan dusunnya seperti yang dilakukan rakyat yang berada di sebelah timur Kali Progo. Mereka bersama gerak pejuang turut melintasi Sungai Progo ke arah barat dan menyebar untuk mencari perlindungan di Kelurahan Banjarasri. Sehingga kesibukan di Kelurahan Banjarasri sehari-harinya bukan saja karena aktivitas militer, melainkan juga oleh kehadiran masyarakat pengungsi yang terus berdatangan.

Sehubungan dengan perkembangan tersebut, maka pamong desa setempat, Sastrowiharjo memberikan kepercayaan kepada carik untuk membentuk Barisan Pager Desa, dengan tujuan utama adalah untuk menjaga keamanan. Selain itu para anggotanya bertugas pula untuk melancarkan arus gerak militer dan juga berperan sebagai lembaga sosial desa.

Dalam upaya menciptakan ketertiban dan keamanan wilayah, maka setiap anggota Barisan Pager Desa bertugas dengan aktif untuk mengamati setiap orang yang keluar masuk wilayah ini. Sehingga kemungkinan akan terjadi kebocoran rahasia ataupun masuknya mata-mata musuh bersama arus pengungsi dapat dicegah. Dengan demikian aktivitas pejuang dapat berjalan lancar. Untuk melancarkan arus komunikasi para anggota Barisan Pager Desa berperan juga sebagai kurir terutama untuk mengantarkan surat-surat penting.

Para pengungsi mendapat pelayanan yang baik. Bagi mereka yang tidak memiliki apapun akan ditampung oleh penduduk setempat baik tempat ataupun makannya. Dari keadaan ini tampak tercipta persaudaraan yang mencerminkan kekeluargaan. Suasana yang demikian ini tumbuh semakin mengikat antara pihak militer, penduduk serta masyarakat pengungsi.

Dalam pada itu Kolonel AH. Nasution selaku komandan PTTD menempatkan pos Markas Besar Komando Djawa (MBKD) di perbukitan Borogunung Kelurahan Banjarasri. Sedangkan sebelumnya pos MBKD ditempatkan di lereng Gunung Merapi, tetapi karena serangan yang terus menerus dilancarkan tentara Belanda, terasa kedudukan pos ini akan terancam. Karena itu untuk menghindari terhadap kemungkinan serangan Belanda, maka kolonel AH. Nasution beserta stafnya dengan melalui desa-desa sebelah utara Kota Yogyakarta terus bergerak ke arah barat untuk mendapatkan tempat yang aman dalam menjalankan tugas operasionalnya.

Kehadiran Kolonel AH. Nasution bersama perangkatnya di Kelurahan Banjarasri tidak menjadi perhatian masyarakat. Hal ini mungkin kehadirannya bersama dengan masyarakat pengungsi lainnya yang mencari tempat perlindungan di daerah ini. Di samping itu pengakuan AH. Nasution waktu itu adalah sebagai guru yang berasal dari Sumatera dan namanya Abdul Haris.

Sesuai dengan taktik yang tengah dijalankan oleh Kolonel AH. Nasution bahwa ia adalah pengungsi, maka hari pertama

setelah kehadirannya di Boro Kelurahan Banjarasri menginap di rumah guru Martowiryo. Setelah satu malam pindah ke rumah Kartosentiko di Depok dan seterusnya ke rumah Kartodikromo di Nglebeng. Selanjutnya Nasution pindah lagi ke rumah Nitirejo di perbukitan Borogunung.²¹⁹ Tempat yang terakhir ini kiranya cukup aman untuk meneruskan kegiatan perjuangan, di samping letaknya yang jauh terpencil juga tempat ini letaknya terlindung dalam suatu lekukan jurang. Bertolak dari keadaan inilah maka Kolonel AH. Nasution menjadikan tempat ini sebagai pos MBKD. Dengan memanfaatkan bagian depan rumah Nitirejo, Nasution dapat melihat lepas jauh ke sebelah timur. Lebih-lebih pada bagian utaranya dapat lebih mudah mendeteksi musuh yang datang dari arah timur. Dengan penempatan Pos MBKD yang dikenal dengan nama X-2 di Banjarasri, maka Kolonel AH. Nasution dapat meneruskan kegiatannya, terutama mengirim perintah atau berita kepada Pos MBKD dan pejuang republik Indonesia lainnya yang sedang berjuang melawan pendudukan Belanda. Berita-berita tersebut dikirim melalui radiogram yang digerakkan oleh tenaga baterai yang dibuat sendiri. Untuk keperluan tersebut setiap hari mulai dari pukul 15.00 -- 17.00 secara bergantian dua orang penduduk Borogunung memutar pedal sepeda untuk mengisi arus dalam baterai tersebut, sehingga pada malam harinya siap dipakai. Pengiriman berita-berita ke pos MBKD Yogyakarta yang dipimpin oleh (materi Look dan) Ny. Nasution dapat melangsungkan hubungan dengan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta yang berada di pengungsian Bangka. Kelancaran hubungan tersebut berkat kebijaksanaan pimpinan Pos MBKD Yogyakarta yang dapat memanfaatkan pesawat terbang milik UNCI untuk mengirimkan surat-surat penting.

Sementara itu pertempuran terus berlangsung semakin banyak membutuhkan peralatan perang. Di Banjarasri terdapat tempat pembuatan dan perbaikan peralatan perang seperti misalnya granat gombyok, peluru, denotator, mortir dan senjata lainnya. Perbaikan dan pembuatan senjata-senjata itu dilakukan di rumah-rumah penduduk desa secara terpencar-pen-

car, misalnya Panjangrejo, Manguntukimin, Setjopawiro, Kromowidjoyo, Kromomangun, Djojopawiro dan Djojoukoro.²²⁰ Di Banjarasri juga, senjata-senjata yang berat dapat diperbaiki. Hal ini dimungkinkan karena di daerah ini terdapat peralatan yang lebih lengkap seperti mesin bubut. Sebagian besar pekerja itu berasal dari daerah Jawa Barat yang dipimpin oleh Siam. Mereka tinggal di rumah-rumah penduduk bersama keluarganya.

Serangan yang sering dilakukan tentara Belanda, terutama pemboman terhadap wilayah pertahanan pejuang Republik Indonesia seperti di Dekso, Poros dan Samigaluh, mengakibatkan semakin banyak penduduk sipil maupun militer yang menjadi korban. Dalam situasi demikian Banjarasri juga mempunyai peranan yang cukup penting, karena mempunyai sarana pengobatan dan perawatan untuk para korban tersebut. Rumah sakit St. Yusuf yang didirikan oleh para misionaris Kristen Katolik pada masa pemerintahan penjajahan Belanda memberikan andil yang cukup besar pada masa itu. Para korban perang dari daerah Cebongan, Borobudur, Godean, Kebon Agung, Samigaluh, daerah sebelah utara Kota Yogyakarta dan daerah lain sekitarnya di bawa ke Rumah Sakit St. Yusuf oleh para pemuda pejuang, militer maupun para anggota palang merah sukarela.²²¹ Di bawah pimpinan Suster Koeta dan Pastur Zervatius yang bersedia menjadi palang merah sukarela, mereka memberikan pertolongan pengobatan kepada para pejuang dan pengungsi yang menjadi korban pertempuran. Usaha tersebut didukung oleh kurang lebih 9 orang dokter dan beberapa orang perawat yang mengungsi dari Yogyakarta, di antaranya adalah Dokter Hutagalung dan Dokter Kusen.²²²

Di samping itu Kelurahan Banjarasri juga mempunyai peranan penting bagi Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Karena setelah Belanda menyerang ibukota Republik Indonesia Yogyakarta, maka Jaksa Agung Tirtowinoto dan pejabat kepala Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Besar Polisi Sosrodanukusumo mengungsi ke Kelurahan Banjarasri. Kemudian Tirtowinoto mendirikan Pos Kejaksaan

Agung dalam pengungsian dan begitu juga Sosrodanukusumo membentuk pos kepolisian dalam pengungsian di daerah Banjarasri. Hal itu merupakan usaha mereka untuk tetap melanjutkan mekanisasi suatu pemerintahan negara biarpun dalam pengungsian. Tirtowinoto dan Sasrodanukusumo bersama-sama menempati bagian depan rumah keluarga Pawirosuwarno. Kebutuhan sehari-hari mereka yang berupa bahan makanan sebagian diperoleh dari penduduk setempat, dan sebagian lagi mereka beli dari penduduk desa. Keamanan kedua pejabat tinggi negara itu hanya diandalkan kepada petugas keamanan desa. Mereka tidak mempunyai pengawal khusus selain seorang ajudan yang dibawa oleh Sosrodanukusumo.

Dengan banyaknya pejabat penting pemerintah Republik Indonesia yang berada di Banjarasri, mengharuskan para pemudanya lebih berhati-hati dalam menjaga dan meningkatkan tugas keamanan desa. Keamanan tersebut lebih diperketat lagi karena di Banjarasri sering diadakan pertemuan antara pejabat-pejabat penting Republik Indonesia. Pejabat dari Angkatan Darat, kepolisian, Kejaksaan Agung selama pengungsian telah beberapa kali bertemu untuk membicarakan berbagai masalah yang timbul dalam masa perjuangan.

Demikianlah sekilas rentangan peristiwa yang terjadi di Kelurahan Banjarasri yang dalam masa revolusi ternyata mampu berperan aktif dan mempunyai peran penting dalam mendukung perjuangan Republik Indonesia. Hal yang sangat menguntungkan adalah daerah Banjarasri memiliki letak geografis yang sangat baik dan aman, sehingga tentara Belanda tidak mampu menjangkau dan menduduki daerah tersebut. Hal itu sudah barang tentu merupakan modal yang sangat penting untuk mendukung peranan Banjarasri sebagai tempat pengungsian penduduk sipil, para pimpinan pemerintahan maupun militer. Keadaan itu lebih didukung lagi dengan adanya kondisi yang baik dalam pemerintahan desa di Banjarasri. Sehingga keamanan dan pelayanan sosial terhadap para pengungsi dan pejuang dapat diwujudkan.

2.4.4.2.3 *Kelurahan Banjarharja, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo*

Kelurahan Banjarharja adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Kalibawang yang daerahnya terdiri dari 75 % pegunungan dan 25 % dataran. Di daerah yang berbukit-bukit banyak ditanam tanaman keras seperti kelapa, durian, rambutan dan pohon buah-buahan lainnya. Sedang di daerah yang datar digunakan untuk tanah-tanah persawahan. Batas-batas Kelurahan Banjarharja adalah sebagai berikut : di utara berbatasan dengan pedukuhan-pedukuhan wilayah Kelurahan Banjar Oya, di timur dibatasi oleh Sungai Progo, di sebelah selatan dan barat berbatasan dengan pedukuhan-pedukuhan wilayah Kelurahan Banjarasri. Keadaan wilayah Kelurahan Banjarharja yang terdiri dari perbukitan itu adalah wajar apabila daerah tersebut kemudian dipilih sebagai salah satu markas pertahanan TNI dan MBKD pun akhirnya juga bermarkas di daerah tersebut.

Sementara itu dengan didudukinya ibukota Republik Indonesia Yogyakarta oleh tentara Belanda, maka seluruh jajaran TNI dengan konsekuen melaksanakan keputusan Dewan Sosial Militer untuk segera meninggalkan kota. Tetapi karena serangan Belanda sangat mendesak menyebabkan gerak mundur yang dilaksanakan oleh golongan militer tidak teratur dan mengakibatkan kekuatan militer tidak dapat dengan segera tersusun kembali. Untuk menjalin hubungan di antara pimpinan militer terpaksa para pimpinan militer seperti AH. Nasution, TB Simatupang, Soeharto dan bahkan Panglima Besar Jenderal Sudirman harus mengembara dari desa satu ke desa yang lain. MBKD di bawah pimpinan Kolonel AH. Nasution pada mulanya berpindah-pindah tempat dan akhirnya menetap di Kelurahan Banjarasri dan Kelurahan Banjarharja, Kecamatan Kalibawang. Markas Komando Operasional menempati rumah Nitiredja di Kelurahan Banjarasri, sedang seluruh kegiatan kesekretariatan MBKD dilakukan di rumah Supardjan di padukuhan Padoan kelurahan Banjarharja.

Kelurahan Banjarharja sangat tepat dipilih sebagai salah satu daerah pertahanan, mengingat keadaan daerahnya sangat memungkinkan, di samping daerahnya berbukit-bukit juga adanya Sungai Progo yang cukup lebar di sebelah timur desa, sehingga memudahkan pengawasan terhadap kemungkinan adanya pasukan Belanda atau patroli Belanda yang akan menyerang atau memasuki wilayah Kelurahan Banjarharja. Satu-satunya jembatan yang menghubungkan kecamatan Kalibawang dengan daerah-daerah di sebelah timur Sungai Progo, yang terletak di pedukuhan Duwet, kelurahan Banjarharja, dirusak oleh penduduk setempat atas instruksi Pemerintah Militer setempat. Dengan diputuskannya jembatan Duwet itu, maka untuk waktu selanjutnya lalu lintas penduduk ke seberang sungai harus menggunakan rakit.

Dengan adanya MBKD di Kelurahan Banjarharja, maka praktis kelurahan itu menjadi daerah yang ramai oleh aktivitas militer. Hal ini tentu saja tidak dapat terlepas dari peran serta penduduk Kelurahan Banjarharja yang banyak memberi bantuan kepada golongan militer, dan bahkan juga kepada para pengungsi dari daerah lain. Bantuan penduduk kepada tentara dapat dikemukakan antara lain : (1) membantu mengadakan pengawasan, yakni mengawasi terjadinya kemungkinan Belanda mengadakan serangan di samping juga mengawasi setiap orang yang mungkin menjadi mata-mata Belanda dengan menyamar sebagai pengungsi yang memasuki daerah Kelurahan Banjarharja; (2) menyelenggarakan dapur umum, yakni menyediakan makanan bagi tentara yang datang di Kelurahan Banjarharja, juga bagi para pengungsi yang memerlukannya; dan (3) jika diperlukan maka penduduk pun bersedia menjadi kurir.

Keikutsertaan penduduk di dalam memperkuat pertahanan ternyata sangat besar artinya, sehingga Kelurahan Banjarharja sebagai salah satu daerah pertahanan selama masa revolusi sama sekali tidak dapat ditembus oleh kekuatan militer Belanda. Bahkan mata-mata Belanda yang mencoba memasuki daerah Kelurahan Banjarharja dapat diketahui dan ditangkap. Tugas-

tugas pengawasan itu dalam pelaksanaannya ditangani oleh golongan pemuda yang dipimpin oleh Kasdu dan Kabul.^{2 2 3} Dalam melaksanakan tugas pengawasan golongan pemuda Kelurahan Banjarharja selalu berhubungan dengan pemerintah militer, Kecamatan Kalibawang.

Selama agresi Militer Belanda II golongan pemuda Banjarharja berhasil menangkap dua orang mata-mata yaitu Ardjo Bodong dan Nyamat, dan keduanya kemudian ditahan di rumah Atma Mihardja di pedukuhan Duwet. Di samping itu golongan pemuda Banjarharja juga mendapat titipan tiga orang mata-mata yang ditangkap di daerah Kecamatan Ngluwar, Salam. Ketiga tawanan itu adalah Damhari, Ali dan seorang lurah dari Salam. Dari kelima orang tawanan itu Ardjo Bodong adalah mata-mata yang dianggap paling berbahaya. Oleh karena itu atas perintah pemerintah militer Kecamatan Kalibawang Ardjo Bodong akhirnya dibunuh oleh Ranudimedjo, dan empat tawanan lainnya oleh golongan pemuda kemudian diserahkan kepada pihak TNI. Partisipasi masyarakat Kelurahan Banjarharja, selain mengadakan pengawasan, juga menyediakan bahan pangan untuk TNI yang bermarkas di daerah tersebut dan para pengungsi yang datang ke daerah tersebut. Rumah yang dipergunakan sebagai darurat adalah rumah milik Kasan Dimeja di pedukuhan Karangharja. Untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan maka di bawah koordinasi kepala dukuh penduduk secara bergiliran dan sukareja menyerahkan bantuan berupa sayuran, beras, ketela pohon, jagung atau apa saja yang dihasilkan di Kelurahan Banjarharja.

Selain dari tugas pengawasan dan penyediaan bahan pangan, penduduk, Kelurahan Banjarharja tidak segan-segan membantu TNI dalam hal mengantar surat atau mengambil dan mengantar senjata dan amunisinya. Pada umumnya tugas para kurir adalah mengantar surat-surat ke Banjarasri atau ke Bligo Kecamatan Ngluwar. Hal itu berkaitan erat dengan adanya MBKD di Kelurahan Banjarharja.

Kelurahan Banjarharja juga ditempati oleh sekelompok tentara yang bertugas dalam bidang teknik persenjataan. Kelompok itu menempati rumah milik anggotanya yang bernama Astikin di pedukuhan Salak Malang. Atas kesadarannya, Astikin yang menjabat sebagai anggota pemerintahan militer kecamatan telah menyulap rumahnya menjadi sebuah bengkel senjata. Keikutsertaan di dalam kelompok teknik itu sesuai dengan pendidikannya yaitu pendidikan dan latihan teknik mesin. Pada umumnya senjata yang masuk ke dalam bengkel adalah senjata jenis ringan seperti pistol atau senapan. Karena peralatan bengkelnya masih sangat sederhana, maka senjata-senjata yang rusak berat terpaksa dikirim ke Kelurahan Banjarasri untuk diperbaiki di sana. Keberadaan bengkel senjata di Kelurahan Banjarharja itu ternyata sangat besar artinya bagi perjuangan bersenjata. Terbukti dari banyaknya senjata yang masuk ke dalam bengkel tersebut tidak hanya datang dari kelompok tentara yang bermukim di sekitar Kelurahan Banjarharja saja, tetapi juga datang dari kelompok-kelompok bersenjata lainnya yang jauh dari Kelurahan Banjarharja.

Di Kelurahan Banjarharja juga didapati pos pertolongan bagi kecelakaan sekarang PPPK yang menempati rumah Atmowiyono di pedukuhan Demangan.²²⁴ Pos PPPK itu ditangani oleh 12 orang, sehari-harinya sibuk bukan hanya oleh anggota tentara saja, tetapi juga oleh para pengungsi yang kebanyakan datang dari daerah yang jauh, misalnya Muntilan atau sekitar Kota Yogyakarta. Pos PPPK tersebut dibangun dalam keadaan darurat dan sesungguhnya kurang memenuhi persyaratan, karena persediaan obat-obatan yang sangat terbatas. Mengingat kurangnya persediaan obat dan juga peralatan PPPK, maka setiap kali pasien datang dengan luka atau sakit berat segera dikirim ke rumah sakit di Kelurahan Banjarasri. Untuk mengirim pasien ke Banjarasri pun juga merupakan masalah tersendiri, mengingat tidak adanya alat transportasi, sehingga penduduk harus kembali berperan, yaitu misalnya dengan cara pasien dipikul atau bahkan kalau perlu digendong.

Di samping itu penduduk Kelurahan Banjarharja secara aktif turut serta di dalam kegiatan pertahanan. Atas prakarsa koordinasi Komando Onder Distrik Militer (KODM) di Kelurahan Banjarharja dibentuk regu Pager Desa yang setiap saat bersedia membantu kepentingan militer. Hal itu dibuktikan dengan keikutsertaan penduduk dalam membuat rintangan di tempat-tempat yang dianggap rawan, atau memutuskan jembatan seperti jembatan Duwet dalam upaya memutus jalur gerak Belanda. Dengan adanya peran serta penduduk desa yang sangat aktif dan juga wilayah geografis yang sangat menguntungkan untuk pertahanan, maka selama revolusi daerah kelurahan Banjarharja Kecamatan Kalibawang sama sekali tidak dapat ditembus oleh kekuatan militer Belanda, kecuali dengan tembakan mortir dari markas Belanda di Cebongan.

BAB III

KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM REVOLUSI

3.1 Rakyat Desa dan Jaringan

Dalam bab ini akan diungkapkan mengenai keterlibatan dan ditatanya kekuatan rakyat dalam revolusi. Rakyat sebagai kekuatan massa terikat oleh kesatuan daerah, kesamaan adat dan agama. Ikatan-ikatan seperti ini dapat dimanfaatkan untuk menyambung hubungan antara kekuatan militer yang datang dari luar dengan rakyat. Untuk menghubungkan kekuatan rakyat dengan militer jaringan administratif berperan untuk menata hubungan itu.

Hal ini dirasa penting untuk memberi gambaran yang agak realistik tentang keterlibatan masyarakat desa dalam revolusi. Di sini rakyat desa dapat dipandang sebagai kekuatan politis yang mampu memperkuat diplomasi internasional pemerintahan Republik. Sisi lain rakyat merupakan kekuatan logistik yang sangat dibutuhkan dalam perang gerilya. Oleh karenanya keterlibatan rakyat pedesaan dalam revolusi merupakan kebutuhan yang mendasar untuk melangsungkan kehidupan bernegara.

Seperti telah dikemukakan dalam pembicaraan terdahulu bahwa Kabupaten Sleman sampai dengan masa revolusi masih terbagi dalam tiga wilayah. Sleman Barat dipimpin RW. Projosudarwo, Sleman Tengah dipimpin RW. Projowilogo dan Sleman Timur dipimpin oleh RW. Projosutikno. Mereka disebut sebagai asisten wedono di bawah pimpinan KRT. Projodiningrat yang waktu itu sebagai Bupati Daerah Tingkat II Sleman.¹

Pemerintah Kabupaten Sleman semasa revolusi merupakan pemerintah gerilya. Sebab dalam menjalankan roda pemerintahannya, bupati dan stafnya selalu berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lain yang dipandang aman untuk selalu dapat menjalin hubungan ke bawah dengan camat, lurah dan kepala dukuh. Pemerintahan kabupaten didampingi pemerintahan militer yang disebut Komando Distrik Militer (KDM). Di tingkat kecamatan juga didampingi pemerintahan militer yang disebut Order Distrik Militer (ODM). Pemerintahan kelurahan dijalankan lurah dibantu kepala bagian dan kepala dukuh dan pager praja. Pejabat dari tingkat bupati sampai kepala dukuh merupakan kelompok inti dalam perang gerilya. Dalam pelapisan masyarakat mereka termasuk berada pada tingkat atas.

Pemerintahan gerilya berpindah-pindah sampai 26 kali. Perpindahan berkisar di Kecamatan Sleman, Kecamatan Turi dan Kecamatan Ngaglik. Selama berada di Kecamatan Sleman pemerintah gerilya pernah berkantor di Krandon dan Ngepos. Waktu di Kecamatan Turi sempat berkantor di pedukuhan Somoitan, Manggungsari, Tawangharjo dan Nangsri. Saat di Kecamatan Ngaglik secara berturut-turut berkantor di padukuhan Jetis Suruh, Ngetiran, Ngledok, Wareng, Candi, Karanglo, Bandulan dan Bawuk.² Pemerintahan dan perang gerilya ini banyak melibatkan unsur kekuatan sosial-politik dan sosial ekonomi masyarakat pedesaan, yang relatif menguasai medan dan mempunyai logistik cukup baik.

Haji Harun waktu itu merupakan tokoh yang memiliki jaringan bawah yang terkait dengan usaha penggarapan tanah, penggilingan beras dan pertokoan. Tanah sawah Haji Harun

sangat luas, terletak di Kelurahan Pendowoharjo. Untuk menggarap sawah Haji Harun melibatkan kurang lebih 60 kepala keluarga. Perhitungan ini didasarkan kebiasaan penggarapan sawah di pedesaan, bahwa tiap satu hektar sawah biasanya digarap 2 orang. Dari perhitungan ini berarti Haji Harun memegang masyarakat lapisan bawah petani yang memiliki luas tanah relatif sempit atau tidak memiliki tanah sama sekali.³ Usaha penggilingan padi Haji Harun melibatkan belasan kepala keluarga. Mereka tinggal di desa-desa sekitar Rejosari. Haji Harun dalam memilih para pekerja tidak pandang bulu, apakah mereka seorang Islam yang taat atau tidak. Dari usaha penggilingan beras Haji Harun dapat menguasai sejumlah masyarakat lapisan bawah. Di samping itu Haji Harun menjalin hubungan sangat erat dengan masyarakat golongan menengah seperti pedagang beras dan pedagang kebutuhan hidup sehari-hari di pasar Rejodani. Mengingat Waktu itu mesin penggilingan harus masih merupakan peralatan yang langka, maka Haji Harun mampu menyerap pelanggan dari desa sekitarnya. Mereka berdatangan dari Kelurahan Donoharjo, Sariharjo dan Pendowoharjo. Pertokoan yang dibuka di rumah bagian depan memperkuat hadirnya Haji Harun sebagai pemilik modal yang luwes berhubungan dengan banyak orang yang terdiri atas berbagai lapisan masyarakat.⁴ Di pihak lain, sebagai masyarakat yang beragama Islam Haji Harun memiliki hubungan yang luas di kota, misalnya dengan Komaruddin dan Waston yang sering bermarkas di kauman, markas Hisbullah waktu itu yang dalam melakukan perang gerilya sering singgah di Rejodani.⁵

Haji Harun adalah kakak Haji Mansur. Haji Mansur memegang jabatan lurah di Sariharjo. Selama revolusi Haji Mansur meminta bantuan Haji Harun menyediakan Nuk⁶ bagi tentara gerilya yang sering tinggal beberapa lama di Rejodani. Sebagai dapur umum dipilih pedukuhan Ngetitan. Pengelolanya Mohammad Sukap, kepala dukuh setempat. Untuk tenaga memasak atau yang bertindak sebagai juru masak adalah ibu-ibu dari pedukuhan setempat.⁷

Kebijaksanaan Haji Harun yang sering memberi bantuan pangan terhadap gerilya tercium oleh Belanda. Karena diketahui oleh Belanda, bahwa di rumah Haji Harun memang tersimpan bahan pangan cukup banyak, maka Belanda berusaha membakarnya. Saat api mulai menjilat gedung, tentara Belanda meninggalkannya. Setelah itu kemudian masyarakat setempat berusaha memadamkan api yang telah membakar sebagian kecil gudang. Api berhasil dipadamkan dan kegurian yang diderita Haji Harun tidak seberapa banyak. Hal ini disebabkan oleh keadaan gudang yang sangat kuat, karena dibangun dari beton, di samping itu masyarakat cepat bertindak.⁸

Pengumpulan bahan pangan untuk para gerilya seperti sayuran beras, ketela, kepala, kimpul dan sukun dilakukan oleh para pemuda setempat. Untuk jenis makanan yang luwes fungsinya seperti sukun dan ubi-ubian, pengolahannya diatur setelah sayuran yang tersedia di pekarangan maupun di sawah mulai menipis. Hal ini dilakukan karena pada bulan-bulan Januari sampai April sayuran masih mudah diperoleh di pekarangan dan di sawah. Pada bulan Juni mulai dipanen, dengan demikian para gerilya Republik selama revolusi di daerah Sleman tidak pernah mengalami kekurangan makan. Bahkan sampai dengan ditariknya pasukan tentara Belanda dari Kota Yogyakarta, di beberapa tempat yang ditempati pasukan gerilya masih memiliki sisa persediaan beras.⁹ Tetapi pernah terjadi, di pos-pos tertentu persediaan bahan makan untuk gerilya menipis. Sebagai tambahan penduduk setempat mengusahakannya dengan cara meminta sumbangan kepada setiap orang yang lewat jalan pali dekat dengan pos gerilya, yang akan ke pasar menjajakan hasil bumi berupa beras, sayuran, ubi-ubian dan lain-lain.¹⁰

Para *bakul* atau petani yang akan masuk kota dengan tujuan hendak menjajakan hasil bumi, sering mendapat gangguan dari perampok. Dengan alasan rakyat dilarang Pemerintah Republik memperdagangkan hasil bumi ke kota atau alasan bertugas menyediakan *nuk* untuk gerilyawan, orang-orang

yang akan mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi melakukan aksi perampasan atau pencegahan barang dagangan rakyat desa yang akan dijajakan ke kota seperti beras, sayur-sayuran, ketela, jagung dan sebagainya.¹¹ Tempat-tempat yang sering untuk melakukan aksi pencegahan itu antara lain : Jongkang, Nandan, Gumawang, Karangjati (jalan jurusan Yogya; Pulowatu) dan Kentungan (jalan jurusan Yogya – Kentungan).¹²

Untuk kawasan Sleman, selama revolusi masyarakat selalu diliputi rasa was-was. Perasaan timbul oleh bayangan akan datangnya serangan dari Belanda dan oleh ulah kelompok penjahat yang sering melakukan penggarongan. Komplotan penjahat yang sering beraksi di wilayah Sleman diorganisasi oleh oknum tentara republik Samual dan Frits, masing-masing berpangkat mayor dan kapten. Mereka yang tergabung dalam komplotan perusuh ini yang di kalangan masyarakat cukup dikenal antara lain: Baru, Darmo Kloyang dan Jarkasi.¹³ Komplotan ini bersenjata sebagaimana tentara yang sedang berjuang, ia melakukan pembegalan dan penggedoran di rumah-rumah penduduk, berdalih mencari dana untuk perjuangan, mereka mendatangi rumah-rumah orang kaya meminta harta benda dengan paksa. Harta benda yang diminta biasanya dalam bentuk perhiasan dari bahan emas, intan dan berlian. Sebagai markas komplotan itu di antaranya pernah menempati rumah kepala dukuh Nglempong Kidul, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik. Takut dituduh terlibat tindak kejahatan komplotan penjahat yang bemarkas di rumahnya, Suparjo, kepala dukuh Nglempong Kidul meninggalkan rumahnya. Setelah beberapa lama mengungsi ke tempat saudaranya, ia baru kembali ke rumahnya setelah komplotan penjahat meninggalkan Nglempong saat-saat terakhir menjelang Belanda meninggalkan Yogyakarta.¹⁴

Dua atau tiga hari setelah Belanda melakukan serangan atas Kota Yogyakarta, banyak penduduk desa yang datang ke desa untuk mengungsi. Mereka berasal dari berbagai sudut kampung Yogyakarta, seperti Gowongan, Cokrokusuman, Jetisharjo, Blunyah dan Mergangsan.¹⁵ Bersamaan itu juga datang tentara

republik dari berbagai kesatuan ke desa-desa. Para pengungsi mencari tempat pengungsian tidak jauh dari kota. Tempat yang dipilihnya paling jauh 4 – 5 km, dari batas kota. Mereka tinggal di tempat pengungsian, ada yang hanya beberapa minggu, ada yang satu bulan, ada yang hampir dua bulan, malahan ada yang diantaranya yang tidak pulang ke asalnya, dan menetap di-pengungsian sampai sekarang.¹⁶ Para gerilyawan selalu berpindah-pindah, tetapi dapat terjadi pengulangan bertempat tinggal di daerah yang sama. Misalnya minggu pertama bulan kedua mereka tinggal di Ngetiran, kemudian pindah tempat dan pada suatu waktu yang lain akan kembali ke Ngetiran.¹⁷

Penempatan para pengungsi maupun gerilyawan republik di rumah-rumah penduduk, kepala dukuh tampil sebagai pengatur. Bilamana ada rombongan tentara republik yang akan berpindah ke suatu daerah tertentu, sebelum dilaksanakan pasti ada pemberitahuan lebih dahulu. Pemberitahuan ini secara hirarkis datang dari atas ke bawah. Dari KDM/bupati ke KODM/camat, kemudian terus ke lurah dan terakhir ke kepala dukuh. Rumah-rumah siapa yang akan ditempati dipertimbangkan oleh kepala dukuh. Penyampaian berita, biasanya melalui seorang penghubung atau kurir. Khusus mengenai penempatan para pengungsi tidak melalui jaringan pemerintahan sebagaimana penempatan pasukan gerilya, sebab kedatangan para pengungsi waktu itu tidak terancam. Mereka datang langsung ke pedukuhan-pedukuhan, sudah barang tentu mengenai penempatannya langsung diatur oleh kepala dukuh.

Pedukuhan yang pernah dan sering ditempati pengungsi tentara republik antara lain Mudal, Karangmloko, Ngetiran dan Brayut. Di Mudal pengungsi dan tentara Republik ditempatkan di rumah Karyodiryo, Karyopawiro, Diryowiharjo, Somopawiro, Kertorejo dan Karyokemi.¹⁹ Di Ngetiran tentara republik ditempatkan di rumah milik Pak Sidal, Muhammad Sukap, Tono Manadi, Mbok Badri dan Pak Karjo.²⁰ Di Karangmloko tentara republik dan para pengungsi ditampung di rumah milik Harjoyuwono, Partosanjoyo dan Mangundoyo.²¹ Sementara itu

di Brayut tentara republik dan para pejuang yang lain ditempatkan di rumah milik Martodiharjo, Kartopiyogo dan Sudarjo.²² Pada umumnya mereka yang rumahnya dijadikan sebagai tempat penampungan para pengungsi dan para pejuang, merupakan petani kaya atau terdiri atas para pedagang. Dengan pertimbangan-pertimbangan rumah yang akan ditempati cukup besar, keadaan ekonomi tuan rumah memadai dan letaknya agak jauh dari jalan yang sering dilalui patroli Belanda.

Dengan tidak direncanakan, kedatangan para pengungsi dari kota ke desa menimbulkan kontak jual beli antara penduduk desa dengan para pengungsi. Tempat-tempat yang sering dijadikan ajang transaksi biasanya di simpang jalan sepanjang jalan jurusan Tugu Yogyakarta – Turi Sleman. Semula jual beli masih terbatas pada bahan pangan dan tempatnya tetap di pinggiran setiap persimpangan jalan. Namun setelah dirasa keadaan tidak aman karena sering ada patroli tentara Belanda maka tempat jual beli dipindahkan ke lokasi yang letaknya agak jauh dari lalu lintas patroli Belanda. Keadaan semakin bertambah ramai dan jenis barang yang dijual bertambah variasinya. Karena jumlah pengunjung dari hari kehari semakin ramai dan macam komoditi tambah bervariasi, maka tempat itu layaknya *pasar anyar*.²³

Munculnya *pasar anyar* sekitar bulan Januari 1949. Pada mulanya kebutuhan makan para pengungsi disediakan oleh penduduk. Namun setelah beberapa lama, mereka merasa *rikuh* kepada penduduk desa dan kemudian para pengungsi berusaha mencukupinya sendiri. Lama kelamaan keuangan para pengungsi semakin menipis, bahkan habis sama sekali. Oleh karena untuk mendapatkan bahan pangan ditempuh dengan cara menukarkan barang-barang yang masih mereka miliki, seperti pakaian, perhiasan atau barang-barang lainnya. Biasanya sehelai kain batik dapat ditukar dengan 3 sampai 4 kg beras, satu potong baju kebaya dapat ditukar dengan 2 sampai 3 kg beras. Sementara itu sebuah sepeda dapat ditukar dengan kurang lebih 25 kg beras atau ketela rambat yang masih di sawah seluas 100 m².²⁴

Dari sekian banyak orang yang sering melakukan dagang di *pasar anyar*, ada di antara mereka yang selalu berpindah-pindah dari pasar yang ada di sekitar wilayah Sleman, bahkan sering sampai ke Pasar Kraggan, Pingit, Kricak dan Beringharjo di kota. Karena mengadakan penjelajahan dari pasar ke pasar, maka tidak mengherankan apabila mereka sering melihat dan mendengar kegiatan tentara Belanda di markasnya masing-masing. Dari orang-orang macam beginilah informasi yang berkenaan dengan aktivitas Belanda dapat diketahui oleh para gerilyawan yang sedang bermarkas di pedesaan.²⁶ Dengan demikian maka para pejuang republik yang sedang bermarkas di pelosok pedesaan dapat menghindari sergapan musuh, bahkan sebaliknya para gerilyawan dapat melakukan penghadangan terhadap tentara Belanda yang akan berpatroli.²⁶

Salah satu karakteristik elit lokal di pedesaan adalah mempunyai kekuatan ekonomi dan mengendalikan massa. Secara ekonomis mereka memiliki tanah sendiri yang relatif luas dan tanah bengkok. Tanah sebagai lahan pertanian menciptakan lapangan kerja dari masa ke masa, yang mampu menimbulkan pola hubungan *Patron Client* antara pemilik dan penggarap. Hubungan ini dapat menciptakan jaminan sosial bagi lapisan bawah, yang cenderung selalu dipertahankan oleh kedua belah pihak. Para *client* ini biasanya tidak semata-mata hanya bekerja sebagai penggarap tanah, tetapi sering diajak berkunjung ke tempat-tempat saudara, relasi si patron atau sering diutus menyampaikan sesuatu atau membawa pesan untuk orang-orang tertentu.²⁷ Sebagai orang yang telah diyakini dapat dipercaya, mereka sering dilibatkan atau dimanfaatkan oleh pemerintah sipil dan militer untuk memenuhi kebutuhan logistik dan massa pada waktu perang gerilya.²⁸

Lapisan menengah yang terdiri atas para pegawai atau guru sekolah rakyat pedesaan, memiliki kesempatan yang besar untuk bertemu dengan pejabat pemerintah dan massa rakyat. Mereka banyak menyebarkan ide-ide keindonesiaan yang sangat berguna untuk perjuangan kemerdekaan.²⁹ Pengetahuan yang me-

reka miliki dapat dimanfaatkan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang berbagai perkembangan politik di Indonesia. Di wilayah Kabupaten Sleman umumnya dan Sleman Tengah pada khususnya, karena jumlah personal juru penerang dari kantor penerangan tidak mencukupi, para guru sekolah rakyat oleh Kantor Penerangan ditunjuk sebagai juru penerang dalam situasi darurat untuk menjelaskan perkembangan situasi.³⁰

Dari berbagai peristiwa dan berbagai proses persentuhan antara desa dengan revolusi telah melahirkan sejumlah peranan baru bagi penduduk desa dari berbagai lapisan masyarakat yang ada. Namun sifat hubungan yang dikembangkan masih berdasar pada pola hubungan sosial ekonomi tradisional yang telah lama tumbuh. Ini berarti jaringan administratif dan jaringan sosial tradisional dipergunakan sebagai perangkat revolusi. Di sini rakyat yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat difungsikan untuk mendukung pemerintahan gerilya dalam merentangkan jaringan pertahanan.

3.2 Keterlibatan Masyarakat dalam Memanggul Senjata

Apabila dalam pembicaraan di atas telah diuraikan aktivitas masyarakat pedesaan dalam kaitannya dengan revolusi atas dasar pola hubungan sosial dan ekonomi, selanjutnya di bawah ini akan diuraikan keterlibatan masyarakat pedesaan dalam bidang bersenjata.

Di wilayah Kabupaten Sleman selain kesatuan Tentara Pelajar (TP), kesatuan 151, pasukan Hisbullah, pasukan Militer Akademi, (MA), juga masih ada pasukan lain lagi yang turut berjuang memertahankan kemerdekaan yaitu Laskar Rakyat. Waktu itu hampir di setiap kelurahan mempunyai Laskar Rakyat.³¹ Sebenarnya Laskar Rakyat sudah lahir sejak penandatanganan perjanjian atau Perundingan Linggajati tahun 1946. Dalam rangka memperkuat garis pertahanan Republik Indonesia, di antara sejumlah Laskar Rakyat Sleman ada yang pernah dikirim ke beberapa daerah seperti di Ambarawa dan Se-

marang. Selama di medan perjuangan Laskar Rakyat bergabung dengan BPRI pimpinan Bung Tomo. Sebelum berangkat para pejuang dikumpulkan di markas BPRI yang terletak di Gondomanan.³² bersama tenaga suka rela yang lain dari Yogyakarta kurang-lebih sebanyak 6 gerbong, mereka berangkat ke Semarang. Rombongan memasuki daerah Semarang dari Lintasan kereta api jurusan Cirebon — Semarang. Jalur ini merupakan rute yang paling aman bagi sebuah rombongan yang besar, sebab jalan raya yang menghubungkan Kota Magelang — Semarang. Jalur ini merupakan rute yang paling aman bagi sebuah rombongan yang besar, sebab jalan raya yang menghubungkan kota Magelang — Semarang lewat Ambarawa dan Ungaran banyak mendapat gangguan dari tentara Belanda.³⁵

Anggota Laskar Rakyat Sleman waktu itu semula kebanyakan hanya bersenjatakan benda-benda tajam seperti belati dan pedang. Ada di antara mereka yang membawa *sipat kandel* dalam bentuk keris, tombak dan sabuk yang bertuliskan huruf Arab. Dengan membawa senjata pusaka semacam itu, mereka merasa bertambah berani dan bersemangat untuk ikut ke medan perang.³⁴ Dengan modal persenjataan yang tradisional, setelah sampai di Semarang berpadu dengan semangat kelompok, mengenakan seragam serba hitam atau serba biru dari BPRI, jadilah mereka kekuatan yang dahsyat.³⁵ Secara psikologis dan sosiologis seragam itu mampu menghilangkan rasa takut, sehingga niat melakukan pengacauan terhadap musuh sangat menggebu dan dapat membunuh musuh merupakan kebanggaan tersendiri.³⁶ Lebih-lebih setelah mereka menyandang senjata pistol *sten gun* dan granat hasil rampasan, mereka bertambah keberaniannya. Bagi mereka berperang merupakan hal yang biasa dan tidak menakutkan.³⁷

Oleh karena itu ketika tentara Belanda berhasil menduduki Kota Yogyakarta, reaksi masyarakat sangat cepat dan mereka segera mengkonsolidasikan diri guna membentuk laskar. Sebelum semua jaringan yang diperlukan oleh pemerintah militer berjalan dengan lancar, Laskar Rakyat yang telah ada di Sleman

secara improvisasi menjalankan gerakan bersama pamong desa. Laskar rakyat yang lahir sesudah Kota Yogyakarta diduduki oleh Belanda misal di Kecamatan Mlati, Sleman dan Ngaglik.

Langkah-langkah yang diambil oleh Laskar Rakyat Mlati bekerjasama dengan anggota Militer Akademi adalah merusak jembatan dan membuat rintangan-rintangan di jalan jurusan Yogya Magelang. Di samping itu juga menanam *trek bom* dan dinamit di dekat dusun Kutu. Akibat kecerobohan dalam melakukan pemasangan trek bom dan granat menyebabkan banyak warga masyarakat tewas rumah-rumah penduduk Kutu banyak yang dibakar oleh Belanda dan warga laki-laki banyak yang ditangkap. Rumah dan penduduk yang menjadi sasaran kemarahan tentara Belanda terutama yang ada di pinggir jalan raya Yogyakarta Magelang.³⁸ Guna menghindari terulangnya peristiwa yang pernah menimpa penduduk Dusun Kutu oleh Martojuwito diusulkan agar gerilyawan dari kesatuan apapun tidak melakukan pemasangan bom atau ranjau di sepanjang jalan yang menghubungkan Yogya — Magelang khususnya sepanjang jalan yang ada dalam wilayah Mlati. Sebenarnya usulan tersebut tidak semata-mata hanya akan menghindari terulangnya peristiwa yang buruk, tetapi juga mengandung maksud ingin menjadikan Mlati sebagai basis logistik dan administratif pemerintah militer serta menciptakan rute gerilya dari Sleman Barat dan Sleman Tengah atau sebaliknya.³⁹ Keinginan itu selaras dengan kesepakatan Bupati Sleman Mayor tituler Projodiningrat, Komandan KDM Sleman Mayor Pasjuni dan Komandan SWK Mayor Kasno yang mengatur pungutan hasil bumi, dana dan permintaan bahan makan dari penduduk yang dipandang mampu.⁴⁰

Akibat dari pelaksanaan atas apa yang diusulkan oleh Martojuwito, Laskar Rakyat Mlati sering dianggap berpihak kepada Belanda dan memusuhi pejuang-pejuang republik, khususnya pihak militer. Pada suatu hari pernah terjadi, kesatuan Tentara Pelajar akan melakukan penghadangan terhadap konvoi Belanda yang akan melalui wilayah Mlati, tetapi oleh

Martojuwito dihalang-halangi. Sewaktu selisih pendapat mencapai puncaknya, Martojuwito menawarkan dua alternatif. Pertama, apakah kesatuan Tentara Pelajar (TP) sanggup mempertahankan wilayah Mlati kalau memang sanggup seluruh kekuatan militer yang ada di Mlati akan mendukungnya, tetapi apabila tidak sanggup lebih baik mengurungkan niatnya yang hendak melakukan penghadangan, sebab nantinya hanya akan membuat rakyat menderita yang akhirnya mengacaukan logistik pemerintahan militer itu sendiri. Kedua, apabila pasukan TP tidak mau menerima tawaran alternatif pertama, seyogyanya segera menarik pasukannya dari daerah Mlati untuk menghindari tindakan kekerasan sesama teman. Akhirnya kedua belah pihak saling memahami kesulitan dalam bergerilya. Dengan Militer Akademi juga pernah terjadi perselisihan saat pasukan Belanda melakukan operasi di Mulungan. Pihak Militer Akademi bermaksud mengadakan perlawanan terhadap Belanda yang sedang beroperasi di Mulungan, sementara itu Martijuwito tidak menyetujuinya dengan pertimbangan bahwa persenjataan tidak sepadan. Akhirnya Sudarman selaku komandan Militer Akademi mengobati kekecewaannya dengan melakukan penghadangan terhadap Belanda yang lewat jalan jurusan Yogya – Kaliurang, mengganggu Belanda di markasnya yang letaknya di Cebongan dan Beran.⁴¹

Di Kecamatan Sleman persisnya di Beran Lor juga muncul Laskar Rakyat yang dikoordinasikan oleh Bakir. Ia pernah menjadi anggota KNIL pada jaman penjajahan Belanda dan pernah menjadi *heiho* pada zaman pendudukan Jepang. Berbekal pengalaman dan kemampuan yang diperoleh dari dua masa penjajahan, Bakir dengan dibantu Sriyono menghimpun pemuda Beran diajak berjuang.⁴² Sriyono memperoleh pengalaman di bidang kemiliteran sewaktu dia bergabung dengan kesatuan Polisi Militer di bawah pimpinan Cokropranolo.⁴³ Gagasan Bakir dan Sriyono menghimpun pemuda Beran didorong oleh rasa ingin melaksanakan seruan Sri Sultan Hamengku Buwono IX awal masa revolusi yang pernah mereka dengar lewat siaran radio, bahwa seluruh rakyat Indonesia wajib mempertahankan

Negara Republik Indonesia.⁴⁴ Mengenai seruan Sultan Hamengku Buwono IX ini memang pernah ada dan seruan itu disampaikan dalam pidato radio yang disiarkan pada pukul 20.00 – 20.30 tanggal 15 Agustus 1946 untuk memperingati satu tahun Indonesia merdeka.⁴⁵

Anak buah Bakir semula berjumlah 21 orang. Persenjataan yang mereka miliki terdiri atas 5 buah senapan, 1 buah pistol, dan beberapa granat. Kesemuanya diperoleh dari anggota polisi dengan ditukar beras.⁴⁶ Menurut penuturan Bakir tindakan polisi itu disebabkan oleh penghidupan yang waktu itu memang sulit dan kesatuan sangat membutuhkan bahan makan, sementara Bakir dan kawan-kawannya dapat mengusahakan bahan pangan, kebetulan Bakir memerlukan senjata untuk ikut berjuang menegakkan Negara Republik Indonesia. Gejala sulitnya penghidupan sudah nampak menjelang jatuhnya Kota Yogyakarta ke tangan Belanda. Pada hari-hari pertama setelah Belanda melakukan agresi II, bahan pangan sungguh sulit diperoleh. Beras dari harga sekitar Rp 40,— sampai Rp 50,— naik menjadi Rp 400,— sampai Rp 500,— bahkan setelah dua minggu tentara Belanda menduduki Yogyakarta, harga beras mendekati Rp 1000,— untuk satu liter.⁴⁷

Dengan persenjataan yang sangat terbatas. Bakir dan kawan-kawan melakukan penghadangan tentara Belanda yang sedang berpatroli di wilayah Kecamatan Sleman. Sudah barang tentu dengan personel sebanyak 21 orang, sementara jumlah senjata api hanya ada 6 buah, maka mereka yang tidak kebagian senjata api kemudian menyandang linggis, kampak, tombak, parang dan sebagainya. Dengan persenjataan yang kurang memadai, maka dalam berperang harus menggunakan akal. Dengan akal, tentara Belanda berhasil dikelabui seolah-olah kekuatan dan pertahanan fihak republik sangat kuat dan tangguh.⁴⁸

Pada awalnya Bakir dan kawan-kawan tidak mengalami kesulitan dalam pemenuhan bahan pangan, bahkan sebagaimana telah disinggung dalam uraian di atas, bahwa senjata yang mereka miliki berasal dari seorang anggota polisi yang ditukar

dengan beras. Ketika persediaan pangan sudah mulai menipis, Bakir dan Sriyono pergi ke Brayut menemui Suparjo Suryo pada awal Maret 1949, dengan maksud minta bantuan bahan pangan.⁴⁹ Bantuan yang diberikan Suparjo Suryo tidak hanya terbatas pada bahan pangan, tetapi juga bantuan tenaga perjuangan yang terdiri atas para pemuda Dusun Brayut. Setelah ada tambahan sejumlah pemuda dari dusun bruyut, anak buah Bakir menjadi 42 orang.⁵⁰ Rupanya Bakir sadar, bahwa jumlah anggota semakin banyak, semakin besar kebutuhannya akan logistik. Untuk mengatasihai itu sepenuhnya diserahkan kepada Suparjo Suryo. Malahan gabungan pejuang dari Beran dengan sejumlah pemuda Brayut itu kepemimpinannya juga diserahkan kepada Suparjo Suryo. Kemudian Suparjo Suryo dengan Bakir berbagi tugas. Suparjo Suryo sebagai pemimpin bertugas atau bertanggungjawab soal pengadaan persenjataan dan bahan pangan. Selain itu dia juga harus melakukan koordinasi dengan TNI maupun dengan Laskar Rakyat yang lain apabila akan melakukan penghadangan pasukan patroli Belanda dan mengadakan serangan ke markas pertahanan Belanda di seputar wilayah Sleman Tengah. Tugas Bakir mengatur pasukan setiap saat beroperasi.⁵¹

Kegiatan Suparjo Suryo dan anak buahnya, mulai dari penghadangan patroli Belanda di jalan jurusan Yogya – Magelang, penyerahan markas Belanda di Beran, Medari, Kledokan Pakem dan Kaliurang.⁵² Sewaktu Serangan Umum 1 Maret 1949 juga ikut berpartisipasi.⁵³ Segala aktivitas pejuang dari Beran – Brayut selalu merepotkan dan merugikan pihak Belanda. Hal ini rupanya membuat Belanda kesal, oleh karenanya pada tanggal 6 Mei 1949 Belanda menyerang Dusun Brayut dari segala penjuru. Belanda masuk Dusun Brayut : dari arah utara, barat dan dari arah selatan.⁵⁴ Secara naluriah penduduk yang panik lari ke arah timur, namun dari arah depan disongsong oleh tentara Belanda, yang membabibuta menghamburkan pelurunya. Peristiwa ini membawa korban jiwa sebanyak 63 orang. Di antara korban ada 4 anggota pejuang Beran – Brayut.⁵⁵ Selebihnya terdiri atas penduduk setempat. Beberapa

nama penduduk yang menjadi korban antara lain : Haryono, Kusen, Cokrowiharjo, Darmosuprpto, Surodikromo, Dalijo, Wongso Pajo dan Kromo.⁵⁶ Anggota persatuan Beran – Brayut yang gugur ialah Rajiman, R. Sudiono, R. Suprpto dan Suprpto.⁵⁷ Jenazah para korban seluruhnya dikubur di Brayut.⁵⁸

Di Rejodani Kecamatan Ngaglik juga lahir sebuah Laskar Rakyat yang diseponsori oleh Haji Harun. Menurut penuturan Dirjo, laskar yang lahir di Rejodani anggotanya berasal dari Plosokuning, Godean dan Rejodani sendiri. Mereka yang tergabung pada umumnya telah memiliki pengalaman kemiliteran yang diperoleh pada jaman pendudukan Jepang. Tidak jarang dalam operasinya, misal penghadangan dan serangan ke markas Belanda Laskar Rejodani selalu bekerjasama dengan Komando Distrik Militer (KDM) Sleman dan Komando Onder Distrik Militer (KODM) Ngaglik.⁵⁹ Untuk menambah senjata yang telah diperoleh dari Militer Akademi, Haji Harun minta kepada Haji Munir pemilik Hotel Trim di sebelah selatan Stasiun Tugu Yogyakarta.⁶⁰ Orang yang dipercaya mengambil senjata ke Hotel Trim adalah Ny. Parinah, agar tugas yang diembannya berhasil dan lolos dari pemeriksaan Belanda, maka Ny. Parinah menyamar sebagai *bakul* sayur-mayur dan sebagai *bakul* berbagai keperluan dapur. Berangkat ke kota membawa dagangan sayur-sayuran dan pulang ke desa membawa belanjaan bumbu-bumbu. Waktu pulang menggendong *tenggok* berisi bermacam-macam keperluan dapur itulah Ny. Parinah membawa peluru dan pistol atas usaha Haji Munir di bawah timbunan belanjaan.⁶¹

Setelah melihat digunakan jaringan tradisional dalam pengertian administratif dan jaringan sosial ekonomi, rakyat rupanya mendapat kesempatan langsung berperan dalam menggerakkan revolusi di daerah pedesaan, lebih dari itu masyarakat yang pada zaman penjajahan Belanda dan masa pendudukan Jepang terutama para pemudanya mendapat latihan kemiliteran, dalam kondisi kritis mampu membentuk pasukan yang sangat menunjang keberhasilan dalam perjuangan menegakkan kemerdekaan.

BAB V

PENUTUP

Agresi Militer II Belanda ke ibukota Negara Republik Indonesia, Yogyakarta, pada tanggal 19 Desember 1948 oleh tentara pendudukan Belanda, menyebabkan banyak pemimpin pemerintahan yang ditangkap. Mereka itu antara lain Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta dan Komodor Udara Surjadarma. Pemimpin-pemimpin yang masih sempat menyingkir ke luar kota melanjutkan perlawanan terhadap Belanda secara perang gerilya.

Perang gerilya di samping disebabkan oleh situasi yang sangat mendesak, juga karena kondisi yang masih sangat lemah dari Pemerintah Indonesia, terutama dalam bidang pertahanan. Oleh karenanya perang gerilya bertujuan membentuk pertahanan secara total, yaitu mengikutsertakan seluruh rakyat aktif dalam perjuangan melawan Belanda di dalam segala kegiatan sosial, politik maupun ekonomi.

Didesak oleh situasi dan kondisi tersebut serta diperkuat Instruksi Panglima Markas Besar Djawa (MBKD) yang dikeluarkan pada tanggal 25 Desember 1948 dan yang ditandatangani oleh Kolonel AH. Nasution, lahirlah badan-badan perjuangan gerilya seperti di Sleman Timur yang bernama Pasukan Gerilya Sleman Timur, di samping badan-badan perjuangan lain yang telah ada. Kelahiran pasukan Gerilya Sleman Timur ini menda-

pat dukungan dan sambutan dari seluruh golongan rakyat di daerah itu. Hal ini terbukti bahwa di dalam tubuh Pasukan Gerilya Sleman Timur terdapat berbagai unsur antara lain dari Laskar Hisbullah, Laskar Banteng, Tentara Nasional Indonesia dan lain-lain. Hal ini menunjukkan pula bahwa rakyat Sleman khususnya dan umumnya masyarakat di DIY pada waktu itu telah benar-benar menyadari akan arti persatuan dan kesatuan serta rela berkorban untuk mempertahankan kemerdekaan tanah airnya.

Kelangsungan hidup pasukan gerilya Sleman Timur sebagai suatu badan perjuangan mengalami berbagai masalah dan pengalaman yang tidak dapat dipisahkan dari situasi dan kondisi umum pada waktu itu, karena justru kelahirannya di tengah-tengah situasi dan kondisi waktu itu. Masalah ekstern yang dihadapi yaitu berupa pembinaan kerjasama dan persatuan antara berbagai badan perjuangan, perlindungan terhadap rakyat, mengikutsertakan rakyat dalam seluruh kegiatan perjuangan secara total melawan tentara pendudukan Belanda baik dalam bidang sosial, politik maupun ekonomi merupakan beban yang tidak ringan bagi pasukan gerilya Sleman Timur. Di samping itu masalah intern yaitu berupa masalah pembinaan kesatuan tubuh pasukan gerilya Sleman Timur sendiri tidak kalah beratnya. Krisis-krisis yang timbul antara sesama anggota pasukan, baik krisis moral maupun materiil (perlengkapan ataupun persenjataan), krisis pendapat atau paham memerlukan kebijaksanaan tersendiri yang rumit. Namun semuanya dapat teratasi karena rasa kesadaran akan arti kesatuan dan persatuan serta kemerdekaan telah benar-benar dimiliki oleh seluruh rakyat Sleman Timur, khususnya segenap anggota Pasukan Gerilya Sleman Timur, dan umumnya masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sementara itu di daerah-daerah pedesaan seluruh wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ternyata sangat berperan aktif dalam mendukung perjuangan menentang tentara pendudukan Belanda. Keterlibatan dan peranserta aktif ma-

masyarakat pedesaan di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta itu tidak terbatas di bidang pertahanan saja, melainkan sangat kompleks antara lain meliputi bidang pengawasan, penyediaan perbekalan dengan melalui dapur umum, bidang kesehatan, sebagai kurir atau penyelidik, membantu penyediaan tempat perlindungan aman, membantu dalam bengkel-bengkel persenjataan, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu dilakukan oleh masyarakat desa dengan penuh keikhlasan, dan tanggung jawab yang besar. Mereka mampu menjalin hubungan yang akrab dengan militer maupun dengan para pengungsi yang datang dari daerah lain. Bahkan lebih dari semua itu masyarakat desa di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta ternyata rela mengorbankan baik harta benda maupun jiwa raganya, semata-mata untuk mendukung perjuangan menentang pendudukan Belanda.

Oleh karena itu tepatlah apa yang dikatakan oleh Ir. Soekarno (Mantan Presiden RI) bahwa

Yogyakarta menjadi termashur oleh karena jiwa kemerdekaannya. Hidupkanlah terus jiwa kemerdekaan itu !

DAFTAR CATATAN

Pendahuluan

1. Sartono Kartodirdjo (ed), *Sejarah Perlawanan-perlawanan terhadap Kolonialisme* (Jakarta; Pusat Sejarah ABRI (1973), dan lihat Seri Sejarah Tex Book Sejarah ABRI (Jakarta; HANKAM Pusat Sejarah ABRI, 1971–1975).
2. William H. Frederick dan Soeri Soeroto (ed), *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi* (Jakarta; LP3ES, 1982), halaman 28.
3. *Ibid*, halaman 72.
4. Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta; PN. Balai Pustaka, 1984), halaman 95.
5. *Ibid*.
6. J.H. Boeke, *Batas-batas dari Masyarakat Pedesaan Indonesia* (Jakarta; Bhratara 1971), halaman 35.
7. Selo Sumardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Gadjah Mada University Press, 1981, halaman 77.
8. *Ibid*. halaman 78.
9. Syahrir, *Perjoeangan Kita*, halaman 18–23; *Abdi Negara, Revolusi dan Kebudayaan*. Balai Pustaka, Jakarta, 1950, halaman 8, dan lihat pula Soedjito Sosrodihardja, *Perubah-*

an-perubahan Struktur Masyarakat di Jawa: Suatu analisa (Yogyakarta: Kaya. 1972).

10. Anthony Reid, *Revolusi Sosial: Revolusi Nasional*, PRISMA, Nomor 8, Agustus 1981, halaman 33–40.
11. Melacak Jejak Revolusi Nasional, dialog PRISMA dengan Roeslan Abdulgani, PRISMA, Nomor 8, Agustus 1981, halaman 62.
12. Fruin, *Dari Ekonomi Penjajahan ke Arah Ekonomi Kebangsaan*, Jembatan, Jakarta, 1949.
13. Sudjito Sosrodihardjo, Op. Cit. halaman 72–83.
14. Sartono Kartodirdjo, "Wajah Revolusi Indonesia. Dipandang dari Perspektivisme Struktural", PRISMA Nomor 8, Agustus 1981, halaman 4–5.
15. Tahi Bonar Simatupang, *Laporan Dari Banaran*, Kisah Pengalaman Seorang Prajurit Selama Perang Kemerdekaan, Sinar Harapan, Jakarta, 1982, halaman 237.
16. Abdul Haris Nasution, *Pertahanan Rakyat Total*, majalah PESAT, tahun XVII, nomor 27, 7 Juli 1959, halaman 11–14.
17. Kesaksian Tertulis KRT Murdodiningrat, 16 Maret 1983.
18. *Ibid.*
19. *Ibid.*
20. *Ibid.*

Bab I Geografi dan Masyarakat Daerah Sleman

1. Buku Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 1966–1967, halaman 214, untuk catatan berikutnya disingkat BDP.
2. *Ibid* halaman 213.
3. *Ibid.*
4. *Ibid.*

5. Sigit Wruhantara, *Sejarah Perjuangan Pada Clash II di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman*, 1984, halaman 5.
6. BDP, Op. Cit. halaman 214
7. *Ibid*
8. *Ibid*
9. Yang termasuk jenis tanaman polowijo adalah kacang tanah, kedelai tembakau, sayur-sayuran, ketela rambat dan ketela pohon.
10. BDP, Op. Cit., halaman 214
11. Sartono Kartodirdjo, *Ratu Adil*, Sinar Harapan Jakarta, 1984, halaman 142.
12. Sigit Wruhantara, Op. Cit., halaman 51.
13. Buku Gerilya Wehrkreise III, halaman 77
14. Wawancara dengan Ny. Kertorejo pada tanggal 10-10-1991, di Mudal, Sriharjo, Ngaglik, Sleman.
15. Wawancara dengan Mangun Pout pada tanggal 19-10-1991 di Rejodani, Ngaglik, Sleman.
16. Wawancara dengan Somopawira pada tanggal 25-10-1991 di Mudal, Sariharja, Ngaglik, Sleman.
17. Wawancara dengan Ny. Parinah pada tanggal 27-10-1991 di Tegal Tambakreja, Sariharja, Ngaglik, Sleman.
18. Wawancara dengan Ny. Harjapertama pada tanggal 19-10-1991 di Mudal, Sariharja, Ngaglik, Sleman.
19. Wawancara dengan Somopawiro pada tanggal 25-10-1991 di Mudal, Sariharja, Ngaglik, Sleman.
20. Wawancara dengan Ny. Parinah pada tanggal 27-10-1991 di tegal Tambakreja, Sariharjo, Ngaglik, Sleman.
21. Wawancara dengan Somopawiro pada tanggal 25-10-1991 di Mudal, Sariharjo, Ngaglik, Sleman.
22. Wawancara dengan Sumo Johar pada tanggal 21-10-1991 di Jongke, Sendangadi, Mlati, Sleman dan wawancara de-

ngan Ny. Panirah pada tanggal 27–10–1991 di Tegal Tambakrejo, Sariharjo, Ngaglik, Sleman.

23. Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1981, halaman 80.
24. *Ibid* halaman 85.
25. Penggolongan demikian penulis mengikuti pendapat Harsja W. Bachtiar, lihat Harsja W. Bachtiar, *The Religion of Java*; Sebuah Komentar, dalam buku Clifford Geertz, *Abangan Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1983, halaman 524–526.
26. Wawancara dengan Dachlan pada tanggal 15–10–1991 di Ngetiran, Sariharjo, Ngaglik, Sleman.
27. Wawancara dengan Martojuwito pada tanggal 14–10–1991 di Jongke, Sinduadi, Mlati, Sleman.
28. Selo Soemardjan, Op. Cit., halaman 95–103.

Bab II Jatuhnya Kota Yogyakarta dan Perang Gerilya di Pedesaan

1. Soekarno, *Mencapai Indonesia Merdeka*, Departemen Penerangan RI, Penerbitan Khusus, halaman 37 – 84.
2. Persyaratan berdirinya suatu negara, lihat Juniarta, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Yogyakarta, Yayasan Penerbitan Gadjah Mada, Yogyakarta, 1965, halaman 1.
3. Ahmad Subardjo Djojoadisoeerjo, *Kesadaran Nasional*, PT Gunung Agung, Jakarta 1978, halaman 346; Susunan Kabinet I secara lengkap lihat, nomor Peringatan 6 bulan Republik Indonesia Merdeka, halaman 24 – 26.
4. Seoripto, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Penerbit Grip, Surabaya, 1962, halaman 132.
5. J. Leimena, *Perselisihan Indonesia Belanda*, Penerbit Grafika, Jakarta, 1949, halaman 5.

6. *Ibid*, Mengenai persiapan mendirikan Republik buatan Jepang, lihat Ahmad Soebagya Djojoadisoeerjo, *op. cit* halaman 261 – 291.
7. Mohammad Roem, *Penculikan Proklamasi dan Penilaian Sejarah*, Penerbit Hudaya, Jakarta, 1970, halaman 53.
8. J. Leimena, *op. cit*, halaman 5.
9. *Ibid* halaman 8.
10. *Ibid*
11. Mohammad Roem, ed., *Tahta Untuk Rakyat, Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwana IX*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1982, halaman 67.
12. B.M. Diah, *Meninjau Masa Lalu* : "Suatu Revolusi yang dialirkan kepada jalan undang-undang dan hukum" dalam Merdeka, no. 3, Tahun Proklamasi, 1984, halaman 21.
13. Mengenai Perjanjian Linggajati, lihat J. Leimena, *op. cit*, halaman 9 – 13.
14. B.M. Diah, *op. cit.*, halaman 21.
15. *Ibid*
16. Max Karundeng, "34 Tahun Yang Lalu: Agresi Militer Belanda II", Sinar Harapan, 21 Desember 1982, halaman 1.
17. J. Leimena, *op. cit.*, halaman 13.
18. *Ibid* halaman 14
19. *Ibid*
20. *Ibid*
21. *Harian Masa*, Senin 13 Desember 1948
22. *Harian Nasional*, Sabtu 18 Desember 1948
23. *Ibid*
24. *Ibid*
25. Mohammad Roem, ed., *Tahta Untuk Rakyat, op. cit.*, halaman 209.

26. *Ibid.*
27. Moh. Hatta, *Memahami Sejarah* dalam PRISMA, no. 10 tahun V, Oktober 1976, halaman 79.
28. A. Karim DP, *Detik Perpisahan Antara Presiden Soekarno Dan Jenderal Sudirman*, Suatu Momen Yang Mengharukan Dalam Sejarah Revolusi Rakyat Indonesia, IPPHOS Report, 11 April 1949, halaman 253.
29. Buku Gerilya Wehkreise III, halaman 11.
30. *Ibid*
31. *Ibid*
32. *Ibid*
33. Samawi, *25 Tahun Merdeka*, Penerbit Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, 1 September 1970, halaman 92.
34. AH. Nasution, *Pokok-pokok Gerilya dan Pertahanan RI Dimasa Lalu dan Yang Akan Datang*, bagian penerbitan buku-buku literatur, Kebon Sirih, Jakarta, 1953, halaman 93.
35. Sejarah Militer Kodam VII Diponegoro, Sirnaning Yaksa Katon Gapuraning Ratu, Yayasan penerbit Diponegoro, Semarang, 1968, halaman 181.
36. Wawancara dengan Suratman, Wakil Komando Pasukan Gerilya Sleman Timur pada tahun 1949, di Pakem Kecamatan Kalasan pada 11 Desember 1991.
37. Wawancara dengan Sugeng, Komandan Pasukan Teritorial Gerilya Sleman Timur 1949, di Pakem, Kecamatan Kalasan, pada tanggal 11 Desember 1991.
38. Wawancara dengan R. Muhammad Dasuki, Penasehat Pasukan Gerilya Sleman Timur di Bayan, Kecamatan Kalasan pada tanggal 17 Desember 1991.
39. AH. Nasution, *Tentara Nasional Indonesia*, jilid Penerbit Seruling Masa, Jakarta, 1968, halaman 207.

40. Wawancara dengan Letkol Soewandi, Komandan KODM Cangkringan pada tahun 1949, di Surakarta pada tanggal 18 Desember 1991.
41. Sartono Kartodirdjo, *Mesionalisme dan Mellenarisme Dalam Sejarah Indonesia*, Seksi Penelitian Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM, Yogyakarta, Juni 1971 halaman 50. Hal ini dapat dibuktikan ketika istri Komandan Pasukan Gerilya Muljoredjo melahirkan anak laki-laki, maka anak tersebut kemudian di beri nama Dasuki dengan harapan kelak anak itu mempunyai kecakapan dan ilmu seperti R. Muhammad Dasuki. Begitu pula ketika istri Letda Soewahadi, komandan KODM Kecamatan Cangkringan melahirkan anak laki-laki, maka Letda Soewahadi meminta R. Mohammad Dasuki agar memberikan nama kepada anak itu Amir Syuhada dengan harapan kelak anak tersebut menjadi tentara Allah.
42. Wawancara dengan Sugeng, loc, cit.
43. *Ibid*
44. Wawancara dengan Suratman, loc. cit.
45. *Ibid*
46. Wawancara dengan Sugeng, loc. cit.
47. *Ibid*
48. Wawancara dengan Moh. Dirsam, Anak Pager Desa dari Pakem kecamatan Kalasan pada tahun 1949, di Kalasan pada tanggal 11 Desember 1991.
49. Wawancara dengan Suratman, loc. cit.
50. *Ibid*
51. Wawancara dengan R. Muhammad Dasuki, Penasehat Pasukan Gerilya Sleman Timur 1949, di Bayan Kalasan pada tanggal 17 Desember 1991.
52. Wawancara dengan Suratman, loc. cit.
53. Wawancara dengan Sugeng, loc. cit.

54. Wawancara dengan Muh. Dirsam, loc. cit.
55. Wawancara dengan Syamsuri, anak Pager Desa Pakem pada tahun 1949, di Pakem Kalasan pada tanggal 14 Desember 1991.
56. Wawancara dengan Sugeng, loc. cit.
57. Wawancara dengan R. Muh. Dasuki, loc. cit.
58. Murba, *Yogya Utara Sebagai Daerah Gerilya Masa Agresi Belanda ke II*, majalah Sejarah Militer Angkatan Darat nomor SA 17 tt, halaman 46.
59. Buku Gerilya Wehrkreise III, *op. cit*, halaman 77.
60. TB. Simatupang, *Arti Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Bagi Kita Sekarang ini*, dengan bertolak dari buku laporan dari Banaran, makalah ceramah di Pusat Penelitian Kebudayaan UGM, 14 Oktober 1980, hal 15.
61. *Ibid*
62. Murba, *op. cit*. halaman 46
63. TB. Simatupang, *Laporan Dari Banaran, Kisah Pengalaman Seorang Prajurit Perang Kemerdekaan*, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1980, halaman 38.
64. Republik Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta, VII Tahun Daerah Istimewa Yogyakarta (tk; t.p., tt) halaman 388.
65. Catatan Sejarah Pertempuran Rejodani, Ngetiran Sariharja Ngaglik (Panitia Pembangunan Monumen Perjuangan Kabupaten Sleman, 1974); halaman 18
66. Wawancara dengan R. Hadi Nartono pada tanggal 3 Oktober 1991 di Kamdanen Sariharja, Ngaglik, Sleman.
67. Kesaksian Tertulis Ramli (bekas komandan pasukan R), Sleman, 24 April 1983.
68. Kesaksian tertulis Sukamdi, tanpa tanggal, bulan dan tahun, dan wawancara dengan Sukamdi pada tanggal 14 Oktober 1991 di Morangan Triharja, Sleman.

69. *Ibid*

70. Kesaksian tertulis Sukamdi tanpa tanggal, bulan dan tahun dan wawancara dengan Sukamdi pada tanggal 14 Oktober 1991 di rumahnya Morangan, Triharjo, Sleman.

71. Kesaksian tertulis Romli tanggal 24 April 1983.

72. *Ibid*

73. Wawancara dengan Syarkowi pada tanggal 20 Oktober 1991 di Rejodani, Sariharjo, Ngaglik, Sleman.

74. Catatan Sejarah Pertempuran Rejodani . . . *op. cit.*, hal 7 – 8.

75. Wawancara dengan Martorejo pada tanggal 26 Oktober 1991 di Kandanen Sariharjo, Ngaglik, Sleman.

76. Catatan Sejarah Pertempuran Rejodani *op. cit.*

77. Wawancara dengan Syarkowi, *loc. cit.*

78. Wawancara dengan Martoiyo, *loc. cit.*

79. Catatan Sejarah Pertempuran Rejodani, *op. cit.* halaman 11.

80. *Ibid*

81. *Ibid* halaman 13

82. Wawancara dengan Syarkowi, *loc. cit.*

83. Wawancara dengan Sukamdi, *loc. cit.*

84. Wawancara dengan Noto Sugiwa pada tanggal 21 Nopember 1991 di Waras Sariharjo, Ngaglik, Sleman, dan wawancara dengan Suparjo pada tanggal 24 Maret 1985 di Mudal, Sariharjo, Ngaglik, Sleman.

85. Wawancara dengan Sukamdi, *loc. cit.*

86. Wawancara dengan Bakir pada tanggal 6 Oktober 1991 di Beran, Tridadi, Sleman.

87. Wawancara dengan Dachlan pada tanggal 15 Oktober 1991 di Ngetiran, Sariharjo, Ngaglik Sleman.

88. Wawancara dengan Noto Sugiyo pada tanggal 21 Oktober 1991 di Waras, Sariharjo, Ngaglik Sleman.
89. Wawancara dengan Suparjo, loc. cit.
90. *Ibid*
91. Wawancara dengan Dachlan, loc. cit.
92. *Ibid*
93. Wawancara dengan Suparjo, loc. cit.
94. Kesaksian tertulis S. Ragilpudjono, tertanggal 21 Maret 1983.
95. Monografi Kabupaten Bantul.
96. Wawancara dengan Atmo Priyono tanggal 7 Agustus 1991
97. *Ibid*
98. Mohammad Hatta, *Mohammad Hatta Memori*, (Jakarta : PT. Tintamas, 1978), 532 – 536.
99. Dharmawan, Dokumentasi Sewindu, (Jakarta : Yayasan Pendidikan dan kejuruan, 1953). halaman 50 – 55.
100. Sendam VII/Diponegoro, *Sejarah TNI AD Kodam VII/ Diponegoro, Sirnaning Yakso Katon Gapuraning Ratu*, Semarang : Yayasan Penerbit, 1 Maret 1968), hal 144.
101. Seluruh informan mengatakan demikian.
102. AH. Nasution, *Sejarah Perjuangan Nasional di Bidang Bersenjata*, (Jakarta : Mega Booksote, 1966), halaman 157.
- 102.^a *Ibid*, halaman 149.
103. Buku Gerilya Wehrkreise III, halaman 9 – 11.
104. Nugroho Notosusanto, *Tentara Peta*, (Jakarta : Gramedia, 1979), halaman 145 – 147.
105. *Ibid*
106. *Ibid*
107. Pada tanggal 28 Oktober 1948, Letnan Jenderal Sudirman membentuk dua komando daerah pertahanan yang lang-

- sung berada di bawah komandannya yaitu : (1) Komando Daerah Pertahanan Djawa di bawah AH Nasution sebagai Panglima Tentara Teritorium Djawa (PTTD) dengan markasnya di Yogyakarta, yang disebut Markas Besar Komando Djawa (MBKD), (2) Komando Daerah pertahanan Sumatera di bawah Kolonel Hidayat sebagai Panglima Tentara Teritorium Sumatera (PTTS) dengan markasnya di Sumatera (MBKS).
108. Yahya Muhaimin, *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945 – 1966*, (Yogyakarta : Gama University Press, 1971), halaman 13.
 109. Anthony Reid, "Fase Kedua : Kemenangan terakhir Juli 1947 sampai 1950" dalam Colin Wild dan Peter Carey (ed) *Gelora Api Revolusi*, (Jakarta Gramedia, 1986), halaman 185.
 110. Pengertian : "Desa" di sini adalah pedukuhan yaitu bagian dari Kalurahan.
 111. Wawancara dengan Sastrosukarno, Dulhadi, Wirosukarto, tanggal 17 Desember 1978 (arsip pribadi).
 112. Wawancara dengan Harjowiyadi tanggal 4 Pebruari 1979 (arsip pribadi).
 113. Wawancara dengan Martodaliyo tanggal 7 Desember 1979 (arsip pribadi).
 114. *Ibid*
 115. Harjowiyadi., *loc. cit.*
 116. Wawancara dengan Wiryopawiro pada tanggal 23 Nopember 1978 (arsip pribadi).
 117. Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta : Jembaran, 1971), halaman 324.
 118. Harjowiyadi, *loc. cit.*
 119. Hisbaron Muryantoro, *Partisipasi Rakyat Bibis Selama Clash II Pada Awal Tahun 1949*, (Skripsi Sarjana Muda

Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, 1980), halaman 7.

120. *Ibid*
121. *Ibid*
122. Wawancara dengan
123. Harjowiyadi *loc. cit.*
124. *Ibid*
125. Wawancara dengan Sastrosukarno tanggal 10 Agustus 1991
126. Wiryopawiro, *loc. cit.*
127. Hisbaron Muryantoro, *op. cit.*, halaman 12
128. *Ibid*
129. *Ibid*
130. *Ibid*
131. *Ibid*
132. Hisbaron Muryantoro, *op. cit.*, halaman 12
133. *Ibid*
134. *Ibid*
135. *Ibid*
136. Hisbaron Muryantoro, *op. cit.*, halaman 13
137. Wawancara dengan Wirosukarto tanggal 28 Maret 1978 (arsip pribadi)
138. *Ibid*
139. Wawancara dengan Karyosemito tanggal 28 Maret 1979 (arsip pribadi)
140. Suyatno, *Feodalisme dan Revolusi di Surakarta 1945 – 1950* dalam pergolakan politik dalam sejarah, (Jakarta: LP3ES, 1978), halaman 51.
141. Koentjaraningrat dkk, *Kamus Istilah Antropologi*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud 1984), halaman 29.

142. Wawancara dengan Atmo Priyono tanggal 15 Agustus 1991
143. *Ibid*
144. *Ibid*
145. *Ibid*
146. Wawancara dengan Atmo Priyono tanggal 17 Agustus 1991
147. Wawancara dengan Darmo Rumecko tanggal 17 Agustus 1991
148. *Ibid*
149. *Ibid*
150. Atmo Priyono, loc. cit., wawancara tanggal 17 Agustus 1991.
151. Darmo Rumecko, loc. cit., wawancara tanggal 17 Agustus 1991
152. Oemar Sanoesi, Api Segoroyoso (Yogyakarta: Proyek Pemeliharaan Tempat-tempat Bersejarah dan Perjuangan Bangsa, Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 1981), hal. 61.
153. Hisbaron Muryantoro, "Partisipasi Rakyat Bibis Selama Clash II Pada Awal Tahun 1949", (Skripsi Sarjana Muda Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, 1980), hal. 18.
154. Wawancara dengan Dulhadi tanggal 3 April 1979 (arsip pribadi)
155. *Ibid*
156. Wawancara dengan Harjowiyadi tanggal 19 Nopember 1979 (arsip Pribadi)
157. *Ibid*
158. *Ibid*
159. Wawancara dengan Joatema tanggal 28 Maret 1979 (arsip pribadi)
160. Wawancara dengan Wirosuharto tanggal 28 Maret 1979 (arsip pribadi)

161. Joatmo, loc. cit.
162. Wirosuharto, loc. cit.
163. Wirosuharto, loc. cit.
164. Wawancara dengan Asmuni tanggal 5 April 1979 (arsip pribadi)
165. *Ibid*
166. *Ibid*
167. Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, (Yogyakarta: Gadjah mada University, 1981), halaman 71.
168. Moehammad Roem dkk, *Tahta untuk Rakyat*, (Jakarta: Gramedia 1982), hal. 69.
169. Wawancara dengan Atmo Priyono tanggal 15 Agustus 1991
170. Wawancara dengan Darmo Rumecko tanggal 17 Agustus 1991
171. Atmo Priyono, loc. cit.
172. Darmo Rumecko, loc. cit.
173. Ny. Sumber Saporin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, (bandung: Ghalia Indonesia, 1977), halaman 124–125.
174. *Ibid*
175. Darmo Rumecko, Loc. cit.
176. Biro Pembangunan Sekretaris Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, *Laporan Pembangunan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Selama Pelita II* (1974/1975 s/d 1978/1979), halaman 3.
177. Hasil wawancara dengan Bapak Hadipawiro, Soediro Dirosoemarto, Suyitno, Sanggrahan, Semaki, Umbulharjo Yogyakarta tanggal 16 Maret 1992.
178. Hasil wawancara dengan Bapak Suwarsito Hadisumarto, Siraman, Wonosari tanggal 27 Agustus 1991.
179. *Ibid*

180. Panitia Pendiri Monumen Perjuangan 1945 Kabupaten Gunungkidul, *Sejarah Perjuangan 1945 Rakyat Kabupaten Gunungkidul pada Masa Alam Revolusi Physik Periode Tahun 1945 sampai 1950* (berupa naskah), Wonosari, 1974, hal. 4.
181. Hasil wawancara dengan Bapak Suwarsito Hadisumarto di Siraman Wonosari tanggal 27 Agustus 1991.
182. *Ibid*
183. *Ibid*
184. *Ibid*
185. *Ibid*
186. *Ibid*
187. *Ibid*
188. *Ibid*
189. Panitia Pendiri Monumen Perjuangan 1945 Kabupaten Gunungkidul, *op. cit.*, hal. 7
190. *Ibid* halaman 13
191. *Ibid* halaman 14
192. *Ibid* halaman 18
193. Hasil wawancara dengan Bapak C. Soegoto, bekas Kepala Pemerintahan Militer Patuk, Passi V Kodim 0730 Gunungkidul tanggal 7 Desember 1983.
194. I.N. Soebagyo, *Sri Sultan Hamengku Buwana IX*, Penyebar Semangat, Soerabaya, 1953, halaman 22.
195. *Ibid*
196. Panitia Pendiri Monumen Perjuangan 1945 Kabupaten Gunungkidul, *op. cit.*, halaman 20.
197. *Ibid.*, halaman 21
198. *Ibid.*, halaman 27
199. *Ibid*

200. Hasil wawancara dengan Bapak Candu Notopradono di gelaran II tanggal 28 Agustus 1991.
201. AH. Nasution, *Pokok-pokok Gerilya dan akan datang*, Penerbitan Kebon Sirih, Jakarta, 1953, halaman 93.
202. Wawancara dengan S. Hadisumarto di Siraman, Wonosari tanggal 27 Agustus 1991.
203. *Buku Gerilya Wehrkreise III*, tanpa tahun., halaman 94
204. Drs. Darmono Hardjowidjono, *Replika Sejarah Perjuangan Rakyat Yogyakarta*, Buku Kedua, Proyek Pemeliharaan Tempat Bersejarah Perjuangan Bangsa di Daerah Istimewa Yogyakarta 1984/1985, halaman 290.
205. *Ibid*
206. *Ibid*
207. *Ibid* halaman 291
208. *Ibid*
209. *Ibid* halaman 294
210. *Ibid* halaman 311
211. *Ibid*
212. Catatan wawancara Drs. Darto Harnoko dengan C. Soegito.
213. TB. Simatupang, *Laporan Dari Banaran*, PT. Pembangunan Jakarta, 1960, halaman 78.
214. Wawancara dengan Bapak Karyo Utomo pada tanggal 14 Agustus 1991 di dusun Banaran.
215. Wawancara dengan ibu Sutilah dan ibu Kary Utomo pada tanggal 14 Agustus 1991 di dusun Banaran.
216. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dati II Kulon Progo, Proposal Penyusunan Pembangunan Monumen Perjuangan TB. Simatupang di Banaran, Tahun 1991, Brosur, halaman 10.
217. Menurut peta Tahun 1984, lihat pula Drs. Dharmono H (editing) dalam *Replika Sejarah Perjuangan Rakyat Yogya-*

- karta*, jilid II, Proyek Penelitian Tempat Bersejarah Perjuangan Bangsa di DIY, 1984/1985 halaman 328, Tahun 1985 kalurahan Banjarasri meliputi Borosuci, Nglebeng, Ngare, Gebiri, Tosari, Boro, Jurang, Pendem, Kalijeruk, Tirun, Semak, Kalisalak, Dukuh, Tlagan, Paros dan Kisik.
218. Drs. P. Suryo Haryono, dkk, Monumen Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Depdikbud, Direktorat Jarannitra Proyek IDSN, Jakarta, 1987, halaman 57.
 219. Wawancara dengan Sastraatmadja pada tanggal 17 Agustus 1991 di Banjar Asri.
 220. Wawancara dengan Hardjamartono pada tanggal 17 Agustus 1991 di Banjar Asri.
 221. Wawancara dengan Sastraatmadja pada tanggal 17 Agustus 1991 di Banjar Asri.
 222. Wawancara dengan Purwo Utomo pada tanggal 18 Agustus 1991 di Banjarharja.
 223. Wawancara dengan Sastralenggana pada tanggal 18 Agustus 1991 di Banjarharja.

Bab III Keterlibatan Masyarakat dalam Revolusi

1. Sigit Wruhantoro (ed.), Sejarah Perjuangan pada Clash II di kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, Pemda Tk. II Sleman, 1984, halaman 7—11.
2. *Ibid* halaman 13
3. Wawancara dengan Sarkowi pada tanggal 24 Oktober 1991 di Rejodani.
4. Wawancara dengan Somapawiro pada tanggal 25 Oktober di Mudal.
5. Wawancara dengan Rujuk pada tanggal 28 Oktober 1991 di Mlati.
6. Nuk adalah nasi bungkus dengan lauk-pauk, dan pembungkusnya daun pisang.

7. Wawancara dengan Basri Harjana pada tanggal 29 Oktober 1991 di Ngetiran.
8. Wawancara dengan Mangun Pout pada tanggal 19 Oktober 1991 di Rejodani.
9. Wawancara dengan Jumadi pada tanggal 12 Oktober 1991 di Keparakan Kodya Yogyakarta.
10. Wawancara dengan Dahlan pada tanggal 15 Oktober 1991 di Ngetiran.
11. Wawancara dengan Somapawiro pada tanggal 25 Oktober 1991 di Mudal dan Wawancara dengan Somajohar pada tanggal 6 Oktober 1991 di Jongke.
12. *Ibid.*
13. Wawancara dengan Sakir pada tanggal 8 Oktober 1991 di Mudal.
14. *Ibid*
15. Wawancara dengan Natasugiwa pada tanggal 30 Oktober 1991 di Ngwaras.
16. Wawancara dengan Jasmin pada tanggal 10 Oktober 1991 di Ngrobong.
17. Wawancara dengan Dahlan pada tanggal 15 Oktober 1991 di Ngetiran.
18. *Ibid*
19. Wawancara dengan Sakir, *Loc. Cit.*
20. Wawancara dengan Basriharjana, *Loc. cit.*
21. Wawancara dengan Harjayuwana pada tanggal 10 Oktober 1991 di Karangmlaka.
22. Wawancara dengan Sudarja Martawidjarja pada tanggal 12 Oktober 1991 di Brayut.
23. Wawancara dengan Natasugiwa, *Loc. Cit.*
24. Wawancara dengan Sakir, *Loc. Cit.*
25. Wawancara dengan Dahlan, *Loc. Cit.*

26. *Ibid.*
27. Wawancara dengan Sakir, *Loc. Cit.*
28. Wawancara dengan Natasugiwa, *Loc. Cit.*
29. Wawancara dengan Pawirosudiyana, pada tanggal 14 Oktober 1991 di Sendangadi Mlati Sleman.
30. *Ibid*
31. *Ibid*
32. *Ibid*
33. Wawancara dengan Dirja, pada tanggal 19 Oktober 1991 di Mlati.
34. *Ibid*
35. Wawancara dengan Pawirosudiyono, *Loc. Cit.*
36. Wawancara dengan Dirja, *Loc. Cit.*
37. *Ibid.*
38. Wawancara dengan Martajuwita, pada tanggal 19 Oktober 1991 di Jongke Sendangadi Sleman.
39. *Ibid.*
40. Buku Gerilya Wehrkreise III (tk. tt.), halaman 84.
41. Wawancara dengan Martajuwita, *Loc. Cit.*
42. Wawancara dengan Bakir, pada tanggal 6 Oktober 1991 di Beran Lor.
43. Wawancara dengan Sriyana, pada tanggal 18 Oktober 1991 di Beran Lor.
44. Wawancara dengan Bakir, *Loc. Cit.*
45. Patriot Mingguan Merdeka No. 15, 14 September 1946, halaman 2.
46. Wawancara dengan Bakir, *Loc. Cit.*
47. Mingguan Merdeka, 8 Januari 1949, halaman 5.

48. Wawancara dengan Bakir, *Loc. Cit.* lihat pula "Pertahanan Desa/Kota dan pertempuran di Jalan-jalan, Brosur yang dikeluarkan Markas Besar Tentara SO III" (Solo: Gading, 1947), halaman 21–28.
49. *Ibid.*
50. *Ibid.*
51. Wawancara dengan Sudarja Martawidjarja, *Loc. Cit.*
52. Wawancara dengan Suprpta, pada tanggal 11 Oktober 1991 di Denggung Tridadi Sleman.
53. Wawancara dengan Bakir, *Loc. Cit.*
54. Wawancara dengan Sastra Sumarja pada tanggal 2 Oktober 1991 di Brayut Pendowoharja Sleman.
55. Wawancara dengan Suprpta, *Loc. Cit.*
56. Wawancara dengan Sudarja Martawidjarja, *Loc. Cit.*
57. Wawancara dengan Bakir, *Loc. Cit.*
58. Wawancara dengan Sastra Sumarja, *Loc. Cit.*
59. Wawancara dengan Dirja, *Loc. Cit.*
60. Wawancara dengan Mangun Pout, *Loc. Cit.*
61. Wawancara dengan Ny. Parinah pada tanggal 27 Oktober 1991 di Tegal Tambakreja Sleman.

DAFTAR NARA SUMBER

No.	N a m a	Alamat	Pekerjaan Dulu	Sekarang
1.	Harjawiadi	Pedukuhan Bibis	Kep. Dukuh Bibis	Kep. Dukuh Bibis
2.	Sastrasukarna	Ngentak	Lurah Ba- ngunjiwa	Lurah Bangun- jiwa
3.	Harjayuwana	Kalangan	Kep. Dukuh Kalangan	Kep. Dukuh Kalangan
4.	Wirosukarto	Bibis	Tani	Tani
5.	Wiryopawiro	Kalipucung	Kep. Dukuh Kalipucung	Kep. Dukuh Kalipucung
6.	Joatemo	Bibis	Tani	Tani
7.	Ny. Karyosemitro	Bibis	Tani	Tani
8.	Dulhadi	Bangen	Kep. Dukuh Bangen	Kep. Dukuh Bangen
9.	Asmuni	Bibis	Tani	Tani
10.	Moh. Nawawi	Bibis	Kaum Desa	Kaum Desa
11.	Martodaliyo	Jipangan	Kep. Dukuh Jipangan	Kep. Dukuh Jipangan

12. Atmoprayitno	Tlukan, Segoroyoso	Pembina Las- kar Segoro- yoso	Pensiunan Ka- bag. Sosial Kal. Segoroyoso
13. Darmo Rumecko	Segoroyoso	Pembina Las- kar Segoroyoso	Pensiunan Polisi Pamong Praja
14. Puspo Jiwolo	Segoroyoso	Kabag. Umum Kal. Segoro- yoso	Penisunan Ka- bag. Umum Segoroyoso
15. Letkol Soewohadi	Jl. Sidomukti No. 92 Solo	Dan KODM Kec. Cang- kringan Kab. Sleman	Dan Legiun Ve- teran Surakarta
16. Suratman	Pakem, Ta- man Martani	Wkl. Koman- dan Pasukan Gerilya Sleman Timur	Kep. Sekolah SD Tamanan
17. Sugeng	Niten Kalasan	Dan Regu Pa- sukan Terito- rial Gerilya Timur	Kep. Sekolah SD Sorogenen
18. R. Moh. Dasuki	Tegal Bayen	Penasehat Pa- sukan Gerilya Sleman Timur	Perintis Kemerdekaan
19. Muh Dirsan	Pakem Taman- martani Ka- lasan Sleman	Anggota Pasu- kan Teritorial Gerilya Sleman Timur	Guru SD Bokoharjo
20. Suwardi	Bayen Kala- san	Anggota Pasu- kan Teritorial Gerilya Sleman Timur	Kep. Sekolah SD Bokoharjo
21. Sjamsuri	Pakem Taman- an	Anggota Pasu- kan Teritorial Gerilya Sleman Timur	Guru SD Taman Martani Kalasan

22. Lettu Sukard	Jongkangan Taman mar- tani Kalasan	Anggota Pasu- kan Teritorial Sleman Timur	Pensiunan AD
23. Muh. Djazuli	Bayen Kala- san	Modin Purwo- martani	KUA Kalasan
24. Somadiwiry	Karangharja Kal. Banjar- harja Kec. Ka- libawang Ku- lon Progo	Pamong	Kabag. Sosial
25. Suparjan	Pandaan Kal. Banjarharja	TNI	Purnawirawan
26. Purwo Utomo	Duwet, Kal. Banjarharja	Pager Desa	Tani
27. Sastra lenggana	Karangharja Kal. Banjar- harja	Carik Karang- harja Kal. Ba- Banjarharja	Carik Karang- harja Kal. Banjarharja
28. Astikin	Salak Malang Kal. Banjarhar- ja	PMK	Tani
29. Atmoreja	Banjar Asri Kec. Kali- bawang	Kurir	Tani
30. Atmošumartono	Kel. Banjar Asri	Pager Desa Bor	Kep. Dukuh
30. Atmosumartono	Kel. Banjar Asri	Kep. Dukuh Bor	Kabag. Ke- makmuran
31. Hardjomartono	Kel. Banjar Asri	Pager Desa	Kep. Dukuh Borogunung
32. Joso	sda	Polisi	Pensiun
33. Nitiredjo	sda	Wakil Dukuh Borogunung	Tani
34. Ny. Pawirosuwar- no	sda	Tani	Tani

35. Karyantono	sda	Kep. Dukuh Banaran	Kep. Dukuh Banaran
36. Sastraatmadja	sda	Carik Kal. Banjar Asri	Carik Kal. Banjar Asri
37. Ibu Sutilah	sda	Anggota Per- wari	Tani
38. Hadisumarta	Dusun Siram- an	Pimpinan Pro- motor Pemuda Nasional DPRD Gunung- kidul	Pensiunan
39. Marto Sarjiya	Karangmaja, Bejiharja, Gunungkidul	Pembantu Bag. TU KDM III	Petani
40. Soehardo	Ngledok Siyon Wonosari Gunungkidul	Komandan KODM Piyungan	Pensiunan
41. Sumodiharjo	Gelaran II Bejiharja Gunungkidul	Kep. Dukuh Gelaran II	Kep. Dukuh Gelaran II

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdurrachman Surjomihardjo dan JR. Chaniago, PDRI (*Pemerintah Darurat Republik Indonesia*) Dikaji Ulang, Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI), Jakarta, 1990
2. Ahmad Subardja Djajaadisurya, *Kesadaran Nasional*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1978
3. Anthony Rheid, *Revolusi Sosial: Revolusi Nasional dalam PRISMA*, No. 8, Agustus 1981, hal. 33—40
4. Anthony Reid, *Fase Kedua: Kemenangan Terakhir Juli 1947—1950 dalam Gelora Asri Revolusi*, Gramedia Jakarta, 1986
5. Biro Pembangunan Sekretariat Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, *Laporan Pembangunan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Selama Pelita II (1974/1975 s/d 1978/1979)*
6. *Buku Gerilya Wehrkreise II*, tanpa tahun
7. Dharmono Hardjowodjono, Drs. (Koordinator Tim Penelitian), *Replika Sejarah Perjuangan Rakyat Yogyakarta* (naskah), Buku Kedua Proyek Pemeliharaan Tempat Bersejarah Perjuangan Bangsa di Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta, 1984/1985.

8. Leimena, J., *Perselisihan Indonesia Belanda*, Penerbit Grafika, Jakarta, 1949.
9. *Lukisan Revolusi Indonesia 1945–1950*, Kementerian Penerangan R.I. tanpa tahun.
10. Maklumat No. 5 yang dikeluarkan oleh Negeri Kesultanan Yogyakarta dan Praja Pakualaman Daerah Istimewa Yogyakarta Negara Republik Indonesia pada tanggal 26 Oktober 1945.
11. Maklumat No. 7 yang dikeluarkan Negeri Kesultanan Yogyakarta dan Praja Pakualaman Daerah Istimewa Yogyakarta Negara Republik Indonesia pada tanggal 8 Oktober 1945.
12. Maklumat No. 8 yang dikeluarkan oleh Negeri Kesultanan Yogyakarta dan Praja Pakualaman Daerah Istimewa Yogyakarta Negara Republik Indonesia pada tanggal 8 Desember 1945
13. Maklumat No. 14 yang dikeluarkan Daerah Istimewa Yogyakarta Negara Republik Indonesia pada tanggal 8 Desember 1945
14. Marc Karundang, *34 Tahun yang lalu: Agresi Militer Belanda ke II*, Sinar Harapan 21 Desember 1992
15. Mohammad Hatta, *Mohammad Hatta Memoir*, PT Tintamas, Jakarta, 1978
16. Mohammad Roem, *Penculikan Proklamasi dan Penilaian Sejarah*, Penerbit Budaya, Jakarta, 1970
17. Mohammad Roem dkk., *Tahta Untuk Rakyat*, Gramedia, Jakarta, 1982
18. Nasution, A.H. *Pokok-pokok Gerilya dan Pertahanan RI di Masa Lalu dan Yang Akan Datang*. Jakarta: Bagian Penerbitan Buku-buku Literatur Kebon Sirih, 1953
19. ———, *Tentara Nasional Indonesia*. Djakarta: Seruling Masa, 1968

20. ———, *Pertahanan Rakyat Total, Majalah Pesat tahun XVII, nomor 27, 4 Juli 1959 hal. 11–14.*
21. ———, *Sejarah Perjuangan Nasional di Bidang Bersenjata di Mega Booksote*, Djakarta, 1966
22. Nugroho Notokusanto, *Tentara Peta*, Tentara Peta, Gramedia, Djakarta, 1979
23. Panitia Pendiri Perjuangan 1945 di Kabupaten Gunungkidul, *Sejarah Perjuangan 1945 Rakyat Kabupaten Gunungkidul pada Masa Alam Revolusi Fisik Periode 1945–1950* (berupa naskah) Wonosari, 1974.
24. Roeslan Abdulgani, *Melacak Jejak Revolusi Nasional*, dalam PRISMA No. 8, Agustus 1981
25. Samawi, *25 Tahun Merdeka*. Yogyakarta: Badan Penerbit Kedaulatan Rakyat, 1 September 1970.
26. Sartono Kartodirdjo. *Kolonialisme dan Nasionalisme di Indonesia*, Lembaran Sejarah No. 1 Jogjakarta: Seksi Penelitian Djurusan Sedjarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM, 1967.
27. ———, *Messianisme dan Melienarisme Dalam Sedjarah Indonesia*, Lembaran Sedjarah No. 7. Jogjakarta: Seksi Penelitian Djurusan Sedjarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM, 1971.
28. ———, (ed.) *Sejarah Perlawanan-perlawanan Terhadap Kolonialisme*, Pusat Sejarah ABRI, Jakarta, 1973.
29. *Sejarah Militer Kodam VII, Sirnaning Yaksa Katon Gapuraning Ratu*. Semarang: Yayasan Penerbit Diponegara, 1968.
30. Selo Sumardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Gadjah Mada University Press, 1981.
31. Sigit Wruhantoro, *Sejarah Perjuangan pada Clash II di Kabupaten Dati II Sleman*, 1984.
32. Simatupang, T.B. *Laporan Dari Banaran*, cetakan II, Jakarta: P.T. Pembangunan, 1961.

33. Soebagyo, I.N., *Sri Sultan Hamengku Buwana IX*, Penjebar Semangat, Soerabaja, 1953.
34. Soekarno, Ir. *Tudjuh Bahan Pokok Indoktrinasi*. Djakarta: Panitia Pembimbing Djiwa Revolusi Retoolin Aparatur Negara, 1961.
35. Sulistyono Atmodjo, *Mengenang Almarhum Jenderal Soedirman*, Yayasan Pusat 10 Juli 1949, Yogyakarta, 1988.
36. Suyatno, *Feodalisme dan Revolusi di Surakarta 1945–1950 Dalam Pergolakan Politik Dalam Sejarah*, (P3ES), Jakarta, 1978.
37. William H. Frederich dan Soeripto (ed.). *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*, (P3ES), Jakarta, 1982.
38. Yahya Muhaimin, *Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia 1945–1966*, Gama University Press, Yogyakarta, 1971.

